LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

KATA PENGANTAR

Tahun 2016 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Kementerian Pertanian pada periode 2015-2019 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula; (2) Terjaminnya Distribusi Pangan; (3) Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi; (4) Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal; (5) Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah; (6) Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing; (7) Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi; (8) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani; (9) Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; dan (11) Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Kesebelas sasaran tersebut pada Tahun 2016 diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (7) Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; (8) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (9) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (10) Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2016 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016 ini disusun.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016 ini adalah bukti konkrit bentuk pertangggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun tentu saja buku ini tidak disusun secara asal dengan tujuan menggugurkan kewajiban semata, buku ini menjadi taruhan kredibilitas Kementerian Pertanian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan

publik dalam rangka pencapaian sasaran yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2016.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2016 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada buku ini bukan berarti dilalui tanpa aral. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat, terutama dapat menjadi *feedback* bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2017

Menteri Pertanian,

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

A. AMRAN SULAIMAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
Jl. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : http://www.deptan.go.id/itjen/

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2017
Inspektur Jenderal,

Justan R. Siahaan, Ak. M.Acc. Ca
NIP. 19600220 198203 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2016. Lakin Kementerian Pertanian tahun 2016 ini juga disususun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2016.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 11 indikator dan berhasil 13 indikator). Dari hasil evaluasi hanya 2 indikator yang cukup berhasil, 1 indikator kurang berhasil, dan 1 indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu: (1) Produksi padi mencapai 79,14 juta ton dari target 76,22 juta ton; (2) Produksi jagung mencapai 23,16 juta ton dari target 21,35 juta ton; (3) Harga GKP di tingkat Produsen lebih besar dari HPP; (4) Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras mencapai 6,2% dari target 5,7%; (5) Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar mecapai 14,85 dari target ≤ 15; (6) Variasi Produksi Bulanan

Bawang Merah mencapai 19,79 dari target ≤ 20, (7) Produksi manggis mencapai 225,7 ribu ton dari target 147 ribu ton; (8) Produksi Kelapa Sawit mencapai 32.524 Ribu Ton CPO dari target 30.845 Ribu Ton CPO; (9) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya mencapai 25,6% dari target 22%; (10) PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian mencapai Rp 26,5 juta dari target Rp 26 juta; (11) Nilai IKM Kementerian Pertanian mencapai 82,72 dari target 81;

Indikator kinerja yang **berhasil** yaitu: (1) Produksi daging sapi dan kerbau mencapai 0,561 juta ton dari target 0,589 juta ton; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 86 dari target 86,2; (3) Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa mencapai 347 dari target 364; (4) Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit mencapai 19,68 dari target ≤ 17; (5) Produksi mangga mencapai 2.180 ribu ton dari target 2.340 ribu ton; (6) Produksi nanas mencapai 1.795 ribu ton dari target 1.926 ribu ton; (7) Produksi salak mencapai 986,5 ribu ton dari target 1.080; (8) Produksi kentang mencapai 1.289 ribu ton dari target 1.348 ribu ton; (9) Produksi karet mencapai 3.158 ribu ton karet kering dari target 3.438 ribu ton; (10) Produksi kopi mencapai 639,3 ribu ton dari target 738 ribu ton; (11) Produksi kelapa mencapai 2.890 ribu ton dari target 3.355 ribu ton; (12) Produksi teh mencapai 144 ribu ton dari target 160 ribu ton; dan (13) Produksi daging kambing dan domba mencapai 114,9 ribu ton dari target 117 ribu ton. Indikator kinerja yang **cukup berhasil** adalah: (1) Produksi tebu mencapai 2,22 juta ton dari target 2,80 juta ton; (2) Produksi kakao mencapai 657 ribu ton biji kering dari target 831 ribu ton. Indikator kinerja yang **kurang berhasil** pencapaiannya di tahun 2016 ini yaitu Produksi kedelai mencapai 0,885 juta ton dari target 1,50 juta ton. Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai RB Kementerian Pertanian karena sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 5
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7
1.4. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian 10

II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN **11**
2.1 Rencana Strategis 2015-2019 11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 17

III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN **21**
3.1. Kriteria pengukuran Keberhasilan 21
3.2. Pencapaian dan analisa Kinerja Tahun 2016 21
Sasaran Strategis 1 (SS 1) 23
Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Gula Tebu Dan Daging Sapi Dan Kerbau
Sasaran Strategis 2 (SS 2) 62
Terjaminnya Distribusi Pangan
Sasaran Strategis 3 (SS 3) 70
Meningkatnya Akses Dan Pemanfaatan Pangan Dan Gizi
Sasaran Strategis 4 (SS 4) 74
Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal
Sasaran Strategis 5 (SS 5) 76
Stabilnya Produksi Cabai Dan Bawang Merah
Sasaran Strategis 6 (SS 6) 87
Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing
Sasaran Strategis 7 (SS 7) 117
Tersedianya Bahan Baku Bio Industri Dan Bio Energi
Sasaran Strategis 8 (SS 8) 120
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani
Sasaran Strategis 9 (SS 9) 123
Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani
Sasaran Strategis 10 (SS 10) 129
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis 11 (SS 11) 139
Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
3.3. Capaian Kinerja Lainnya 149
3.4. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian 151

IV PENUTUP..... 153
LAMPIRAN 157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 13
Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019 16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kementerian Pertanian 19
Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2016 22
Tabel 5. Peningkatan Luas tambah Tanam Padi Tahun 2015-2016..... 25
Tabel 6. Dampak *El Nino* dan *La Nina* terhadap Impor Beras..... 27
Tabel 7. Kegiatan Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Padi Tahun 2016 34
Tabel 8. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Jagung 39
Tabel 9. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Kedelai 44
Tabel 10. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Produksi Kedelai 45
Tabel 11. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Gula Tebu..... 51
Tabel 12. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi gula tebu 52
Tabel 13. Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi/Kerbau Kementerian Pertanian tahun 2016 60
Tabel 14. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi gula ... 61
Tabel 15. Perkembangan Rasio Produksi Padi di Luar Pulau Jawa Tahun 2011-2016 63
Tabel 16. Data Produksi dan Konsumsi Beras di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2015-2016..... 64
Tabel17. Kegiatan Pendukung Pencapaian Rasio Produksi Padi di Luar Jawa tahun 2016..... 64
Tabel 18. Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras di Tingkat Petani Berdasarkan Pantauan BPS Tahun 2016 66
Tabel 19. Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian Tahun 2012-2016..... 67
Tabel 20. Realisasi Serap Gabah Petani Tahun 2014-2016 68
Tabel 21. Kegiatan Pendukung Pencapaian Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen Tahun 2016..... 70
Tabel 22. Perkembangan Skor PPH Tahun 2011 – 2016..... 71
Tabel 23. Kegiatan Pendukung Pencapaian Skor PPH Tahun 2016..... 73
Tabel 24. Akar Masalah dan Rekomendasi Solusi Untuk Meningkatkan Keberagaman Konsumsi Masyarakat 74

Tabel 25. Kegiatan Pendukung Pencapaian pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras Tahun 2016 76
Tabel 26. Produksi Bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Besar 2011-2016 . 77
Tabel 27. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2016 79
Tabel 28. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Besar 80
Tabel 29. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Rawit 2011-2016 . 80
Tabel 30. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Rawit 2016 82
Tabel 31. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Rawit 82
Tabel 32. Produksi Bulanan dan Koefisien Variasi Bawang Merah 2011-2016 83
Tabel 33. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Bawang Merah..... 87
Tabel 34. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Perbaikan Pencapaian Produksi Kentang 96
Tabel 35. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Karet Tahun 2016 ... 99
Tabel 36. Rekomendasi akar permasalahan karet Tahun 2016 100
Tabel 37. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kopi Tahun 2016..... 103
Tabel 38. Rekomendasi akar permasalahan Kopi Tahun 2016 104
Tabel 39. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kakao Tahun 2016 .. 107
Tabel 40. Rekomendasi akar permasalahan Kakao Tahun 2016..... 118
Tabel 41. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Tahun 2016 . 111
Tabel 42. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Kelapa... 111
Tabel 43. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Teh Tahun 2016 113
Tabel 44. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi The 114
Tabel 45. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Daging Kambing dan Domba 117
Tabel 46. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Sawit Tahun 2016 119
Tabel 47. Perkembangan Kelas Kemampuan Kelompok Kelompoktani Tahun 2014-2016 121
Tabel 48. Kegiatan Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani Tahun 2016 123
Tabel 49. Kegiatan Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2016 128
Tabel 49. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 dan Tahun 2015..... 132
Tabel 50. Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian berdasarkan Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2015 142
Tabel 51. Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2010-2016..... 146
Tabel 52. Pengawalan dan Pendampingan di Sentra Produksi 148

Tabel 53. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2011-2016 151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 12
Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019 14
Gambar 3. Capaian kinerja produksi padi tahun 2011-2016 24
Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2011-2016 24
Gambar 5. Menteri Pertanian Malakukan Dialog dengan Petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur 26
Gambar 6. Pengembangan Infrastruktur Air (Embung, Pompa, DAM Parit, dan Long Storage) 28
Gambar 7. Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Dombeyoha Kecamatan Ladongi, Kolaka Sulawesi Tenggara 29
Gambar 8. Menteri Pertanian Melakukan Panen Padi Menggunakan *Combine Harvester* dan Bantuan Alsintan berupa *Rice Transplanter* *31*
Gambar 9. Varietas Unggul Baru (VUB) Komoditas Padi 32
Gambar 10. Teknologi Mekanisasi Tanaman Padi yang Dikembangkan oleh Kementerian Pertanian 33
Gambar 11. Capaian Kinerja Produksi Jagung Tahun 2011-2016 35
Gambar 12. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2011-2016 36
Gambar 13. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Jagung di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 37
Gambar 14. Teknologi Mekanisasi Tanaman Jagung yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian 39
Gambar 15. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2011-2016 40
Gambar 16. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2011-2016 41
Gambar 17. VUB Tanaman Kedelai 43
Gambar 18. Menteri Pertanian bersama Gubernur Jambi melakukan Panen Kedelai dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) 43
Gambar 19. Capaian Kinerja Produksi Gula Tebu Tahun 2011-2016 47
Gambar 20. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Areal Gula Tebu Tahun 2010-2016 48
Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab.OganIlir, Sumatera Selatan 49
Gambar 22. KBI Di Kab. Dompu dan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu di Kab.Gorontalo 50

Gambar 23. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2011-2016 53
Gambar 24. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2011-2016 54
Gambar 25. Proses Pengambilan Semen di BBIB Singosari Malang 55
Gambar 26. Lokasi SPR Cinagarogo Subang 57
Gambar 27. Kunjungan Menteri Pertanian di Kapal Ternak Camara Nusantara 1 59
Gambar 28. F1 pedet Pra Sapih Hasil Persilangan antara Pejantan Sapi PO dan Indukan Sapi Bali 60
Gambar 29. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Produsen 2012-2016 65
Gambar 30. Toko Tani Indonesia 69
Gambar 31. Pemanfaatan Pekarangan dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 72
Gambar 32. Penanaman Cabai dalam Rangka Mendukung Pengaturan Pola Tanam Nasional 78
Gambar 33. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cabai Tahun 2016 – 2019 81
Gambar 34. Grafik Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2011-2016 85
Gambar 35. Menteri Pertanian Melakukan Panen Bawang Merah 85
Gambar 36. Produksi dan Luas Panen Mangga Tahun 2011-2016 88
Gambar 37. Produksi dan Luas Panen Nenas Tahun 2011-2016 90
Gambar 38. Produksi dan Luas Panen Manggis Tahun 2011-2016 92
Gambar 39. Produksi dan Luas Panen Salak Tahun 2011-2016 94
Gambar 40. Produksi dan Luas Panen Kentang Tahun 2011-2016 95
Gambar 41. Produksi dan Luas Areal Karet Tahun 2011-2016 98
Gambar 42. Produksi dan Luas Areal Kopi Tahun 2011-2016 101
Gambar 43 Produksi dan Luas Areal Kakao Tahun 2011-2016 105
Gambar 44. Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2011-2016 109
Gambar 45. Produksi dan Luas Areal Teh Tahun 2011-2016 112
Gambar 46 Produksi dan populasi Daging Kambiang dan Domba tahun 2011-2016 116
Gambar 47. Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2011-2016. 118
Gambar 48 Suasana Rembug Tani di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan... 122
Gambar 49. Perkembangan Pendapatan petani Tahun 2011-2016 124
Gambar 50. Perkembangan PDB Sektor Pertanian Sempit dan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2011-2016 125
Gambar 51. Produksi rata-rata per responden pada tahun 2015 dan 2016 . 126
Gambar 52. Dampak Peningkatan Pendapatan Kelompok SOLID dibandingkan dengan tahun sebelumnya 127
Gambar 53 Target dan Realisasi IKM Kementerian Pertanian Tahun 2010-2016 150

Gambar 54. Tren Capaian Kinerja Nilai IKM Kementerian Pertanian 7 (tujuh) Tahun Terakhir 131
Gambar 55. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP..... 133
Gambar 56. Pemusnahan Bibit Jamur asal Malaysia yang Tidak Memenuhi Syarat Karantina 138
Gambar 57. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga..... 139
Gambar 58. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai RB Kementan tahun 2013- 2015 141
Gambar 59. Kinerja Penguatan Sistem Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 144
Gambar 60. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia..... 149
Gambar 61. Penyerahan Penghargaan Ombudsman oleh Ketua Ombudsman RI kepada Kepala Badan Karantina Pertanian 150

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah melaksanakan pembangunan tahun kedua dari tahap ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan sebelumnya, tahap ke-3 RPJMN (2015-2019) dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dimasa mendatang.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila kebutuhan

masyarakat yang paling mendasar ini belum terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti Kementerian Pertanian didalam menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 akan dititikberatkan pada 7 (Tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian antara lain: keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, masih banyak jaringan irigasi yang rusak, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. Sementara itu, pada aspek manajemen isu strategis yang dihadapi antara lain: pengurangan anggaran (*self blocking*) dan perubahan susunan organisasi

dan tata kerja di daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2016 yang mengamanatkan perampingan organisasi di daerah. Pengurangan APBN Kementerian Pertanian mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan di tahun 2016. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP 18/2016 mengakibatkan banyak terjadi pergantian pejabat dan petugas, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Permasalahan pada aspek manajemen ini telah menjadi perhatian dan telah pula dilakukan beberapa upaya tindak lanjut.

Kementerian Pertanian di tahun 2016 telah menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan, maupun target yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Terjaminnya distribusi pangan; (3) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; dan (4) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; (5) Stabilnya produksi cabai dan bawang merah; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya sebagai kegiatan terobosan. Selama tahun 2015-2016, berbagai kegiatan terobosan tersebut meliputi: (1) bantuan alat mesin pertanian sebanyak lebih dari 180 ribu unit (antara lain: traktor, *rice transplanter, combine harvester*), (2) rehab jaringan irigasi tersier seluas 3,05 juta ha, (3) pengembangan sumber-sumber air seperti embung, *long storage*, dan dam parit sebanyak 3.771 unit, (4) penggunaan benih unggul padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah pada areal seluas 7 juta ha, (5) perluasan luas tanam dan luas panen padi melalui peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 1,73 (naik 2,95%), (6) perluasan luas tanam dan luas panen jagung melalui penanaman jagung di lahan sawit (terintegrasi) seluas 233 ribu ha (naik 100%), (7) pengembangan lahan rawa lebak seluas 367 ribu ha, (8) pelaksanaan sapi indukan wajib bunting (SIWAB) yang telah memperoleh 1,5 juta kelahiran anak sapi, (9) asuransi pertanian untuk areal padi seluas 674.650 ha, (10) pengembangan lumbung pangan di 5 provinsi, (11) pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.218 unit, dan (12) pengendalian impor, terutama komoditas padi, jagung, kedelai, cabai,

bawang merah, dan daging sapi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2016 sebesar 79,1 juta ton GKG atau naik 4,97% dari tahun 2015 sebesar 75,4 juta ton, (2) produksi jagung tahun 2016 sebesar 23,2 juta ton atau naik 18,10% dari tahun 2015 sebesar 19,6 juta ton, (3) produksi bawang merah sebesar 1,3 juta ton atau naik 5,74% dari tahun 2015 sebesar 1,2 juta ton, (4) produksi aneka cabai sebesar 2,1 juta ton atau naik 9,95% dari tahun 2015 sebesar 1,9 juta ton, (5) impor jagung turun sebanyak 66,6% (3,22 juta ton tahun 2015 menjadi 1,07 juta ton tahun 2016), (6) impor bawang merah turun sebanyak 93,2% (17,43 juta ton tahun 2015 menjadi 1,19 juta ton tahun 2016), dan (7) impor beras medium turun 100% (1,15 juta ton tahun 2015 menjadi nol di tahun 2016), (8) Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,06% (101,59 tahun 2015 menjadi 101,66 tahun 2016), (8) Nilai Tukar Usaha Pertanian naik 2,31% (107,45 tahun 2015 menjadi 109,93 tahun 2016), dan (9) jumlah penduduk miskin turun 1,51% (17,94 juta jiwa tahun 2015 menjadi 17,67 juta jiwa tahun 2016).

Di samping capaian produksi dan capaian atas beberapa indikator makro, Kementerian Pertanian telah memperoleh beberapa penghargaan, seperti: (1) hasil penilaian Global Food Security Index menyatakan bahwa peringkat Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 74 menjadi peringkat 71. (2) mayoritas petani menyatakan puas atas kinerja Kementerian Pertanian. Survei yang dilakukan oleh INDEF melaporkan 76.8% petani menyatakan puas; sementara oleh CSIS melaporkan 72.9% petani menyatakan puas. (3) penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (4) penghargaan dari OMBUDSMAN untuk Predikat Kepatuhan yang Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik, (5) Anugerah Parahita Ekapraya Award kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan kategori Mentor ini merupakan kategori tertinggi.

Meskipun, secara umum kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2016, namun diakui masih ada target-target yang belum dapat dicapai. Untuk ini, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada

lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BULOG, Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten /kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk itu, kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat lah diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2016.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 Direktorat Jenderal, 4 Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 Staf Ahli Menteri. Pada Perpres No 45/2015, jabatan Wakil Menteri Pertanian dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditiadakan.

Perpres No 45/2015 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

(1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaam prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;

(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

(3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;

(4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

(5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;

(6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;

(7) Pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;

(8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

(9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

(10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

(11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

(1) Sekretariat Jenderal;

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura;

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan;

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(7) Inspektorat Jenderal;

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;

(10) Badan Ketahanan Pangan;

(11) Badan Karantina Pertanian;

(12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri

(13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;

(14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;

(15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;

(16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;

(17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

(18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;

(19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian;

(20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

(2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

(3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

(4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

(5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.

(6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

(7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.

(9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

(10) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

(11) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

(12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang bio industri;

b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;

c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi pertanian;

d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang lingkungan pertanian; dan

e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang infrastruktur pertanian.

(13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

(14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

(15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

1.4 Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2016 pada 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 19.789 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 464 orang, golongan II sebanyak 4.915 orang, golongan III sebanyak 11.860 orang, dan golongan IV sebanyak 2.550 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 671 orang, S2 sebanyak 3.837 orang, S1/D4 sebanyak 6.230 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.559 orang, SLTA sebanyak 6.359 orang, SLTP sebanyak 513 orang, dan SD sebanyak 620 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah pegawai 20.635 orang, maka jumlah pegawai tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 846 orang atau 4,09%. Penurunan jumlah pegawai pada tahun 2016 disebabkan karena adanya pegawai pensiun. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2016 dapat dilihat pada **Lampiran 2**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2015-2019. Untuk melanjutkan kontribusinya dalam membangun sektor pertanian yang berperan strategis dalam perekonomian nasional, Kementerian Pertanian menyusun Renstra Kementan 2015-2019. Renstra yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015-2019) Bidang Pangan dan Pertanian dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, kedepan Renstra Kementan masih akan fokus pada meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya adalah pada meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Sementara itu, sejalan dengan SIPP 2015-2045, pembangunan pada sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*). Dengan perubahan paradigma tersebut, sektor pertanian tidak lagi hanya diposisikan sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki fungsi strategis lainnya dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan fokus kedua RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, yang dapat meningkatkan pangsa ekspor dan

membendung masuknya komoditas dari negara-negara lain sehingga dapat berkontribusi memperkuat ekonomi nasional. Dalam Renstra, keselarasan dengan kedua hal tersebut secara eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun (2015-2019). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja di jajaran birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Pada Gambar 1 dan Tabel 1 disajikan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

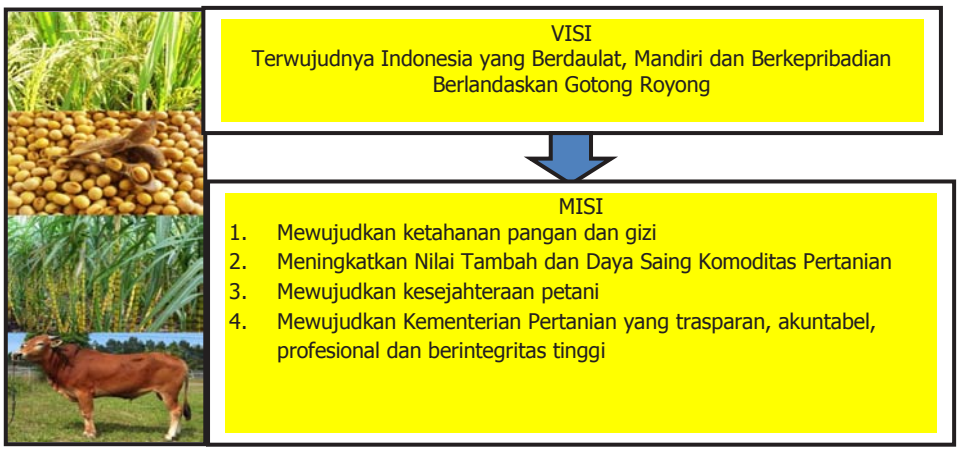

Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

VISI & MISI			
TUJUAN		**SASARAN STRATEGIS**	
1	Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula	1	Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
2	Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan	2	Terjaminnya distribusi pangan
		3	Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi
3	Bergesernya budaya konsumsi pangan	4	Meningkatnya konsumsi pangan lokal
4	Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga	5	Stabilnya produksi cabai dan bawang merah
5	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi	6	Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
6	Mendorong majunya agrobioindustri	7	Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi
7	Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani	8	Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani
		9	Meningkatnya pendapatan keluarga petani
8	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	10	Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian
		11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang meliputi:

1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,
2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,
3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit,
4) penguatan kelembagaan petani,
5) pengembangan dan penguatan pembiayaan,
6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta
7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain ketujuh strategi utama tersebut di atas, Kementerian Pertanian juga menyusun dan melaksanakan 9 (sembilan) strategi pendukungnya, yaitu:

1) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,

2) peningkatan dukungan perkarantinaan,
3) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi,
4) pelayanan informasi publik,
5) pengelolaan regulasi,
6) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi,
7) pengelolaan perencanaan,
8) penataan dan penguatan organisasi, dan
9) pengelolaan sistem pengawasan.

Seluruh strategi, baik strategi utama maupun pendukungnya, dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan indikator kinerja beserta target kinerjanya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.

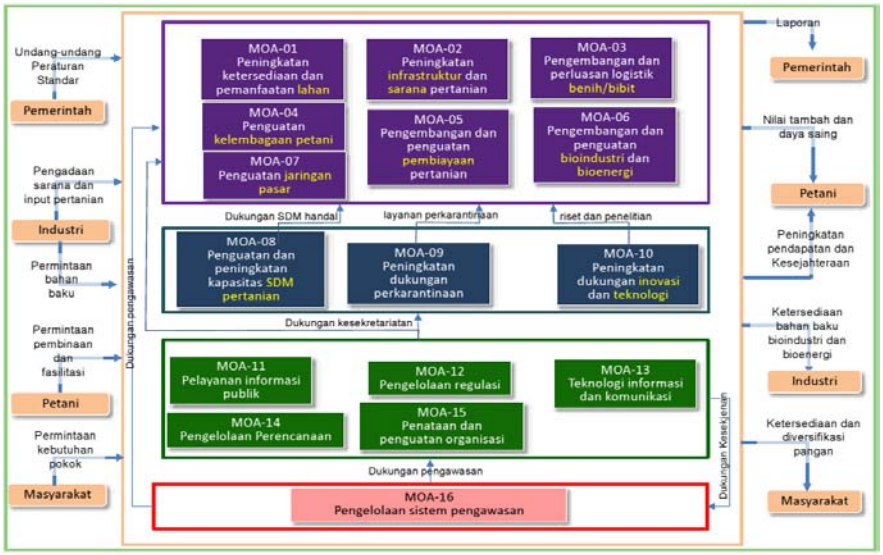

Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator kinerja dari dilaksanakannya strategi utama dan pendukung di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, indikator makro dan indikator kinerja. Indikator makro didasarkan pada sasaran kinerja makro dari pembangunan pertanian, sementara indikator kinerja didasarkan atas sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian. Target indikator makro yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

1) Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tumbuh rata-rata per tahun di atas 7%, sedangkan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) tumbuh di atas 3,8%;

2) Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) turun dari 35.359 ribu orang (2015) menjadi 34.686 di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan -0,61%);

3) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor pertanian naik dari Rp10.023,1 Milyar (2015) menjadi Rp12.066,4 Milyar di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 3,2-6,2%), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik dari US$1.438,2 Juta (2015) menjadi US$1.710,1 Juta di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 2,9-5,9%);

4) Neraca perdagangan tumbuh rata-rata per tahun 12,7%, terdiri atas tanaman pangan 4,8%, hortikultura 2,5%, perkebunan 10,4%, peternakan 0,9%, dan pertanian 12,7%;

5) Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada kisaran 101,21 di tahun 2015 sampai 104,56 di tahun 2019;

6) Pertumbuhan PDB per kapita naik dari Rp36.491,22 ribu (2015) menjadi Rp46.133,56 ribu di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 6,29%) dan PDB pertanian sempit per tenaga kerja (TK) pertanian sempit naik dari Rp10.868,43 ribu (2015) menjadi Rp13.623,30 ribu di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 5,77%).

Indikator kinerja beserta targetnya yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019

INDIKATOR		SATUAN	baseline 2014	baseline 2015	2016	2017	2018	2019	(%/thn)	PIC
S.1.1.	**Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula**									
1	produksi padi	juta ton	70,84	74,99	76,22	78,13	80,08	82,07	3,00	DJTP
2	produksi jagung	juta ton	19,00	19,83	21,35	22,36	23,48	24,70	5,39	DJTP
3	produksi kedelai	juta ton	0,95	0,98	1,50	1,88	2,34	3,00	26,84	DJTP
4	produksi tebu	juta ton GKP	2,58	2,62	2,80	2,95	3,30	3,80	8,17	DJBUN
5	produksi Daging Sapi dan Kerbau	ribu ton karkas	533	556	589	640	695	755,2	7,23	DJBUN
S.2.2.	**Terjaminnya distribusi pangan**									
6	Produksi padi per kapita wilayah Sumatera	Kg/Tahun	305,90	331,21	324,81	328,24	331,70	335,15	1,90	DJTP
7	rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa	Kg/Tahun	255,54	264,43	265,71	269,70	273,74	277,81	1,69	DJTP
8	rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan	Kg/Tahun	322,49	326,96	347,37	349,79	352,21	354,61	1,94	DJTP
9	rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi	Kg/Tahun	460,89	466,79	476,71	482,55	488,45	494,36	1,41	DJTP
10	rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara	Kg/Tahun	273,24	292,37	291,47	294,94	298,45	301,97	2,05	DJTP
11	rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua	Kg/Tahun	59,20	61,65	63,37	63,78	64,19	64,59	1,77	DJTP
12	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	Rp/kg	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP		BKP
S.2.3.	**Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi**									
13	Konsumsi Kalori perkapita	Kkal/kap/hari	1.949	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,98	BKP
14	Konsumsi pangan hewani perkapita	Kkal/kap/hari	183	191	200	208	217	225	4,22	BKP
15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	81,8	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	2,5	BKP
16	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	%/thn	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	BKP
S.3.4.	**Meningkatnya konsumsi pangan lokal**									
17	rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras	%	5,38	5,54	5,70	5,87	6,05	6,23		BKP
S.4.5.	**Stabilnya produksi cabe dan bawang merah**									
18	Produksi cabai besar	ribu ton	1.041	1.082	1.209	1.246	1.283	1.322	4,95	DJHORTI
19	Produksi cabai rawit	ribu ton	735	751	890	917	944	973	5,95	DJHORTI
20	Produks Bawang Merah	ribu ton	1.061	1.125	1.291	1.330	1.370	1.411	5,96	DJHORTI
21	koefisien variasi produksi cabai besar	cv %	13	13	≤ 12	≤ 11	≤ 10	≤ 10		DJHORTI
22	koefisien variasi produksi cabai rawit	cv %	18	18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	≤ 15		DJHORTI
23	koefisien variasi produksi bawang merah	cv %	26	22	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15		DJHORTI
24	Koefisien variasi harga produk cabai	cv %	30	29	≤ 28	≤ 27	≤ 26	≤ 25		BKP
25	Koefisien variasi harga produk bawang merah	cv %	20	19	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15		BKP
S.5.6.	**Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing**									
26	produksi mangga	ribu ton	2.236	2.285	2.340	2.399	2.460	2.519	2,41	DJHORTI
27	produksi nenas	ribu ton	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	1,98	DJHORTI
28	produksi manggis	ribu ton	142	144	147	150	152	155	1,77	DJHORTI
29	produksi salak	ribu ton	1.028	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,20	DJHORTI
30	produksi kentang	ribu ton	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,00	DJHORTI
31	produksi jeruk siam/keprok	ribu ton	1.587	1.640	2.005	2.050	2.100	2.152	6,55	DJHORTI

INDIKATOR		SATUAN	baseline 2014	baseline 2015	2016	2017	2018	2019	(%/thn)	PIC
32	produksi karet	karet kering ribu ton	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,86	DJBUN
33	produksi kopi	kopi berasan ribu ton	685	725	738	751	765	778	2,59	DJBUN
34	produksi kakao	biji kering ribu ton	709	773	831	872	916	961	6,28	DJBUN
35	produksi lada	lada kering ribu ton	92	93	94	95	96	97	1,06	DJBUN
36	produksi pala	biji kering ribu ton	26	28	29	30	32	33	4,90	DJBUN
37	produksi cengkeh	ribu ton	111	113	115	117	119	121	1,74	DJBUN
38	produksi kelapa	ribu ton	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,91	DJBUN
39	produksi teh	ribu ton	144	160	160	161	162	163	2,59	DJBUN
40	Produksi susu	ribu ton	801	800	851	911	981	1.064	5,88	DJPKH
41	Produksi daging kambing dan domba	ribu ton	109	115	117	120	122	125	2,79	DJPKH
42	Produksi daging babi	ribu ton	302	335	355	376	398	422	6,90	DJPKH
43	Rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis	%	80,3	80,6	81,1	80,6	80,9	80,6		ALL
44	Penurunan volume impor produk pertanian strategis	%/thn	4,3	-4,9	-9,2	-18,9	-9,5	-2,9		ALL
S.6.7.	**Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi**									
45	produksi kelapa sawit	CPO ribu ton	29.344	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,44	
46	produksi komoditas ubi kayu	ribu ton	26,4	26,5	27,1	27,6	28,2	28,8	1,76	DJTP
S.7.8.	**Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani**									
47	jumlah petani yang meningkat kapasitasnya melalui pelatihan	orang	4.062	10.680	14.420	17.748	18.103	18.465	45,00	SDM
48	jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	unit	19.308	17.808	21.220	32.250	32.500	32.700	12,95	SDM
S.7.9.	**Meningkatnya pendapatan keluarga petani**									
49	PDB pertanian sempit/jumlah TK pertanian	Rp juta	24,1	25,3	26,0	27,0	28,0	29,0	3,77	SDM
50	Persentase petani miskin	%	13,8	13,3	12,8	12,4	11,9	11,5	-3,58	SDM
S.8.10.	**Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian**									
51	Nilai reformasi birokrasi	poin	65,02	70	73	74	75	76		SEKJEN
52	Nilai layanan perkarantinaan	IKM	82,99	83,62	≥ 78	≥ 79	≥ 80	≥ 81		Barantan
53	Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna	paket teknologi	80	96	165	231	254	280		Litbang
S.8.11.	**Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian**									
54	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		ITJEN

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Indikator sebagaimana tabel 2 merupakan indikator yang tertera di Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, dengan target sebanyak 54

indikator. Indikator-indikator tersebut tidak semuanya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) karena bisa menjadi target kinerja program atau kegiatan. Sebagai tindak lanjut, maka telah ditetapkan permentan No. 68/2016, tentang IKU dengan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja. Permentan IKU membatasi indikator yang ada di Renstra untuk level Kementerian.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Kementan 2015-2019 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kementerian Pertanian. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan Permen PAN&RB No 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2016 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar kinerja Kementerian Pertanian. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2016, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan satu kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2016 pada bulan Desember Tahun 2016 dikarenakan: 1) terjadi revisi Renstra Kementan 2015-2019 yang berimplikasi pada perubahan SS, IKSS, dan Target Kinerja pada PK Menteri Pertanian, serta 2) terjadi penghematan anggaran pada pertengahan tahun anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian mengalami penyesuaian.

Revisi PK di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2016 yang telah direvisi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi 2. Produksi Jagung 3. Produksi Kedelai 4. Produksi Tebu 5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	76,22 Juta Ton 21,35 Juta Ton 1,50 Juta Ton 2,80 Juta Ton GKP 589 Ribu Ton Karkas
2.	Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa 2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	364 kg/Tahun ≥ HPP
3.	Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan	86,2
4.	Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5,70%
5.	Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar 2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit 3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 15 cv% ≤ 17 cv% ≤ 20 cv%
6.	Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga 2. Produksi Nanas 3. Produksi Manggis 4. Produksi Salak 5. Produksi Kentang 6. Produksi Karet 7. Produksi Kopi 8. Produksi Kakao 9. Produksi Kelapa 10. Produksi Teh 11. Produksi Daging Kambing dan Domba	2.340 Ribu Ton 1.926 Ribu Ton 147 Ribu Ton 1.080 Ribu Ton 1.348 Ribu Ton 3.438 Rb Ton Kret Kering 738 Rb Ton Kopi Berasan 831 Ribu Ton Biji Kering 3.355 Ribu Ton 160 Ribu Ton 117 Ribu Ton
7.	Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	1. Produksi Kelapa Sawit	30,845 Ribu Ton CPO
8.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	1. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	22
9.	Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	1. PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian	Rp. 26,0 Juta
10.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Layanan Kelembagaan Pertanian	1. Nilai IKM Kementerian Pertanian	81
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	1. Nilai Reformasi Birokrasi	73

Sumber : Kementerian Pertanian, 2016

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian tahun 2016 tersebut di atas dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Eselon I teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian. Kesebelas program tersebut adalah:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
9) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian
10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon-I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon-I dalam menjalankan program terkait adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya, Eselon-II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon-II atau unit kerja mandiri diperbolehkan untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1 Kriteria Pengukuran Keberhasilan

Untuk mengukur capaian kinerja, Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring,* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2016

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2016 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja yang terakhir, yaitu yang direvisi pada bulan Desember 2016.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan tidak hanya dengan menganalisis realisasi terhadap target tahun 2016 saja, tetapi juga terhadap capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dan target jangka menengah. Selain itu, pada indikator yang belum mencapai target dicarikan akar permasalahan, solusi rekomendasi, dan rencana perbaikan di tahun 2017. Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2016 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1. Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi	76,22 Juta Ton	79,14 Juta Ton*	103,83	Sangat Berhasil
	2. Produksi Jagung	21,35 Juta Ton	23,16 Juta Ton*	108,48	Sangat Berhasil
	3. Produksi Kedelai	1,50 Juta Ton	0,885 Juta Ton*	59	Kurang berhasil
	4. Produksi Tebu	2,80 Juta Ton GKP	2,22 Juta Ton**	79,29	Cukup berhasil
	5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	589 Ribu Ton Karkas	561 Ribu Ton Karkas***	95,25	Berhasil
2. Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa	364	347	92,58	Berhasil
	2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	≥ HPP	> HPP	127,95%	Sangat Berhasil
3.Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan	86,2	86	99,77	Berhasil
4.Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5,70%	6,3	110,53	Sangat Berhasil
5.Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar	≤ 15	14,85	101	Sangat Berhasil
	2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit	≤ 17	19,68	84,23	Berhasil
	3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 20	19,79	105	Sangat Berhasil
6.Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga	2.340 Ribu Ton	2.180 Ribu Ton****	93,16	Berhasil
	2. Produksi Nanas	1.926 Ribu Ton	1.795 ribu ton****	93,2	Berhasil
	3. Produksi Manggis	147 Ribu Ton	225.746 Ribu Ton****	153,57	Sangat Berhasil
	4. Produksi Salak	1.080 Ribu Ton	986,5 Ribu Ton****	91,34	Berhasil
	5. Produksi Kentang	1.348 Ribu Ton	1.289 Ribu Ton****	95,62	Berhasil
	6. Produksi Karet	3.438 Karet Kering Ribu Ton	3.158 Karet Kering Ribu Ton**	91,85	Berhasil
	7. Produksi Kopi	738 Kopi Berasan Ribu Ton	639,3 kopi berasan Ribu Ton**	86,58	Berhasil
	8. Produksi Kakao	831 Biji Kering Ribu Ton	657 Biji Kering Ribu Ton**	78,33	Cukup Berhasil
	9. Produksi Kelapa	3.355 Ribu Ton	2.890 Ribu Ton**	86,27	Berhasil
	10. Produksi Teh	160 Ribu Ton	144 Ribu Ton**	90	Berhasil
	11. Produksi Daging Kambing dan Domba	117 Ribu Ton	114,9 Ribu Ton***	98,2	Berhasil
7. Tersedia Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	1. Produksi Kelapa Sawit	30,845 CPO Ribu Ton	32.524 CPO Ribu Ton**	105,44	Sangat Berhasil
8.Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	1. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	22%	25,60%	116,36	Sangat Berhasil
9.Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	1. PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian	Rp. 26,0 Juta	Rp 26,66 Juta	102,54	Sangat Berhasil
10. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian	1. Nilai IKM Kementerian Pertanian	81 IKM	82,72	102,12	Sangat Berhasil
11. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	1. Nilai Reformasi Birokrasi	73 Poin	*****		

Sumber : PK dan hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

* Pra Angka Ramalan (Aram) II BPS, 2016

** Angka sementara Ditjen Perkebunan, 2016

*** Angka sementara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016

**** Angka Prognosa Ditjen Hortikultura, 2016. Angka Prognosa merupakan Nerupakan angka realisasi produksi yang telah masuk berdasrkan laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura sd.bulan Oktober 2016 dan estimasi laporan yang belum masuk sd. Bulan Desember 2016

***** Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB

Sasaran Strategis 1 (SS 1)
MENINGKATNYA PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI, GULA TEBU DAN DAGING SAPI DAN KERBAU

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional telah menetapkan 5 (lima) komoditas pangan pokok, yaitu padi, jagung, kedelai, gula tebu, dan daging sapi dan kerbau.

Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula tebu, dan daging sapi dan kerbau sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Gula Tebu, dan Daging Sapi dan Kerbau.

Sasaran strategis nomor pertama ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) produksi padi, (2) produksi jagung, (3) produksi kedelai, (4) produksi gula tebu, dan (5) produksi daging sapi dan kerbau.

SS 1. IKU 1 **Produksi Padi**	Target **76,22 juta ton GKG** Realisasi **79,14 juta ton GKG**	% Capaian **103,83%** **Sangat Berhasil**

Keterangan: GKG = Gabah Kering Giling

Produksi padi pada tahun 2016 sebesar 79,14 juta ton GKG atau sebesar 103,83% dari target sebesar 76,22 juta ton GKG, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Capaian kinerja ini merupakan capaian tertinggi selama 6 (enam) tahun terakhir. Pencapaian kinerja produksi padi tahun 2011 hingga tahun 2016 disajikan pada Gambar 3.

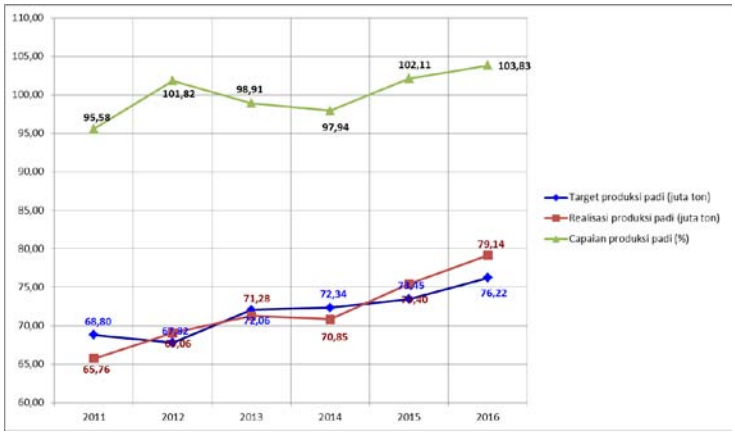

Gambar 3. Capaian Kinerja Produksi Padi Tahun 2011-2016

Capaian kinerja produksi padi tahun 2016 sebesar 103,83% lebih baik bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 102,11%, dan tahun 2011 sebesar 95,58%. Tren peningkatan capaian kinerja produksi padi selama 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa Kementerian Pertanian secara konsisten terus merealisasikan target yang diamanatkan yaitu meningkatkan produksi padi dalam upaya menyediakan bahan pangan pokok beras bagi seluruh penduduk Indonesia.

Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Gambar 4 memperlihatkan bahwa luas panen dan produktivitas juga menunjukkan tren meningkat seiring dengan meningkatnya produksi padi.

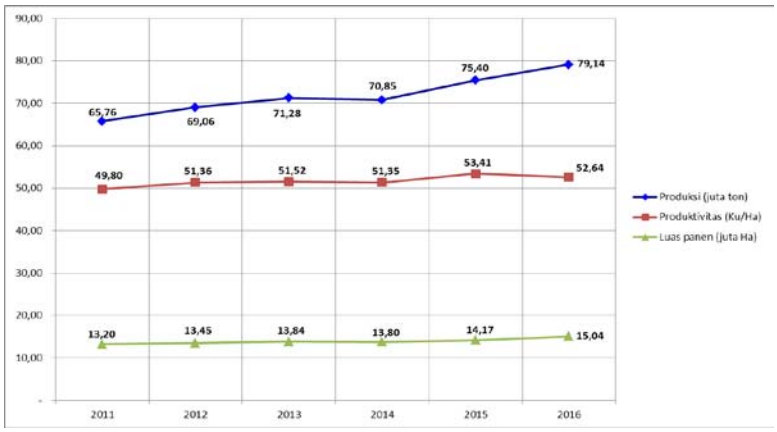

Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2011-2016

Meningkatnya luas panen disebabkan terutama oleh meningkatnya luas tambah tanam padi. Membanding data tahun 2015-2016, Tabel 5 memperlihatkan terjadi penambahan luas tambah tanam padi sebesar 1 juta ha di tahun 2016 dibanding di tahun 2015.

Tabel 5. Peningkatan Luas tambah Tanam Padi Tahun 2015-2016 (dalam Hektar)

No.	Bulan	2014/2015	2015/2016
1	Oktober	663.505	485.320
2	November	1.359.903	1.032.345
3	Desember	2.513.458	2.571.467
4	Januari	1.840.716	2.147.212
5	Februari	863.532	1.115.373
6	Maret	1.150.323	1.406.875
7	April	1.230.357	1.246.109
8	Mei	1.614.930	1.478.938
9	Juni	1.212.331	1.018.763
10	Juli	644.091	869.533
11	Agustus	566.782	918.130
12	September	799.195	1.193.697
	Jumlah	14.459.123	15.483.763

Sumber: Pusdatin Kementan, 2016

Selain kenaikan luas panen, kenaikan produksi padi disumbang oleh kenaikan produktivitas di sejumlah wilayah, terutama sentra produksi padi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di samping mengandalkan sentra produksi padi di Pulau Jawa, Menteri Pertanian pun mendorong wilayah lain di luar Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti Pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.

Dibandingkan target produksi padi tahun 2019 sebesar 82,1 juta ton GKG, capaian produksi padi di tahun 2016 sudah mencapai 96,4%. Dengan capaian produksi padi tahun 2016 dapat melebihi target, maka optimis bahwa target produksi padi tahun 2019 akan dapat terlampaui. Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2016 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja produksi padi tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi padi, salah satunya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Menteri Pertanian Melakukan Dialog dengan Petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur

Berbagai kebijakan di tahun 2015 dan dilanjutkan di tahun 2016 telah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi. Kebijakan pengadaan dengan pola penunjukan langsung telah berdampak pada penyaluran benih dan pupuk dapat tepat waktu/musim. Kebijakan bantuan benih tidak di lokasi existing telah berdampak pada luas tambah tanam. Perbaikan jaringan irigasi pertanian telah berhasil meningkatkan Indek Pertanaman (IP). Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*). Penggunaan pola tanam jajar legowo dan benih unggul juga telah meningkatkan produktivitas padi.

Satu hal yang perlu disampaikan bahwa meskipun tahun 2015 terjadi *El Nino* yang mengakibatkan musim kemarau yang lebih panjang dan tahun 2016 terjadi *La Nina* yang mengakibatkan musim hujan yang lebih panjang, namun produksi padi masih tetap dapat meningkat. Tabel 6 memperlihatkan bahwa peristiwa *El Nino* 2015 jauh lebih kuat

dibandingkan *El Nino* 1998, begitu pula peristiwa *La Nina* 2016 juga jauh lebih kuat dibandingkan *La Nina* 1999. Di tahun 1999, penduduk Indonesia berjumlah 204,78 juta jiwa, dan pada tahun tersebut dilakukan impor beras sebesar 5,04 juta ton. Tahun 2016, penduduk Indonesia meningkat menjadi 258,48 juta jiwa, dan tidak ada impor beras di tahun 2016.

Tabel 6. Dampak *El Nino* dan *La Nina* terhadap Impor Beras

Uraian	1997	1998	1999	2015	2016
Penduduk (Juta Jiwa)	198.68	201.54	204.78	255.44	258.48
Kejadian Elnino/Lanina	El-Nino	El-Nino	La-Nina	El-Nino	La-Nina
Kekuatan SST ANOM (°C)	2.67	2.53	(1.92)	2.95	(0.72)
Dampak Impor Beras (ton)	405,947	7,100,679	5,043,877	1,154,807	0

Sumber El-Nino/ La-Nina: 1997-2016: NCEP/NOAA, 2016, Prediksi 2016/2017: IRI For Climate and SocietySST ANOM: Sea Surface Temperatur Anomaly

Tabel 6 makin menunjukkan bahwa kinerja produksi padi tahun 2015-2016 merupakan capaian kinerja yang luar biasa. Capaian kinerja produksi padi ini dapat menjadi motivasi dan pendorong semangat bagi upaya peningkatan produksi padi di tahun-tahun ke depan. Apabila kita berkerja dengan benar dan baik, maka Indonesia benar tidak perlu melakukan impor beras atau dengan kata lain produksi padi dalam negeri telah mencukupi kebutuhan, bahkan Indonesia memiliki potensi untuk mengekspor beras.

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi tahun 2016, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Air

Kegiatan Pengembangan infrastruktur air meliputi pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, pembangunan embung, dam parit, long storage, irigasi perpipaan/perpompaan, dan irigasi rawa (Gambar 6.) Pada TA 2016 telah dialokasikan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier seluas 449.640 Ha dan terealisasi seluas 442.015 Ha (98,30%); embung, dam parit dan *long storage* sebanyak 1909 unit dan terealisasi 1793 unit (93,92%), Irigasi

perpipaan/perpompaan sebanyak 1544 unit dan terealisasi 1537 unit; dan irigasi rawa seluas 80.000 yang terealisasi 60.209 Ha (75,26%).

Mentan mengunjungi Embung di Kab Boyolali

Pompanisasi untuk mengairi sawah 11.000 Ha di Jawa Barat

DAM Parit di Kabupaten Bima

Long Storage di Kab.Indramayu

Gambar 6. Pengembangan Infrastruktur Air (Embung, Pompa, DAM Parit, dan *Long Storage*)

2. Perluasan Sawah

Perluasan areal sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Pada TA 2016 telah dialokasikan kegiatan perluasan sawah dengan target awal seluas 200.600 Ha (Gambar 7.) Akan tetapi dengan adanya penghematan, target berkurang menjadi 132.155 Ha dan terealisasi seluas 129.096 Ha (97,69%).

Gambar 7. Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Dombeyoha Kecamatan Ladongi, Kolaka Sulawesi Tenggara

3. Penerapan Budidaya Padi

Di tahun 2016, kegiatan penerapan budidaya padi dialokasikan pada areal seluas 2.202.054 Ha dengan anggaran sebesar Rp 905.366.017.542,-. Fasilitasi bantuan kegiatan yang diberikan berupa sarana produksi paket lengkap meliputi sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), biaya tanam jajar legowo, dan pertemuan kelompok. Sampai dengan akhir tahun, realisasi tanam mencapai 2.154.673 Ha (97,85%) dan realisasi anggaran sebesar Rp 876.101.316.306 (96,77%).

4. Bantuan benih

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Untuk mendorong penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, maka dilakukan perbanyakan benih dari varietas unggul yang telah dilepas, baik benih sumber maupun Benih Sebar (BR), pemberian bantuan benih padi inbrida, pengembangan dan penguatan desa mandiri benih, serta penyediaan fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi, CBN). Kegiatan mandiri Benih dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan penangkar benih di

pedesaan, sehingga dapat mengatasi kebutuhan benih yang berkualitas dan tepat waktu di lokasi.

a. Perbanyakan benih sumber padi terealisasi 196 ha atau 85% dari target 231 ha.

b. Realisasi penyaluran bantuan benih padi inbrida sebanyak 1324 Ton atau 70% dari target 1881 Ton, dan realisasi anggaran Rp 612.000.500,- dari pagu sebesar Rp 18.954.447.000,-. Realisasi kegiatan ini sangat kecil karena terdapat tunda bayar di tahun 2016 sebesar Rp 10.840.136.875,-.

c. Kegiatan pengembangan desa mandiri benih telah dilaksanakan di lokasi baru sebanyak 119 unit/desa atau 97,5% dari target 122 unit/desa dengan luas areal 1220 Ha (@ 10 Ha per unit) dan pagu anggaran Rp 22.411.950.000,- Selain itu, sebagai lanjutan kegiatan tahun 2015, juga dilakukan penguatan desa mandiri benih seluas 6.488 ha atau 87% dari target seluas 7.434 Ha.

d. Realisasi penyaluran benih bersubsidi terdiri dari benih padi inbrida sebanyak 42.718 ton atau 43,81% dari target 97.500 ton dan padi hibrida sebanyak 719 ton atau 31,99% dari target 2.250 ton.

5. Bantuan Pupuk

Bantuan pupuk meliputi bantuan pupuk bersubsidi dan pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ini adalah unit bangunan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik). Pada tahun 2016 telah dialokasikan pembangunan UPPO sebanyak 575 unit dengan realisasi sebanyak 575 unit (100%). Kontribusi kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik *in situ* oleh dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat. Penggunaan pupuk organik dimaksudkan untuk memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

6. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Bantuan alat dan mesin pertanian terdiri dari pra panen dan pasca panen (Gambar 8). Total bantuan alsintan tahun 2016 adalah sejumlah

751.602 unit dan terealisasi sejumlah 751.602 unit (100%), meliputi: traktor roda 2 sejumlah 31.374 unit, traktor roda 4 sejumlah 31.734 unit, pompa air sejumlah 16.464 unit, *cultivator* sejumlah 228 unit, , *Excavator* 200 unit, *Rice Transplanter* sejumlah 5.854 Unit, *nursery tray* sejumlah 623.100 unit. Untuk alsintan pasca panen sebanyak 12.893 unit, mencakup: *power threser*, *combine harvester kecil*, *combine harvester sedang*, *combine harvester besar*, dan *vertical dryer* beserta bangunan.

Gambar 8.Menteri Pertanian Melakukan Panen Padi Menggunakan *Combine Harvester* dan Bantuan Alsintan berupa *Rice Transplanter*

7. Pengendalian OPT dan DPI

a. Dalam rangka pengamanan produksi padi dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Realisasi kegiatan mencapai 13.475 Ha atau 96,94% dari target 13.900 Ha di 33 propinsi, dan realisasi anggaran Rp 21.591.472.000 atau 87,3% dari pagu Rp 24.733.127.000.

b. Dalam rangka mengurangi risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), dilaksanakan kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) dengan target seluas 320 ha dengan alokasi anggaran Rp1.402.602.000,-. Realisasi kegiatan mencapai areal seluas 290 Ha (90,63%), dan realisasi anggaran Rp1.023.090.000,- (72,94%). Kegiatan PPDPI ini mampu mengamankan 75% produksi tanaman padi.

c. Dalam upaya menekan populasi OPT sehingga serangan OPT tidak meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT padi. Di tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT sebanyak 433 kali atau 74,53% dari target 581 kali dan realisasi anggaran Rp10.211.719.000 atau 65,95% dari pagu Rp15.485.142.000,-. Gerakan pengendalian OPT ini dapat mengamankan produksi pertanaman padi seluas 16.960 ha.

d. Kegiatan penelitian dan pengembangan telah berhasil membangun model peramalan OPT sebanyak 10 model teknologi padi.

8. Inovasi dan Teknologi

Dalam pengembangan inovasi dan teknologi padi, Kementerian Pertanian telah melepas 6 Varietas Unggul Baru (VUB) yang sesuai untuk padi sawah dan padi gogo yaitu VUB Padi Inpari 42 Agritan GS, VUB Padi Inpari 43 Agritan GSR, VUB Padi Inpari 44 Agritan, VUB Padi Inpari 12 Agritan, VUB Padi Inpago IPB 9G, dan VUB Padi Unsoed Parimas (Gambar 9).

VUB Inpari 42 Agritan GSR

VUB Inpago IPB 9 G

VUB Inpago 12 Agritan

VUB Inpari 43 Agritan

Gambar 9. Varietas Unggul Baru (VUB) Komoditas Padi

Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan juga telah menghasilkan teknologi dan inovasi peningkatan produksi padi yaitu Teknologi Pengendalian Penyakit Tungro, Teknologi Jajar Legowo Super, Teknologi Pengelolaan Hara Fosfor Lahan Sawah Irigasi Penambahan

Pupuk Organik Dan Pupuk Hayati Pada Pertanaman Padi Gogo, Pengendalian Hama Uret pada Padi Gogo dengan Teknik *Seed Treatment,* Teknologi mekanisasi Mesin Tanam Padi Jajar Legowo Tipe Mini Untuk Lahan Sempit Dan Berbukit, Mesin Pengolah Tanah Tipe Ampibi (*Rotavator*), serta Rekayasa dan Pengembangan Teknologi Penggilingan Padi Mobile untuk Peningkatan rendemen dari 56% menjadi 62% (Gambar 10.)

Mesin Pengolah Tanah Tipe Ampibi (Rotavator)

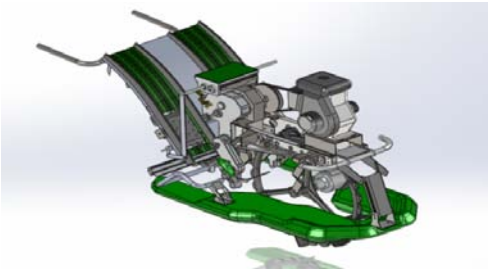

Konsep desain mesin tanam Jajar Legowo Mini

Gambar 10. Teknologi Mekanisasi Tanaman Padi yang Dikembangkan oleh Kementerian Pertanian

Disamping itu Balitbangtan melalui Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) juga telah menghasilkan 1443,73 ton benih sumber yang terdiri dari beberapa varietas dan kelas benih (NS, BS, BD, dan BP). Benih sumber beberapa varietas unggul padi tersebut telah disebarkan di beberapa daerah melalui BPTP.

Berbagai kegiatan pendukung pencapaian peningkatan produksi padi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2016 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Padi Tahun 2016

No	Kegiatan Padi	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Penerapan budidaya padi	2.202.054	Ha	2.154.673	97,85	905.366.017.542	876.101.316.306	96,77
2	Bantuan benih padi inbrida DIPA Pusat *	1.881	Ton	1.324	70,39	18.954.447.000	612.000.500	3,23
3	Perbanyakan benih sumber	231	Ha	196	84,85	Pagu dan realisasi tidak dapat dipisah antara padi,jagung,kedelai		
4	Penguatan desa mandiri benih	7.434	Ha	6.488	87,27	13.819.671.000	11.099.959.747	80,32
5	Pengembangan desa mandiri benih	1.190	Ha	922	77,48	22.411.950.000	15.964.031.985	71,23
6	Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) untuk padi	13.900	Ha	13.475	96,94	21.766.599.000	21.591.472.000	99,20
7	Penerapan penanganan dampak perubahan iklim	320	Ha	290	90,63	1.048.734.000	1.023.090.000	97,55
8	Gerakan pengendalian OPT (Reguler & TNI)	581	Kali	433	74,53	10.237.674.000	10.211.719.000	99,75
9	Sarana Pasca panen padi	12.893	Unit	12.746	98,86	1.430.950.996.000	1.277.868.916.795	89,30
10	Sarana Angkut	719	Unit	737	102,50	26.623.379.000	25.177.771.240	94,57
Program Ditjen PSP								
1	Pengembangan irigasi perpipaan	1.544	unit	1.537	99,55	127.072.000.000,00	115.007.250.000	90,51
2	Rehab Jaringan Irigasi Tersier	449.640	Ha	442.015	98,30	698.309.780.000,00	690.331.820.000	98,86
3	Pengembangan Irigasi Rawa	80.000	Ha	60.209	75,26	179.540.400.000,00	179.321.700.000	99,88
4	Pengembangan embung/dam parit/Long Storage	1.909	unit	1.793	93,92	193.880.000.000,00	177.116.000.000	91,35
5	Perluasan sawah	132.155	Ha	129.096	97,69	2.413.690.175.612,00	2.381.551.827.642	98,67
6	Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut	4.779,5	Ha	3.999	83,67	18.257.139.900,00	17.467.492.900	95,67
7	WISMP					11.000.000.000,00	7.014.682.821	63,77
8	Pra Sertifikasi Lahan Pertanian (Bun)	63.407	Bidang/ Persil	51.446	81,14	12.559.382.000,00	11.915.315.700	94,87
9	Alsintan	751.602	unit	751602	100,00	3.019.986.525.690,00	2.214.036.006.441	73,31
	Bantuan Traktor Roda 2	31.734	unit	31.734	100,00	787.363.673.500,00	534.673.361.450	67,91
	Bantuan Traktor Roda 4	2.250	unit	2.250	100,00	713.520.789.500,00	548.897.112.500	76,93
	Bantuan Pompa Air	16.464	unit	16.464	100,00	305.651.888.200,00	134.570.792.300	44,03
	Bantuan Rice Transplanter	5.854	unit	5.854	100,00	378.314.563.190,00	289.167.730.180	76,44
	Excavator	200	unit	200	100,00	146.206.406.400,00	93.525.846.600	63,97
	Handsprayer	72.000	unit	72.000	100,00	35.692.994.900,00	27.756.448.900	77,76
	Tray	623.100	unit	623.100	100,00	22.109.455.000,00	8.006.937.500	36,21
	Alsintan Dana TP	20.300	unit	20.300	100,00	631.126.755.000,00	577.437.777.011	91,49
10	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	575	unit	575	100,00	159.303.215.000,00	159.166.795.988	99,91
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Padi gogo, ampibi, hibrida, inbrida potensi hasil tinggi dan fungsional	6	varietas	6	100,00	4.719.550.000	4.717.525.400	99,96
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Padi	7	teknologi	5	71,43	3.172.150.000	3.170.160.576	99,94
3	Penyediaan Benih Sumber	1.098	ton	1.443,73	131,49	2.117.000.000	2.112.590.038	99,79
4	Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih	15	Provinsi	15	100,00	3.088.550.000	3.063.405.817	99,19
5	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Padi	4	Teknologi	3	75,00	1.480.000.000	1.411.376.512	95,36
	TOTAL					**9.299.355.335.744**	**8.207.054.227.408**	**88,25**

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, dan Badan Litbang Pertanian, 2016

Keterangan:

*) Realisasi bantuan benih padi inbrida pusat sangat kecil karena terdapat tunda bayar di tahun 2016 sebesar Rp 10.840.136.136.875,- yang akan dibayarkan di Tahun 2017.

SS 1. IKU 2 **Produksi Jagung**	Target **21,35 juta ton PK** Realisasi **23,16 juta ton PK**	% Capaian **108,48%** **Sangat Berhasil**

Keterangan: PK = Pipilan Kering

Produksi jagung pada tahun 2016 masuk kategori sangat berhasil karena mencapai 23,16 juta ton pipilan kering atau 108,48% dari target 21,35 juta ton pipilan kering. Capaian produksi jagung tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 19,61 juta ton pipilan kering atau 18,11%. Produksi jagung tahun 2016 juga merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 5 tahun terakhir (Gambar 11).

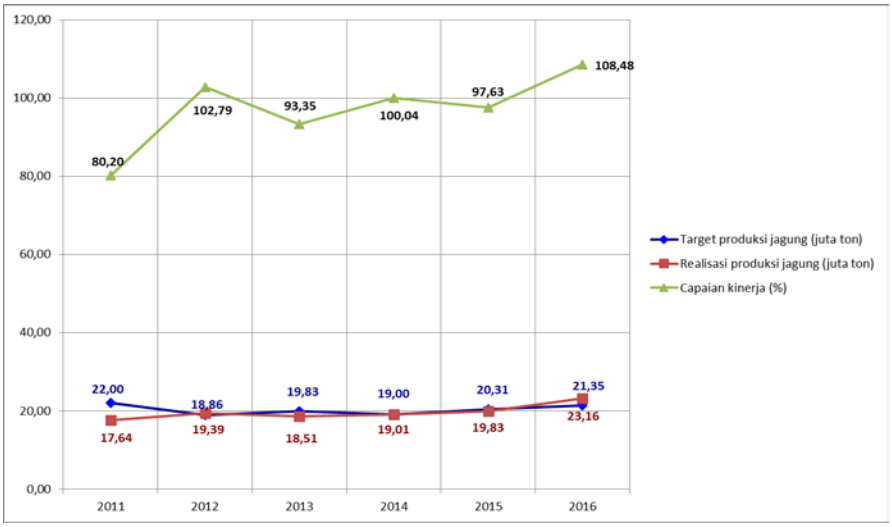

Gambar 11. Capaian Kinerja Produksi Jagung Tahun 2011-2016

Capaian produksi jagung dari tahun 2011 hingga tahun 2016 cenderung fluktuatif. Realisasi produksi jagung melebihi target di tahun 2012, 2014, dan 2016. Target tahun 2012 menurun dari 22 juta ton pipilan kering menjadi 18,86 juta ton pipilan kering diantaranya sebagai dampak dari *La Nina* yang terjadi tahun 2011 dan untuk antisipasi atas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi pangan

nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Secara umum, capaian target produksi jagung selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 17,64 juta ton pipilan kering pada tahun 2011 menjadi 21,35 juta ton pipilan kering pada tahun 2016.

Capaian produksi jagung tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen jagung dan produktivitas. Gambar 12. memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga menunjukkan tren meningkat selama 2011-2016. Pada 2015, perluasan areal lahan jagung dilakukan melalui pemanfaatan lahan Perhutani, sementara di tahun 2016 melalui integrasi lahan jagung dan lahan sawit.

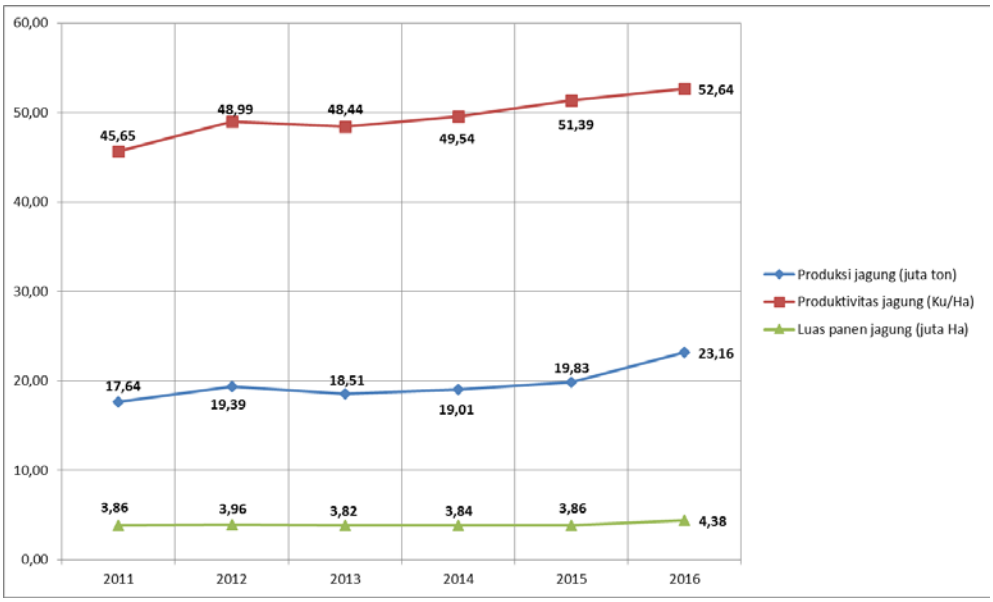

Gambar 12. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2011-2016

Integrasi perkebunan kelapa sawit dan jagung merupakan salah program unggulan Kementerian Pertanian dengan target terjadi tambahan luas tanam jagung sebesar 1 juta hektar hingga akhir tahun 2017. Di tahun 2016 telah dilaksanakan integrasi jagung dan sawit di lahan seluas 233.600 Ha (Gambar 13.). Selain kelapa sawit, integrasi juga dilakukan dengan tanaman karet.

Gambar 13. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Jagung di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Selain dikarenakan peningkatan luas panen, peningkatan produksi jagung juga dikarenakan peningkatan produktivitas. Produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 17,64 juta ton, kemudian naik sebesar 5,52 juta ton atau menjadi 23,16 juta ton di tahun 2016. Produktivitas jagung meningkat dari 45,65 Ku/Ha pada tahun 2011 menjadi 52,64 Ku/Ha pada tahun 2016. Peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan di tahun 2016 ini memberikan dampak menurunnya volume impor jagung sebesar 62,9% dibanding tahun 2015 (Pusdatin, 2016).

Dibandingkan target produksi jagung tahun 2019 sebesar 24,70 juta ton, maka realisasi produksi jagung pada tahun 2016 sebesar 23,16 juta ton baru mencapai 93,76%. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan produktivitas yang terus meningkat dan alternatif perluasan areal panen yang memungkinkan, maka pencapaian target 24,70 juta ton di tahun 2019 diharapkan akan tercapai.

Berbagai kegiatan pendukung pencapaian produksi jagung di tahun 2016, antara lain:

1. Pengembangan Jagung Hibrida

Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida tahun 2016 merupakan pemberian paket bantuan produksi kepada petani dalam bentuk sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida), dan biaya pertemuan kelompok. Capaian realisasi tanam penerapan budidaya jagung

mencapai areal seluas 1.529.674 Ha atau 92,38% dari target 1.655.555 Ha di, serta realisasi anggaran sebesar Rp 993.496.351.624 atau 96,84% dari pagu Rp 1.026.085.952.660,-.

2. Bantuan Benih

Di tahun 2016, kegiatan bantuan benih dilakukan melalui perbanyakan benih sumber jagung dan bantuan benih.

a. Perbanyakan benih sumber jagung terealisasi 36 ha atau 78,26% dari target 46 ha.

b. Bantuan benih jagung hibrida sebanyak 2.003 ton atau 93,17% dari kontrak sebanyak 2.150 ton.

3. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Pada tahun 2016, dialokasikan bantuan sarana pascapanen jagung sebanyak 6.800 unit dengan anggaran Rp 210.462.265.000,-. Realisasi penyaluran bantuan mencapai 6.468 unit (95,12%), terdiri dari *Corn Combine Harvester* 177 unit (100%), *Corn Sheller* 6.276 unit (96,17%) dan *vertical dryer* jagung 15 unit (100%).

4. Bantuan Pupuk

Di tahun 2016, alokasi bantuan pupuk sebanyak 122.384 ton dengan realisasi sebanyak 101.916 ton, sementara anggaran dialokasikan sebesar Rp 664.950.188.045 dengan realisasi sebesar Rp 538.096.432.157 atau 80,92%.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam pengembangan inovasi dan teknologi, Kementerian Pertanian telah merakit 5 Calon Varietas Unggul Baru (CVUB) Jagung Lahan Sub Optimal dan Optimal yaitu Jagung Hibrida HJ 28 Agritan, Jagung Hibrida HJ 29 Agritan, Jagung Hibrida HBSTK08, Jagung Hibrida HBSTK09, Jagung Hibrida HBSTK10.

Selain itu, juga telah dihasilkan teknologi mekanisasi yaitu Rekayasa dan Evaluasi Prototipe Mesin Panen Jagung Tipe Kombinasi (*Corn Combine Harvester*) yang dapat memanen jagung dan padi, merontok, membersihkan dan mengarungkan dalam satu kali proses sehingga dinamakan mesin pemanen multi komoditas *(Multi crops Combine*

Harvester) Mesin tersebut telah dilaunching oleh Menteri Pertanian pada tanggal 23 Juni 2016. (Gambar 14.)

Launching Corn Combine Harvester oleh Menteri Pertanian

Gambar 14. Teknologi Mekanisasi Tanaman Jagung yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian

Di tahun 2016, Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) telah menghasilkan 35,02 ton benih sumber jagung yang terdiri dari beberapa varietas dan kelas benih. Benih sumber tersebut telah disebar di beberapa daerah melalui BPTP.

Secara rinci kegiatan pendukung terkait pencapaian produksi jagung dapat dilihat pada Tabel. 8

Tabel 8. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Jagung

No.	Kegiatan Padi	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Gerakan pengembangan jagung hibrida	1.655.905	Ha	1.529.674	92,38	1.026.085.952.660	993.691.706.624	96,84
2	Perbanyakan benih sumber	46	Ha	36	78,26	Pagu dan realisasi tidak dapat dipisah antara padi,jagung,kedelai		
3	Penyediaan benih jagung hibrida DIPA Pusat	2.150	Ton	2.003	93,17	145.153.031.000	5.081.251.480	3,50
4	Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) untuk jagung	465	Ha	420	90,32	867.602.000	816.568.000	94,12
5	Gerakan pengendali OPT untuk jagung	104	Kali	62	59,62	1.436.546.000	1.431.356.000	99,64
6	Pascapanen jagung	6.800	Ha	6.468	95,12	210.462.265.000	222.692.267.372	105,81
7	Unit Pengolahan Hasil Jagung	49	unit	49	100,00	5.621.768.000	5.973.698.095	106,26
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Jagung lahan sub optimal dan optimal (varietas)	5	varietas	5	100,00	2.010.051.000	2.002.059.853	99,60
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Jagung (teknologi)	7	teknologi	7	100,00	517.400.000	516.621.500	99,85
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	35	ton	35	100,00	870.000.000	869.893.500	99,99
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Jagung (Teknologi)	2	teknologi	2	100,00	490.000.000	478.344.200	97,62
	TOTAL					**1.393.514.615.660**	**1.233.553.766.624**	**88,52**

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, dan Badan Litbang 2016

SS 1. IKU 3 **Produksi Kedelai**	Target **1,5 juta ton PK** Realisasi **885,58 ribu ton PK**	% Capaian **59,07%** **Kurang Berhasil**

Keterangan: PK = Pipilan Kering

Produksi kedelai tahun 2016 sebesar 885,58 ribu ton atau sebesar 59,07% dari target 1,5 juta ton, sehingga masuk kategori kurang berhasil. Capaian kinerja produksi kedelai tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Gambar 15.

Produksi kedelai tahun 2011 hingga tahun 2016 menunjukkan tren penurunan, walaupun tren ini kembali naik pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016. Realisasi produksi tahun 2016 sebesar 885,58 ribu ton mengalami penurunan sebesar 8,06% dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 963,18 ribu ton. Capaian kinerja produksi kedelai dalam 6 (enam) tahun terakhir belum mencapai target. Capaian kinerja produksi kedelai terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 52%, sedangkan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 95,50%.

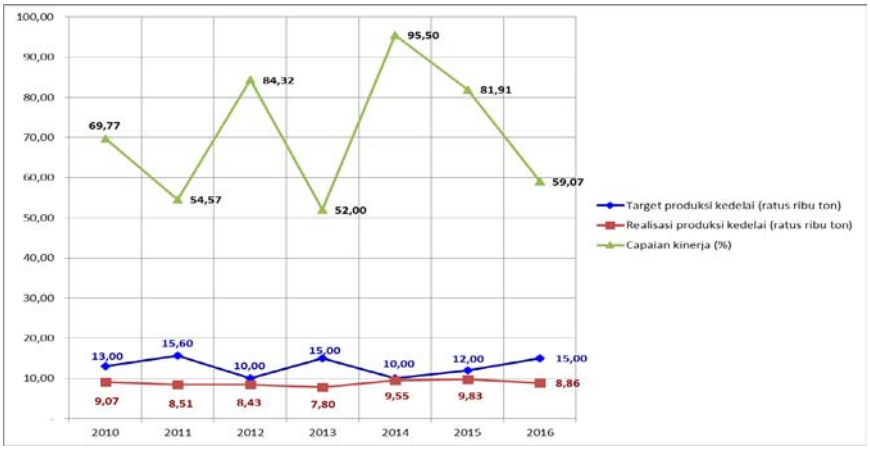

Gambar 15. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2011-2016

Capaian kinerja ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas dan luas panen kedelai sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 16.

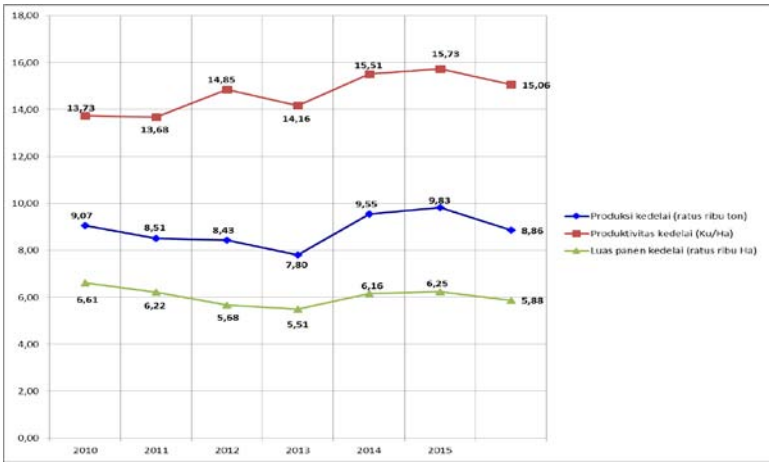

Gambar 16. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2011-2016

Gambar 16 menunjukkan adanya korelasi positif antara produktivitas dan luas panen kedelai dengan produksi kedelai, dimana produktivitas dan luas panen meningkat bersamaan dengan meningkatkan produksi kedelai.

Dibandingkan target produksi kedelai tahun 2019 sebesar 2,76 juta ton, maka realisasi produksi kedelai pada tahun 2016 sebesar 885,58 ribu ton baru mencapai 32,10%. Melihat belum tercapainya persentase capaian kedelai di tahun 2016 dibandingkan target tahun 2019, Kementerian Pertanian akan melakukan berbagai upaya-upaya yang lebih besar dan nyata dalam rangka meningkatkan produksi kedelai selama tiga tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran produksi kedelai di tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Penerapan Budidaya Kedelai

Kegiatan Penerapan Budidaya Kedelai merupakan pemberian bantuan berupa paket sarana produksi yang berisi benih, pupuk dan pestisida. Untuk areal pasang surut di luar pulau Jawa, diberikan tambahan kapur pertanian. Realisasi penerapan budidaya kedelai mencapai 364.474 ha atau 92,74% dari target 393.016 Ha, dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 524.301.493.155 ,- atau 96,15% dari pagu sebesar Rp 545.269.866.150,-. Kegiatan penerapan budidaya kedelai menghasilkan luas panen 32.367 ha, produktivitas 14,67 ku/ha dan produksi 47.481 ton.

2. Bantuan Benih

Kegiatan bantuan benih terdiri dari perbanyakan benih sumber kedelai dengan

a. Realisasi perbanyakan benih sumber kedelai mencapai areal seluas 125,5 Ha atau 71,71% dari target 175 ha

b. Realisasi penyaluran benih kedelai bersubsidi mencapai 612 ton atau 24,29% dari target 2.500 ton.

3. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

a. Dalam rangka pengamanan produksi kedelai dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Realisasi kegiatan ini mencakup areal seluas 190 Ha atau 90,48% dari target 210 Ha, dengan realiasi anggaran sebesar Rp 402.587.000 atau 97,09% dari pagu Rp 414.651.000,- Kegiatan PPHT ini memberikan hasil menurunnya penggunaan pestisida kimia sintetis, meningkatnya perkembangan musuh alami dan meningkatnya penggunaan pengendali ramah lingkungan di 19 hamparan pertanaman kedelai.

b. Dalam upaya menekan perkembangan populasi OPT sehingga serangan OPT dapat diturunkan dan tidak meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT kedelai sebanyak 50 kali (luasan 750 Ha) dengan anggaran Rp 16.425.000.000. Sampai dengan Desember 2016 terealisasi sebanyak 29 kali (47,37%), dan realisasi anggaran Rp 153.682.895.313 (98,87%).

4. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Pada tahun 2016 dialokasikan bantuan sarana pascapanen kedelai sebanyak 6.500 unit dengan anggaran Rp 155.435.858.000. Realisasi penyaluran bantuan sebanyak 6.500 unit berupa *power thresher* multiguna, dan sarana angkut 719 unit.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai, Kementerian Pertanian telah melakukan perakitan dua varietas unggul baru (VUB) kedelai yaitu Kedelai Deja 1 dan Kedelai Deja 2 (Gambar 17)

Gambar 17. VUB Tanaman Kedelai

Selain mengembangkan varietas unggul baru (VUB), juga telah dihasilkan inovasi baru berupa teknologi budi daya kedelai di lahan pasang surut di bawah kelapa sawit, teknologi pengendalian hama dan penyakit kedelai di lahan pasang surut, dan teknologi produksi kedelai di lahan salin. Kementerian Pertanian bersama sejumlah peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama melalui pengembangan Kedelai dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA). Keutamaan dari BJA sendiri dapat menghasilkan kedelai dalam jumlah banyak dan meningkatkan pendapatan petani kedelai (Gambar 18).

Gambar 18. Menteri Pertanian bersama Gubernur Jambi melakukan Panen Kedelai dengan Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA)

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi kedelai dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Kedelai

No	Kegiatan Kedelai	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Penerapan Budidaya Kedelai (Ha)	393.016	Ha	364.474	92,74	545.269.866.150	524.301.493.155	96,15
2	Perbanyakan benih sumber	175	Ha	126	71,71	Pagu dan realisasi tidak dapat dipisah antara padi,jagung,kedelai		
3	Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) untuk kedelai	210	Ha	190	90,48	414.651.000	402.587.000	97,09
4	Gerakan pengendali OPT untuk kedelai	50	Kali	29	58,00	574.752.000	571.695.000	99,47
5	Pascapanen Kedelai	6.500	unit	6.500	100	155.435.858.000	153.682.895.313	98,87
Program Badan Litbang						-		
1	Perakitan Varietas Unggul Kedelai toleran pecah polong dan biji besar serta lahan pasang surut dan	2	varietas	2	100	810.000.000	809.923.489	99,99
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Kedelai (teknologi)	2	teknologi	2	100	315.000.000	304.040.948	96,52
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	53	ton	53	100	1.811.000.000	1.810.048.657	99,95
	TOTAL					**704.631.127.150**	**681.882.683.562**	**96,77**

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang, 2016

Secara umum, akar permasalahan dari belum tercapainya target produksi kedelai adalah kondisi iklim *La Nina*, jatuhnya atau rendahnya harga kedelai, terbatasnya ketersediaan benih kedelai, tingginya serangan hama dan penyakit tanaman kedelai, serta kurang terealisasinya bantuan pemerintah karena keterbatasan lahan yang bersaing dengan komoditas lain.

Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka berbagai solusi dapat disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan, antara lain: (1) percepatan waktu tanam kedelai, (2) penggunaan varietas unggul kedelai, (3) membangun kerjasama dengan BUMN dan swasta untuk memperluas penggunaan lahan, (4) menugaskan BULOG untuk membeli kedelai petani, (5) kebijakan Harga Pokok Penjualan Kedelai, (6) meningkatkan ketersediaan benih kedelai unggul, dan (7) meningkatkan kegiatan PPHT dan gerakan pengendalian OPT kedelai.

Secara ringkas, akar permasalahan dan rekomendasi solusi bagi upaya peningkatan produksi kedelai dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Produksi Kedelai

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Kondisi iklim La Nina yang mengakibatkan musim hujan yang panjang	1. Melakukan percepatan waktu tanam kedelai 2. Pengembangan budidaya kedelai hemat lahan, air, tenaga kerja dan input kimia 3. Pompanisasi untuk mengairi pertanaman kedelai 4. Penggunaan varietas unggul
2	Jatuhnya harga kedelai	1. Penetapan Harga Pokok Penjualan kedelai petani 2. Penugasan Perum Bulog untuk membeli kedelai dengan harga acuan dan HPP jika harga pasar dibawah harga acuan atau HPP
3	Ketersediaan benih kedelai terbatas	Fasilitasi bantuan pemerintah di tahun 2017 melalui PTT dan BJA diarahkan untuk produksi benih kedelai sebagai stok di tahun 2018
4	Risiko tinggi terhadap hama dan penyakit tanaman	Memperkuat perlindungan tanaman kedelai dengan kegiatan PPHT Kedelai, gerakan pengendalian OPT Kedelai dan penguatan agroekosistem
5	48 % bantuan pemerintah dalam fasilitasi kedelai di tahun 2016 tidak terealisasi karena ketersediaan lahan yang bersaing dengan komoditas lain	Mendorong BUMN Perhutani, Perkebunan dan Perkebunan swasta untuk membuka peluang kemitraan pemanfaatan lahan untuk pengembangan kedelai. Ditjen TP bekerjasama dengan Ditjen Perkebunan dalam memperluas areal lahan kedelai

Catatan : Penugasan perum bulog ada dalam peraturan presiden Nomor 48 tahun 2016, Harga acuan kedelai ada di Permendag Nomor 63 Tahun 2016. Penetapan HPP Kedelai ada di Permendag No 25 tahun 2013. Di tahun 2017 belum ada rencana usulan pembaruan Penetapan HPP, jadi masih mengacu ke harga acuan

Kegiatan Dukungan untuk Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai

Selain beberapa kegiatan yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa kegiatan lain yang juga mendukung tercapainya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, yaitu: perbanyakan benih sumber untuk padi, jagung dan kedelai; bantuan pupuk bersubsidi serta pengawalan dan pendampingan oleh TNI AD.

1. Bantuan Benih

Perbanyakan benih sumber padi, jagung, dan kedelai terealisasi 385 ha dari target 411 ha, dengan realisasi anggaran Rp 9.083.828.488 atau 94,36% dari pagu.

2. Bantuan pupuk bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang sebagian besar biaya produksinya disubsidi oleh pemerintah, sehingga dapat dijual murah kepada petani dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET). Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani.

Pada TA 2016 telah dialokasikan bantuan pupuk bersubsidi sebesar 9.550.000 ton dan terealisasi sebesar 9.196.571 ton (96,30%) meliputi pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan organik. Anggaran untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini berasal dari Kementerian Keuangan dengan alokasi sebesar Rp 28.256.344.852.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.406.765.186.837.

3. Pengawalan dan Pendampingan oleh TNI-AD

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) No 01/MOU/RC.120/M/1/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui program UPSUS Pajale dilibatkan dukungan jajaran TNI. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Peran dari jajaran TNI adalah (1) menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta gerakan pengendalian OPT dan panen; (2)melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran benih, pupuk dan alsintan serta infrastruktur jaringan irigasi; dan (3) melakukan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Kementerian Pertanian pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran untuk pengawalan dan pendampingan sebesar Rp 17.432.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.747.887.710,- (84,60%).

SS 1. IKU 4 **Produksi** **Gula Tebu**	Target **2,8 juta ton GKP** Realisasi **2,22 juta ton GKP**	% Capaian **79,29%** **Cukup Berhasil**

Keterangan: GKP = Gula Kristal Putih / hablur

Target produksi gula tebu pada tahun 2016 adalah 2,80 juta ton hablur. Realisasi produksi gula tebu hingga akhir tahun 2016 mencapai 2,22 juta ton hablur atau sekitar 79,29% dari target tahun 2016. Persentase capaian indikator produksi gula tebu masuk kategori cukup berhasil.

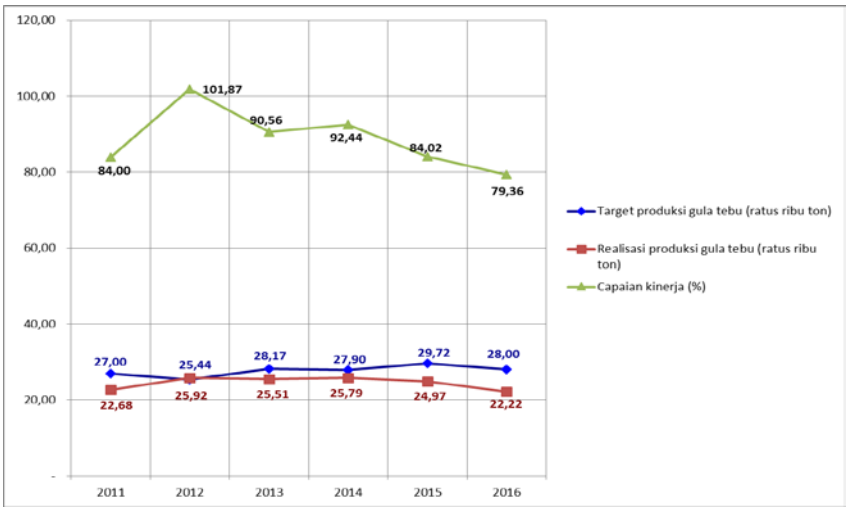

Gambar 19. Capaian Kinerja Produksi Gula Tebu Tahun 2011-2016

Gambar 19. memperlihatkan tren kinerja produksi gula tebu yang mencakup target, realisasi dan capaian selama tahun 2011-2016. Capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, dimana tahun 2016 Kementerian Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu sebesar 2,22 juta ton hablur dari 2,8 juta ton hablur yang ditargetkan atau sekitar 79,29%. Tahun 2015 Kementerian Pertanian berhasil mencapai produksi gula tebu sebesar 2,497 juta ton Hablur dari 2,972 juta ton hablur yang ditargetkan atau sekitar 84,07%.

Kinerja produksi gula tebu jelas berkorelasi dengan produktivitas dan luas areal gula tebu, sebagaimana diperlihatkan Gambar 20.

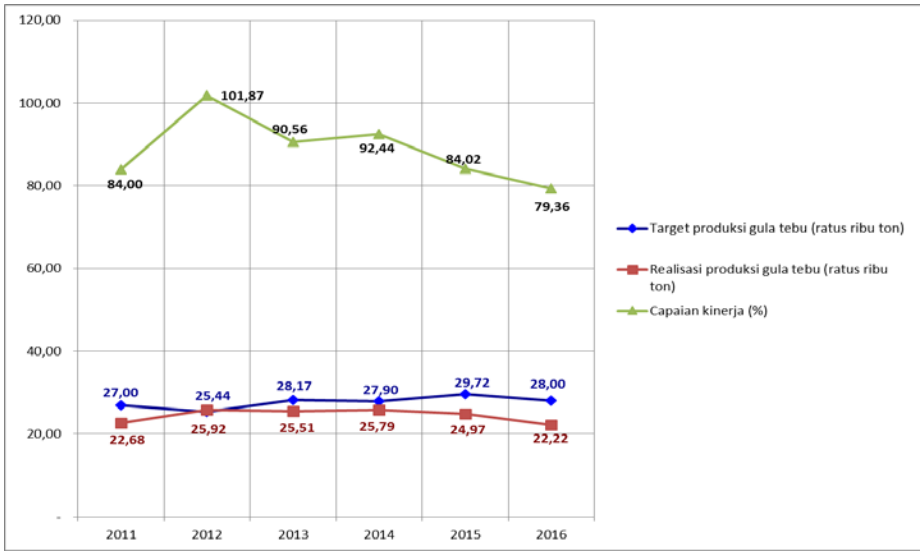

Gambar 20. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Areal Gula Tebu Tahun 2010-2016

Gambar 20. menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan produksi gula tebu dipengaruhi oleh pertumbuhan luas areal tebu dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yang relatif stabil. Bahkan luas areal gula tebu mengalami penurunan dari 477.100 Ha pada tahun 2014 menjadi 445.520 Ha pada tahun 2016.

Dibandingkan target produksi gula tebu tahun 2019 sebesar 3,8 juta ton, maka realisasi produksi gula tebu pada tahun 2016 sebesar 2,22 juta ton baru mencapai 58,42%. Tren pertumbuhan luas areal tebu yang cenderung stabil bahkan mengalami penurunan di tahun 2016 dikhawatirkan akan menjadi penghambat dalam mewujudkan swasembada gula. Sudah seharusnya segera dilakukan upaya-upaya yang lebih besar dan nyata dalam rangka meningkatkan produksi gula selama lima tahun ke depan. Apabila hal ini tidak dilakukan, target swasembada gula dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Untuk mendukung peningkatan produksi gula tebu, di tahun 2016 Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan seperti:

1. Bongkar Ratoon dan Rawat Ratoon

Kegiatan bongkar ratoon dilakukan untuk mengganti tanaman tebu dengan bibit tebu baru. Hal ini karena bibit tebu yang telah mengalami pengeprasan berulang-ulang akan menyebabkan penurunan rendemen dan mempengaruhi hasil gula (Gambar 21). Sedangkan rawat ratoon dilakukan apabila sisa tebangan tebu masih cukup tinggi dan tingkat produksi tebu masih menguntungkan. Pada TA 2016 telah dialokasikan kegiatan bongkar ratoon pada areal seluas 100 Ha dan terealisasi seluas 50 Ha (50%). Untuk kegiatan rawat ratoon dialokasikan untuk 6499 Ha dan terealisasi 6471 Ha (99,57%)

Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab.OganIlir, Sumatera Selatan

3. Perluasan Tebu di Lahan Kering

Untuk meningkatkan produksi tebu dan gula, salah satunya dilakukan melalui perluasan areal penanaman tebu yang dilakukan di lahan kering. Pada TA 2016 telah dialokasikan kegiatan perluasan areal seluas 770 Ha dan terealisasi seluas 770 Ha (100%).

4. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), Kebun Benih Tebu dan Pengawalannya

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat penting dalam budidaya tanaman karena sangat menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu merupakan salah satu faktor penting dan secara langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. Oleh karena itu penggunaan benih unggul bermutu menjadi keharusan bagi pelaku usaha (petani dan pabrik gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara Konvensional (stek) dan asal Kultur Jaringan (laboratorium). Untuk tebu, produksi

dan pengelolaan benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun Benih tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama (KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) (Gambar 22). Penyediaan benih secara konvensional membutuhkan waktu antara 30 - 40 bulan. Pada TA 2016 telah dialokasikan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 370 Ha dan terealisasi seluas 310 Ha (83,84%),

Gambar 22. KBI Di Kab. Dompu dan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu di Kab.Gorontalo

5. Pendampingan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sangat memerlukan pendampingan dari petugas terhadap pekebun. Pada TA 2016, dilaksanakan kegiatan Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP) sebanyak 556 orang dan terealisasi 100%. Selain itu juga dilaksanakan penguatan kelembagaan petani dengan target 660 orang dan terealisasi 100%.

6. Bantuan Peralatan

Peralatan sangat menentukan tingkat keberhasilan budidaya tanaman dan penanganan pasca panen. Pada TA 2016, dilaksanakan kegiatan bantuan peralatan sebanyak 155 unit dan terealisasi sebanyak 155 unit.

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi gula tebu dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kegiatan UPSUS untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Gula Tebu Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Bongkar Ratoon	100	Ha	100	100,00	755.888.000	722.949.000	95,64
2	Rawat Ratoon	6.499	Ha	6.471	99,57	20.493.573.000	19.425.531.000	94,79
3	Perluasan tebu dilahan kering	770	Ha	750	97,40	9.672.763.000	9.472.275.000	97,93
4	Pembangunan KBD	370	Ha	310	83,84	10.059.100.000	9.307.424.000	92,53
5	Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP)	556	Org	556	100,00	18.708.387.000	16.718.478.000	89,36
6	Pengembangan Database Tebu Sistem Online	9	Keg	9	100,00	1.121.124.000	677.356.000	60,42
7	Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen tebu	6	Keg	6	100,00	1.584.088.000	1.331.286.000	84,04
8	Penguatan Kelembagaan Petani	660	Org	660	100,00	1.395.099.000	1.269.879.000	91,02
9	Monev Tebu dan Pengawalan di daerah	14	Keg	14	100,00	4.233.692.000	3.674.368.000	86,79
10	Bantuan Peralatan	155	Unit	155	100,00	8.286.429.000	7.747.425.000	93,50
	Pompa Air	108	Unit	108	100,00	2.157.540.000	2.157.539.000	100,00
	Fertilizer Aplikator	44	Unit	44	100,00	3.337.025.000	2.802.025.000	83,97
	Grab Loader	3	Unit	3	100,00	2.791.864.000	2.787.861.000	99,86
11	Pemberian Penghargaan Petani/Klp Tani Berprestasi	11	Keg	11	100,00	396.945.000	396.900.000	99,99
12	Pengendalian OPT Tebu	1.199	Ha	1.199	100,00	1.863.215.000	1.811.169.000	97,21
13	Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan di Pusat	8	Keg	8	100,00	1.717.968.000	1.709.771.000	99,52
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Tebu dengan Rendemen dan Produktivitas Tinggi di Lahan Kering (varietas)	1		1	100,00	516.500.000	516.223.463	99,95
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tebu (teknologi)	1		1	100,00	725.903.000	711.553.800	98,02
3	Benih Sumber Tebu (budset)	3.000.000		3.000.000	100,00	404.000.000	391.873.746	97,00
4	Teknologi mekanisasi pertanian tanaman tebu (Teknologi)	2		2	100,00	725.000.000	679.903.850	93,78
	Total					**90.946.103.000,000**	**84.311.790.859,000**	**92,71**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Selain kegiatan tahun 2016, pencapaian kinerja produksi gula di tahun 2016 sebagian juga merupakan dampak dari kegiatan yang dilakukan di tahun 2015 antara lain: rawat ratoon, perluasan lahan tebu, pengawalan kebun benih tebu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, serta bantuan peralatan (seperti: traktor, *dump truck*, truk bak kayu, *grab loader*, dan pompa air).

Akar permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya produksi gula tebu antara lain: (1) pola tanam petani yang kurang seragam, (2) masih terbatasnya penggunaan bibit unggul tebu, (3) makin berkurangnya areal tanam tebu, (4) kecilnya luas lahan tebu petani, (5) jatuhnya harga gula tebu, (6) makin meningkatnya volume gula impor, (7) terbatasnya peran kelembagaan petani tebu, (8) kurang transparannya perhitungan rendemen tebu, (9) terbatasnya penyuluh perkebunan.

Pola tanam yang kurang seragam, terbatasnya penggunaan bibit unggul, menurunnya areal tanam tebu nasional, dan semakin kecilnya luas lahan tebu petani merupakan permasalahan dari aspek budidaya. Kalah bersaing dengan komoditas pangan lain, maka lahan tebu semakin tergeser ke lahan marjinal, tegalan dan lahan kering, serta jauh dari lokasi pabrik gula. Hal ini

mengakibatkan sulitnya waktu pemanenan dan semakin menurunnya produksi tebu petani.

Masuknya gula impor dengan harga murah mengakibatkan harga gula tebu produksi dalam negeri menjadi kalah bersaing. Di sisi lain, petani berada pada posisi tawar yang tidak kuat, ditambah kelembagaan petani tebu masih kurang berperan. Kurangnya jumlah petugas penyuluh tanaman tebu, juga menyebabkan budidaya tebu yang dilakukan petani tidak sesuai standar teknis.

Berdasarkan analisis akar permasalahan tersebut, solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi untuk dilakukan antara lain: (1) melakukan penataan pola tanam tebu, (2) mendorong petani menggunakan bibit unggul, (3) mengembangkan varietas unggul tebu, (4) mengoptimalkan pengembangan tebu di lahan kering, (5) mengendalikan impor gula, (6) mendorong pemberdayaan kelembagaan petani tebu, (7) mendorong pabrik gula untuk transparansi perhitungan rendemen, (8) mengendalikan harga jual gula tebu, dan (9) meningkatkan dukungan penyuluh perkebunan untuk komoditas tebu. Akar permasalahan dan solusi rekomendasi bagi upaya peningkatan produksi tebu dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi gula tebu

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	pola tanam petani yang kurang seragam	melakukan penataan pola tanam tebu
2	masih terbatasnya penggunaan bibit unggul tebu	1. mendorong petani menggunakan bibit unggul 2. mengembangkan varietas unggul tebu
3	makin berkurangnya areal tanam tebu	mengoptimalkan pengembangan tebu di lahan kering
4	kecilnya luas lahan tebu petani	
5	jatuhnya harga gula tebu	mengendalikan harga jual gula tebu
6	makin meningkatnya volume gula impor	mengendalikan impor gula
7	terbatasnya peran kelembagaan petani tebu	mendorong pemberdayaan kelembagaan petani tebu
8	kurang transparannya perhitungan rendemen tebu	mendorong pabrik gula untuk transparansi perhitungan rendemen
9	terbatasnya penyuluh perkebunan	meningkatkan dukungan penyuluh perkebunan untuk komoditas tebu

Sumber data: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016

SS 1. IKU 5 **Produksi Daging Sapi dan Kerbau**	Target **0,589 juta ton karkas** **0,471 juta ton daging (*meat yield*)** Realisasi **0,561 juta ton karkas** **0,449 juta ton daging (*meat yield*)**	% Capaian **95,25%** **Berhasil**

Keterangan: PK = Pipilan Kering

Produksi daging sapi dan kerbau tahun 2016 sebesar 0,561 juta ton daging karkas yang setara dengan 0,449 juta ton daging (*meat yield)* atau 95,25% dari target 0,589 juta ton karkas yang setara 0,471 juta ton daging (*meat yield*). Meskipun belum mencapai target, namun capaian produksi daging sapi dan kerbau tahun 2016 ini masuk kategori berhasil.

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau tahun 2011 hingga tahun 2016 disajikan pada Gambar 23.

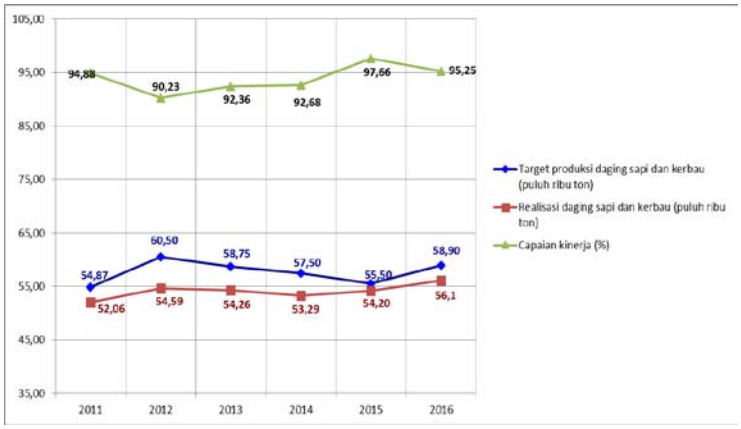

Gambar 23. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2011-2016

Selama 6 (enam) tahun terakhir, produksi daging sapi dan kerbau mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dibandingkan tahun 2015, produksi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19 ribu ton (3,5%) .

Pada Gambar 23. tampak bahwa terjadi penurunan *trend* target produksi daging sapi dan kerbau yang dimulai tahun 2013. Kebijakan tersebut ditempuh setelah diterbitkannya data populasi hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST13) sebagai basis data, dengan parameter teknis hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau/PSPK tahun 2011 yang

dilakukan oleh BPS serta *survey* karkas pada tahun 2012 yang dilakukan oleh IPB dalam penghitungan *meat yield*. Mulai tahun 2016 terjadi peningkatan angka target produksi daging sapi dan kerbau, dengan pertimbangan: 1) Kebijakan akselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri yang mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka) melalui Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dimulai di akhir tahun 2016, serta 2) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang mewajibkan pelaku usaha importir sapi bakalan juga memasukkan indukan dengan rasio 5 ekor bakalan wajib memasukkan 1 ekor indukan.

Dibandingkan target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 sebesar 0,755 juta ton karkas, capaian produksi di tahun 2016 baru mencapai 74,30%. Dengan kebijakan UPSUS SIWAB maka target produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk itu, kinerja peningkatan produksi daging sapi dan kerbau harus ditingkatkan selama 3 tahun ke depan.

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh populasi sapi dan kerbau.

Gambar 24. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2011-2016

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 24, perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2011-2016 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 populasi sapi dan kerbau sebanyak 16,72 juta ekor kemudian meningkat menjadi 18,03 juta ekor di tahun 2012. Berdasarkan Sensus Ternak tahun 2013 (ST13), populasi sapi mengalami penurunan menjadi 14,24 juta ekor di tahun 2013, namun kemudian secara konsisten meningkat terus menjadi 15,65 juta ekor di tahun 2014, 17,4 juta ekor di tahun 2015, dan 18,03 juta ekor pada tahun 2016.

Untuk mendukung pencapaian produksi daging sapi dan kerbau, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan pendukung di tahun 2016, seperti:

1. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik (teknologi) memasukkan mani (sperma atau semen) ternak jantan yang telah dicairkan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan alat khusus yang disebut '*insemination gun*'. (Gambar 24.). Melalui IB diharapkan terjadi peningkatan populasi dan perbaikan mutu genetik sapi. Pada TA 2016, dilaksanakan kegiatan optimalisasi IB sebanyak 2 juta dosis dan terealisasi sebanyak 2,2 juta dosis (112,68%).

Gambar 25. Proses Pengambilan Semen di BBIB Singosari Malang

2. Sinkronisasi Birahi

Sinkronisasi birahi adalah penyerentakan birahi pada beberapa ekor betina. Tujuannya untuk menstimulasi beberapa sapi betina sehingga mengalami birahi secara serentak. Manfaat sinkronisasi birahi antara lain: menghemat biaya dan mengurangi waktu menemukan sapi betina yang birahi. Pada TA 2016 dilaksanakan kegiatan sinkronisasi birahi sebanyak 65.200 ekor dan terealisasi 60.545 ekor atau 92,86%.

3. Produksi Semen Beku

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) diperlukan produksi semen beku yang berkualitas dan dalam jumlah cukup. Pada TA 2016 dilaksanakan kegiatan produksi semen beku sebanyak 5 juta dosis dan terealisasi 3,5 juta dosis (69,55%).

4. Peningkatan Status Kesehatan Hewan

Kegiatan peningkatan status kesehatan hewan mencakup kegiatan seperti:

1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2) Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan
3) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik
4) Penanganan Gangguan Reproduksi

Pada tahun 2016, kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan telah menganalisis sebanyak 499.079 dosis atau 69% dari target 722.890 dosis. Kegiatan penyidikan penyakit dan obat hewan telah menganalisis sebanyak 287.265. Kegiatan produksi vaksin dan bahan biologik telah menghasilkan 12.010.950 dosis atau 118,92% dari target 10.100.000 dosis. Namun, untuk beberapa vaksin terutama untuk penyakit prioritas (*Rabies, Brucellosis, Anthrax* dan *Hog Cholera*) masih belum dapat disediakan sebagaimana yang dibutuhkan. Kegiatan penanganan gangguan reproduksi sebanyak 114.237 ekor atau 107,77% dari target 106.000 ekor.

Secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan dapat tercapai 76,57% dari target 73%, yang tergambarkan dari wilayah yang telah dibebaskan dari PHMSZ yang terdiri atas : 1) Wilayah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (provinsi/kabupaten/kota/ pulau); 2) Wilayah Pengendalian Anthrax (provinsi/kabupaten/ pulau); 3) Menurunnya angka kasus

PHMSZ dan Gangguan Reproduksi (kasus); 4) Menurunnya angka kematian (%); 5) Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran (%); 6) Peningkatan mutu vaksin dan obat hewan (%); 7) Peningkatan keamanan bahan pakan asal hewan (%); 8) Peningkatan volume ekspor obat hewan (ton).

5. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia

Kegiatan pengembangan budidaya ternak ruminansia ini meliputi ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau di 27 propinsi. Pengembangan budidaya ternak sapi potong telah dilaksanakan di 188 kabupaten/kota sebanyak 820 kelompok atau 11.386 ekor. Pengembangan budidaya ternak Sapi perah di 2 Propinsi dan 3 Kabupaten sebanyak 3 kelompok atau 37 ekor. Pengembangan budidaya ternak Kerbau dilaksanakan pada 1 kelompok atau 13 ekor.

6. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Dalam upaya mendorong peningkatan populasi sapi/kerbau, pada tahun 2016 di lakukan kegiatan pengembangan sentra peternakan rakyat di 50 kawasan peternakan pada 17 propinsi.

Gambar 26. Lokasi SPR Cinagarogo Subang

7. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pakan ternak melalui pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan seluas 5.255 Ha, Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD seluas 1.168 Ha, Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT seluas 563 Ha, Pengembangan Kebun HPT di UPT seluas 468 Ha, Pengembangan Unit Usaha HPT seluas 33 Ha, Pengembangan Intergrasi Ternak-Sawit di 404 kelompok, Pengembangan Integrasi Ternak-Tanaman Pangan di 49 kelompok, Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas sebanyak 3 juta stek, Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP), Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia, Lumbung Pakan (LP) Ruminansia di 58 kelompok, Penguatan Pakan Sapi Potong, sapi perah sebanyak 9.293 ton, dan Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT sebanyak 7750 ton.

7. Kapal Ternak

Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016 dengan mengangkut 353 ekor ternak. Pelayaran secara kontinu dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke 24 pada tanggal 27 Desember 2016. Kapal CN 1 bertujuan untuk: (a) Memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak secara cepat; (b) Merubah struktur pasar, sehingga terjadi peningkatan harga di tingkat peternak dan penurunan harga daging di tingkat konsumen; (c) Menyediakan kapal khusus ternak yang didesain memenuhi standar Internasional yaitu mengimplementasikan prinsip *animal welfare* selama perjalanan; (d) Meningkatkan efisiensi distribusi ternak antar pulau dengan kapal khusus ternak, sehingga biaya transportasi dapat diturunkan; (e) Menata tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi lebih baik. Sapi yang diperdagangkan, mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen, dapat dengan mudah ditelusuri dan tercatat dengan baik; (f) Memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak.

Total jumlah muatan ternak tahun 2016 yang diangkut dengan Kapal Ternak CN 1 dari Provinsi NTT sebanyak 11.797 ekor yang berasal dari Pelabuhan Tenau sebanyak 11.139 ekor (jenis sapi Bali) dan dari Pelabuhan Waingapu sebanyak 658 ekor (jenis sapi SO).

Perusahaan pengirim (pengguna kapal) terdiri dari 39 perusahaan yang semuanya sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pengguna kapal ternak (*shipper*). Perusahaan penerima/pembeli ternak terdiri dari 2 perusahaan BUMN/BUMD dan 9 perusahaan swasta; Sepanjang tahun 2016, data menunjukkan bahwa proses perijinan pengeluaran ternak selalu mengalami keterlambatan sehingga proses loading ternak ke kapal ternak Camara Nusantara 1 juga mengalami keterlambatan. Untuk mulai berlayar, rata-rata kapal mengalami keterlambatan selama 6 jam dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT. PELNI. Jumlah ternak setiap pengapalan rata-rata 500 ekor kecuali pada beberapa pelayaran yaitu ke 9, 12, 13, 16, 17 dan 24.

Gambar 27. Kunjungan Menteri Pertanian di Kapal Ternak Camara Nusantara 1

8. Penelitian dan pengembangan teknologi

Kegiatan penelitian dan pengembangan telah menghasilkan F1 pedet pra sapih yang merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi PO dan indukan sapi Bali (Gambar 28). Selain itu, juga telah dihasilkan calon sapi PO terseleksi yaitu sapi yang mempunyai kemampuan memanfaatkan pakan berserat kasar tinggi dan protein kasar rendah. Tahun 2016 masih diperoleh F3 pedet lepas sapih calon galur PO terseleksi, sehingga tahun 2018 diharapkan dapat diperoleh F4 lepas sapih galur sapi PO Agrinak. Pada tahun 2016 telah dihasilkan bibit sumber ternak berupa 100 ekor sapi Peranakan Ongole (PO). Disamping itu juga telah dilkembangkan teknologi bibit sapi unggul sebanyak 5 paket teknologi.

Gambar 28. F1 pedet Pra Sapih Hasil Persilangan antara Pejantan Sapi PO dan Indukan Sapi Bali

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi dagi sapi dan kerbau dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13. Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi/Kerbau Kementerian Pertanian tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan							
1	Pengembangan Padang Penggembalaan	251	Kelompok	195	7.604.700.000	6.605.779.764	86,86
2	Penguatan Sumber Bibit / Benih Hijauan Pakan Ternak di UPTD	1	Unit	1	100.000.000	53.020.000	53,02
3	Pengembangan HPT	7.857	Ha	7.471	43.657.723.000	38.881.726.294	89,06
4	Pengembangan Integrasi Ternak	483	Klpk	404	86.517.863.340	80.868.971.258	93,47
5	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas	3.706.000	Stek	3.022.100	8.242.380.000	7.908.982.543	95,96
6	Pengembangan UBP, UPP, LP Ruminansia	58	Klpk	76	10.337.617.000	9.930.074.266	96,06
7	Penguatan Pakan Sapi Potong, Sapi Perah	9.451	Ton	9.293	58.612.519.000	55.330.031.522	94,40
8	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	722.890	dosis	499.079	33.751.799.000	31.932.274.861	94,61
9	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	177.166	Smpl	287.265	27.675.472.000	27.141.580.407	98,07
10	Penguatan Kualitas Semen Beku, Emrio dan Pejantan	350.805	dosis/emrio/ekor	352.557	12.404.676.000	12.127.163.539	97,76
11	Penguatan Pembibitan Sapi potong, sapi perah dan kerbau	50	Paket	47	11.374.800.000	10.809.615.515	95,03
12	Pengembangan Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau	1.010	Klpk	789	231.171.229.000	198.157.788.152	85,72
13	Pengadaan Indukan Sapi*)	69	Klpk	69	43.550.537.876	43.550.537.876	100
14	Distribusi Semen Beku dan Opersional IB	559.160	Dosis	498.388,37	22.933.277.000	21.052.429.375	91,80
15	Pengadaan N2 Cair	539.543	Liter	455.692	10.347.223.000	9.827.022.875	94,97
16	Sinkronisasi Birahi	65.200	Ekor	60.545	10.616.224.000	9.154.945.877	86,24
Program Penelitian dan Pengembangan teknologi							
1	Perakitan Galur Unggul Sapi PO Agrinak dan F1 Silangan Sapi PO dan Bali (galur)	2	Galur	2	4.304.000.000	4.302.595.210	99,97
2	Perakitan Teknologi Peternakan dan Veteriner Komoditas Strategis (teknologi)	30	Teknologi	30	2.310.100.000	2.280.944.930	98,74
3	Bibit Unggul Ternak sapi dan kerbau (ekor)	100	Ekor	100	269.000.000	268.389.190	99,77
	TOTAL				**618.176.440.216**	**563.578.093.690**	**91,17**

Sumber data: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2016 yaitu gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, produktivitas sapi dan kerbau dengan BSC yang masih rendah, skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis repoduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan antara lain: (1) penanggulangan reproduksi dan perbaikan pakan terutama pada indukan sapi, (2) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, dan (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer. Secara lengkap, akar permasalahan dan rekomendasi solusi perbaikan disajikan pada Tabel 14,

Tabel 14. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	Ada gangguan reproduksi pada indukan sapi baik secara kesehatan reproduksinya maupun diakibatkan oleh kekurangan gizi karena pakan kurang	Penanggulangan Reproduksi dan perbaikan pakan utamanya pada indukan sapi
2.	Jumlah pemotongan indukan produktif masih cukup tinggi	Penanganan Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif
3.	Produktivitas sapi dan kerbau yang diukur melalui angka Body Condition Score (BCS) masih rendah (1-3)	Perbaikan Pakan Ternak Sapi
4	Peternak yang memiliki sapi 1-2 ekor sekitar 66,34%*), yang secara kultural sebagai usaha sampingan	Penguatan Kelembagaan Peternak
5	Kekurangan Jumlah SDM Tenaga Teknis Reproduksi (IB, Pkb, ATR)	Pelatihan dan Bimbingan Teknis
6	Kurangnya sarana dan prasarana	Penyediaan dan Distribusi Sarana dan Prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer.

produksi gula **Sumber: Ditjen PKH, 2016**

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula pada Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp 12.133.682.603.770,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp. 10.794.212.278.341 atau capaiannya sebesar 88,96%.

Sasaran Strategis 2 (SS 2)
TERJAMINNYA DISTRIBUSI PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu permasalahan di dalam permbangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen yang belum optimal. Masalah jaringan distribusi pangan seringkali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan khusus pada daerah-daerah defisit pangan yang wilayahnya sulit dijangkau. Jaringan distribusi dan perdagangan antar pulau menjadi sangat penting perannya dalam perdagangan hasil pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya gejolak harga pangan. Target dari sasaran strategis ini adalah kestabilan harga dan distribusi pangan, dengan dua indikator yaitu Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa dan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen.

Yang dimaksud rasio disini adalah membandingkan antara jumlah produksi padi di luar Jawa dengan jumlah penduduk di luar Jawa dalam kurun waktu 1 tahun yaitu 2016, dengan target 364 kg/jiwa.

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indoensia. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang sudah diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2002 sampai 2012. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Sasaran strategis *kedua* memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa dan (2) Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen.

SS 2. IKU 1 **Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa**	Target **347** Realisasi **364**	% Capaian **92,58%** **Berhasil**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pra Angka Ramalan II, produksi padi di luar Pulau Jawa sebesar 38.949.786 ton. Jumlah penduduk di luar Pulau Jawa berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), BPS Tahun 2015 sebesar 112.100.963 jiwa. Jadi realisasi Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa tahun 2016 sebesar 347 kg/kapita atau mencapai 92,58% dari target 364 kg/kapita, sehingga masuk kategori berhasil.

Selama 6 (enam) tahun terakhir, rasio produksi padi per kapita di Luar Jawa tahun terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa seiring pertambahan jumlah penduduk di Luar Jawa, produksi padi di luar Jawa juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan rasio produksi padi di Luar Pulau Jawa tahun 2015, maka capaian di tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 16,8 kg/ kapita (5 %). Perkembangan capaian rasio padi di Luar Jawa selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Perkembangan Rasio Produksi Padi di Luar Pulau Jawa Tahun 2011-2016

	TAHUN					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PRODUKSI PADI LUAR JAWA	31.352.347	32.529.463	33.786.689	34.183.416	36.427.815	38.949.786
PENDUDUK LUAR JAWA	102.781.656	104.565.290	106.382.298	108.233.355	110.168.571	112.100.963
RASIO PRODUKSI PADI LUAR JAWA	305	311	318	316	331	347

Sumber: BPS diolah

Perlu diingat bahwa perhitungan rasio/perbandingan antara produksi padi dengan jumlah penduduk di luar Jawa tersebut menggambarkan ketersediaan produksi di luar Pulau Jawa. Jika dilakukan analisis lebih mendalam dengan memperhatikan angka konsumsi beras di luar Pulau Jawa, maka produksi padi sebesar 38,95 juta ton di tahun 2016 sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan beras penduduk di luar Pulau Jawa, bahkan diperoleh surplus sebesar 6,87 juta ton seperti terlihat dalam Tabel 16.

Tabel 16. Data Produksi dan Konsumsi Beras di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2015-2016

WILAYAH	2015						2016					
	PRODUKSI PADI GKP (TON)	BERAS (62,74%)	BERAS (Untuk Konsumsi Pangan)*	PENDUDUK (JIWA)	KONSUMSI **) (TON)	SURPLUS/ DEFISIT (TON)	PRODUKSI PADI GKP (TON)	BERAS (62,74%)	BERAS (Untuk Konsumsi Pangan)*	PENDUDUK (JIWA)	KONSUMSI **) (TON)	SURPLUS/ DEFISIT (TON)
PULAU JAWA	38.970.026	24.449.794	20.782.325	145.013.573	17.981.683	2.800.642	40.191.566	25.216.189	21.433.760	146.767.281	18.199.143	3.234.617
LUAR PULAU JAWA	36.427.815	22.854.811	19.426.589	110.168.571	13.660.903	5.765.687	38.949.786	24.437.096	20.771.531	112.100.963	13.900.519	6.871.012
TOTAL NASIONAL	75.397.841	47.304.605	40.208.915	255.461.700	31.677.251	8.566.329	79.141.352	49.653.284	42.205.292	258.868.245	32.099.662	10.105.629

Sumber: BPS 2016

Keterangan:

*) Produksi beras dikurangi penggunaan 15% (untuk benih, pakan ternak, industri non pangan, susut/tercecer gabah dan dikurangi penggunaan beras untuk konsumsi non pangan)

**) Konsumsi beras = 124 kg/per kapita/tahun

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran strategis Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa, antara lain: (1) penerapan budidaya padi seluas 1,49 juta Ha; (2) bantuan benih padi inbrida 824 ton; (3) perbanyakan benih sumber padi 184 Ha; (4) pengembangan desa mandiri benih 812 Ha; (5) penguatan desa mandiri benih 4.822 Ha; (6) fasilitasi sarana pasca panen 8.663 unit; (7) PPHT seluas 9.125 Ha; (8) Penanganan DPI seluas 170 Ha; dan gerakan pengendalian OPT sebanyak 337 kali. Kegiatan pendukung pencapaian produksi padi di luar Jawa dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Kegiatan Pendukung Pencapaian Rasio Produksi Padi di Luar Jawa tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Penerapan budidaya padi Luar Jawa	1.530.670	Ha	1.486.385	97	663.457.093.782	641.633.188.264	96,71
2	Bantuan benih padi inbrida DIPA Pusat Luar Jawa	1.381	Ton	824	60	13.915.042.989	449.288.405	3,23
3	Perbanyakan Benih Sumber Padi Luar Jawa	231	ha	184	80	Pagu dan realisasi tidak dapat dipisah antara padi,jagung,kedelai		
4	Pengembangan Desa Mandiri Benih Luar Jawa	1.080	Ha	812	75	20.340.257.143	14.238.180.000	70,00
5	Penguatan Desa Mandiri Benih Luar Jawa	5.768	Ha	4.822	84	10.722.607.254	8.578.085.803	80,00
7	Sarana Pasca panen padi Luar Jawa	9192	Unit	8.663	94	1.020.189.370.607	918.170.433.546	90,00
8	Sarana Angkut Luar Jawa	582	Unit	600	103	21.550.495.936	19.395.446.342	90,00
9	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi Luar Jawa	9550	ha	9.125	96	14.399.605.000	14.227.635.000	98,81
10	Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Luar Jawa	190	ha	170	89	602.542.000	579.703.000	96,21
11	Gerakan Pengendalian OPT (Reguler & TNI) Luar Jawa	448	kali	337	75	8.007.542.000	7.992.361.000	99,81
	Total					**1.773.184.556.711**	**1.625.264.321.361**	**91,66**

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2016

SS 2. IKU 2 **Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen**	Target **≥ HPP** Realisasi **Rp 4.734**	% Capaian **127,95%**

Keterangan: HPP = Harga Pembelian Pemerintah

Harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen tahun 2016 adalah sebesar Rp 4.734/kg atau 127,95% diatas nilai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2016 sebesar Rp 3.700/kg. Dengan demikian, capaian indikator harga gabah kering panen di tingkat produsen tahun 2016 masuk kategori sangat berhasil.

Gambar 28. memperlihatkan bahwa harga GKP di tingkat produsen/petani memiliki pola yang hampir sama setiap bulan dan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan harga GKP Tahun 2015, maka terjadi peningkatan/penurunan capaian di tahun 2016. Perkembangan harga GKP dan HPP selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 29.

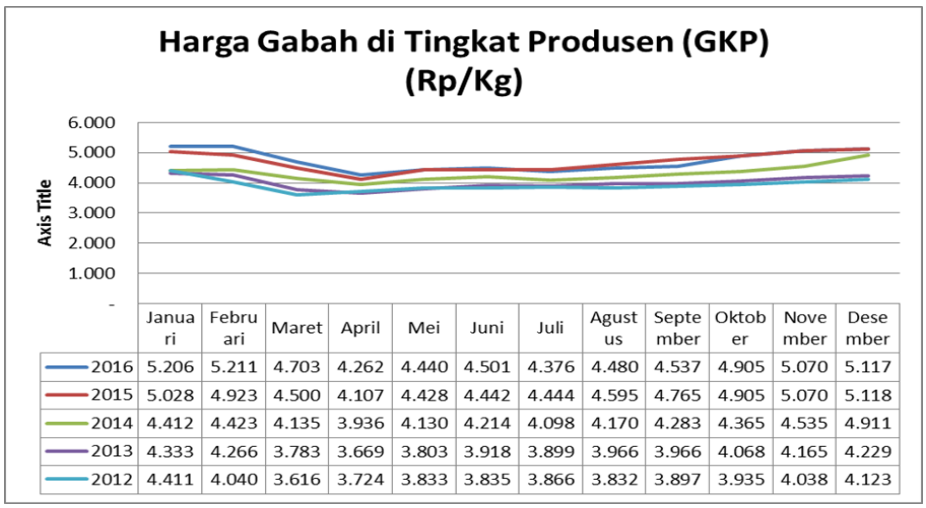

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2016	5.206	5.211	4.703	4.262	4.440	4.501	4.376	4.480	4.537	4.905	5.070	5.117
2015	5.028	4.923	4.500	4.107	4.428	4.442	4.444	4.595	4.765	4.905	5.070	5.118
2014	4.412	4.423	4.135	3.936	4.130	4.214	4.098	4.170	4.283	4.365	4.535	4.911
2013	4.333	4.266	3.783	3.669	3.803	3.918	3.899	3.966	3.966	4.068	4.165	4.229
2012	4.411	4.040	3.616	3.724	3.833	3.835	3.866	3.832	3.897	3.935	4.038	4.123

Gambar 29. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Produsen 2012-2016

Data harga gabah kering panen (GKP) diambil dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan. Selama Tahun 2016 sebagian besar petani di lokasi panel menjual gabah dalam bentuk GKP dan GKG.

Perkembangan Harga GKP, GKG, dan Beras Tingkat Petani dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras di Tingkat Petani Berdasarkan Pantauan BPS Tahun 2016

Bulan	Harga (Rp/Kg)		
	GKP di Petani	GKG di Penggilingan	Beras Medium di Penggilingan
Januari	5.206	5.805	9.548
Februari	5.211	5.869	9.622
Maret	4.703	5.622	9.444
April	4.262	5.593	8.959
Mei	4.440	5.600	8.836
Juni	4.501	5.526	8.973
Juli	4.376	5.473	8.932
Agustus	4.480	5.514	8.901
September	4.537	5.397	8.965
Oktober	4.905	5.413	8.981
November	5.070	5.426	9.050
Desember	5.117	5.551	9.069
Rata-Rata	**4.734**	**5.566**	**9.107**
Maksimal	**5.211**	**5.869**	**9.622**
Minimal	**4.262**	**5.397**	**8.836**
Pertb/bl (%)	**(0,02)**	**(0,39)**	**(0,45)**
CV (%)	**7,36**	**2,65**	**2,96**

Sumber : BPS yang diolah BKP. GKP = Gabah Kering Panen, GKG = Gabah Kering Giling

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator indikator kinerja sasaran Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen antara lain:

1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kegiatan LDPM menyalurkan dana kepada Gapoktan sebagai modal usaha agar anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. Tujuan dari kegiatan LDPM utamanya adalah melindungi petani terhadap jatuhnya harga pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan pada saat paceklik.

Selama tahun 2011-2016, kegiatan P-LDPM telah berhasil menumbuhkan Gapoktan sebanyak 2.249 Gapoktan, dengan rincian seperti terlihat pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Gapoktan)			Realisasi (Gapoktan)			Persentase (%)		
	Penum-buhan	Pengem-bangan	Keman-dirian	Penum-buhan	Pengem-bangan	Keman-dirian	Penum-buhan	Pengem-bangan	Keman-dirian
2012	281	235	220	281	224	220	100.00	95.32	100.00
2013	75	281	224	74	210	224	98.67	74.73	100.00
2014	38	117	219	38	102	210	100.00	87.18	100.00
2015	203	38	102	203	36	102	100.00	94.74	100.00
2016	100	203	38	98	189	38	98.00	93.10	100.00
Total	**697**	**874**	**803**	**694**	**761**	**794**	**99.57**	**87.07**	**98.88**

Sumber: BKP, 2016

Selain menjaga harga ditingkat petani, dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian. Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

2. Serap Gabah (SERGAB)

Upaya lain yang dilakukan untuk menahan harga gabah jauh di tingkat produsen adalah kegiatan menyerap gabah langsung dari petani. Program serap gabah (SERGAB) ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bersama dengan BULOG, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pemerintah Daerah setempat, serta TNI AD. Penyerapan gabah langsung kepada petani ini memotong mata rantai tata niaga beras menjadi lebih pendek, memberikan jaminan harga beli gabah di tingkat produsen (petani), dan menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Kegiatan Serap Gabah ini bertujuan untuk menanggulangi turunnya

harga gabah di tingkat petani pada masa musim panen sehingga petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Jaminan harga beli di petani akan mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional. Perkembangan serap gabah petani selama (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi Serap Gabah Petani Tahun 2014-2016

(per 29 Desember 2016 dalam ton setara beras)

BULAN	REALISASI SERAP GABAH TAHUN 2014-2016		
	2014	2015	2016
Januari	4.683	-	641
Februari	23.685	-	4.194
Maret	212.634	30.964	167.810
April	591.555	430.559	649.780
Mei	557.113	661.741	572.387
Juni	317.738	385.726	406.485
Juli	205.224	194.344	162.222
Agustus	165.863	90.231	287.430
September	198.999	22.985	240.177
Oktober	62.783	67.359	207.499
November	9.169	61.328	165.362
Desember	355	21.265	97.244
Jumlah	**2.349.801**	**1.966.502**	**2.961.231**

Sumber: Kementan dan Bulog, 2016.

3. Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN

Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 mulai mengembangkan model pemantauan data harga dan pasokan pangan melalui metode panel untuk mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Dengan metode panel, dapat diperoleh data harga dan pasokan pangan yang mutakhir sehingga dapat dianalisis dan dirumuskan secara tepat, terutama disaat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dimana kebutuhan dan harga pangan cenderung mengalami peningkatan. Kegiatan panel harga pangan tahun 2016 dilaksanakan di 34 propinsi dengan melibatkan enumerator sebanyak 948 orang sebagai petugas pengumpul dan pelapor data. Pengiriman

data akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (*Short Messsage Services*) atau SMS.

4. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan

Kajian responsif dan antisipasif distribusi pangan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan distribusi, harga, serta cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

5. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI)

Toko Tani Indonesia (TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015. berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu: (1) menyerap produk pertanian. (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran. dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat. Pada tahun 2016, telah dikembangkan 1320 TTI di 493 Gapoktan (Gambar 30).

Gambar 30. Toko Tani Indonesia

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen dapat dilihat pada tabel 21

Tabel 21. Kegiatan Pendukung Pencapaian Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN	35	Rekomendasi	35	100	9.314.525.000	8.817.847.333	94,67
2	Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan	1	Rekomendasi	1	100	4.188.335.000	3.703.228.270	88,42
3	Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan	1	Rekomendasi	1	100	833.700.000	708.671.600	85,00
4	Kajian Distribusi Pangan	1	Rekomendasi	1	100	572.865.000	96.784.700	16,89
5	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	303	Gapoktan	287	94,72	32.478.846.000	31.524.877.965	97,06
6	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) (Gapoktan)	500/1000	Gap/Toko	493/1320	98,6/132	144.860.639.000	138.077.008.024	95,32
	TOTAL					**192.248.910.000**	**182.928.417.892**	**95,15**

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2016

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Terjaminnya Distribusi Pangan pada Tahun 2016, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp 1.965.433.466.711,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 1.808.192.739.253,- atau capaiannya sebesar 92%.

Sasaran Strategis 3 (SS 3) MENINGKATNYA AKSES DAN PEMANFAATAN PANGAN DAN GIZI

Salah satu indikator meningkatnya akses pemanfaatan pangan dan gizi adalah melalui pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan proporsi konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, dan kelompok pangan lainnya. Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

SS 3. IKU 1 **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	Target **86,2** Realisasi **86**	% Capaian **99,77%** **Berhasil**

Capaian skor PPH tahun 2016 sebesar 86 atau 99,77% dari target 86,2, sehingga masuk kategori berhasil. Perkembangan skor PPH yang menggambarkan situasi konsumsi pangan 2011-2015 ditunjukkan dalam Tabel 22.

Tabel 22. Perkembangan Skor PPH Tahun 2011 – 2016.

Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,1	85,6	89,8	83,5	91.5	81,4	82.5	83,4	84.1	85,2	86,2	86

Sumber : Susenas 2011-2016 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran. oleh BKP

Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra BKP 2015 – 2019

Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH tahun 2011-2016 berfluktuatif antar tahun. Tahun 2011-2013 mengalami penurunan dari 85,6 menjadi 81,4, dan kembali meningkat menjadi 86 pada tahun 2016. Realisasi capaian skor PPH di tahun 2011-2013 mempunyai kesenjangan yang cukup besar dengan target yang ditetapkan. Kesenjangan tersebut sebagai akibat : (1) koreksi data beberapa komoditas ikan, sayur, dan buah dalam Susenas dengan mengikuti tren pengeluaran yang meningkat pada komoditas tersebut, dan (2) adanya perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi dengan reviu target sasaran merujuk pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya, sesuai Perpres 22 tahun 2009 dijadikan target capaian tahun 2015.

Dengan demikian, telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target pencapaian kualitas konsumsi pangan dengan *baseline* data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4), menghasilkan target skor PPH 82,5 tahun 2014, dan 84,1 tahun 2015, dan 86,2 tahun 2016. Setelah dilakukan perubahan

terhadap target skor PPH tersebut, capaian kualitas konsumsi pada tahun 2014 dan 2015 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 101,1%, menjadi 101,3% pada tahun 2015, akan tetapi sedikit menurun 99,77% pada tahun 2016. Jika dibandingkan denga targer skor PPH tahun 2019 sebesar 92,5, maka capaian skor PPH tahun 2016 baru mencapai 92,97%. Dengan upaya peningkatan diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, maka target tahun 2019 optimis dapat tercapai.

Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah mengalokasikan kegiatan berupa:

1. **Pemberdayaan Pemanfaatan Pekarangan**

   Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KRPL ini memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang relatif sempit dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan, tanaman rempah dan obat, serta bahan pangan hewani. (Gambar 31).

Gambar 31. Pemanfaatan Pekarangan dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

2. **Gerakan Diversifikasi Pangan**

   Dalam gerakan diversifikasi pangan dilaksanakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penganekaragaman pangan.

Pada tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan di 35 lokasi serta melibatkan pimpinan daerah.

3. **Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.**
   Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016, salah satunya adalah pengawasan pada proses produksi (On Farm), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilens oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; Sertifikasi prima 2 dilihat dari aspek keamanan dan mutu pangan; serta prima 1 dari aspek keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar dengan sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di rumah kemas (*packing house*) dan pelaku usaha melalui pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang menginginkan produknya didaftar.

Pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian Skor PPH pada tahun 2016 dapat terlihat pada tabel 23.

Tabel 23. Kegiatan Pendukung Pencapaian Skor PPH Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	4.894	Desa	4824	98,57	106.204.402.000	104.087.179.916	**98,01**
2	Pemantauan Penganekaragaman Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	35	100	11.393.650.000	10.777.902.217	**94,60**
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Unit	35	100	5.227.571.000	5.109.787.770	**97,75**
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	86	Lokasi	86	100	19.011.593.000	17.154.006.897	**90,23**
	Total					**141.837.216.000**	**137.128.876.800**	**96,68**

Sumber: Badan Ketahanan pangan, 2016

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pemanfaatan Pangan dan Gizi Tahun 2016, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp141.837.216.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 137.128.876.800,- atau capaiannya sebesar 96,68%.

Akar permasalahan belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: (1) masih rendahnya daya beli masyarakat dan (2) masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang. Kondisi ini masih banyak terlihat pada masyarakat terutama di perdesaan.

Merespon permasalahan utama yang dihadapi masyarakat tersebut, solusi yang dapat dijadikan rekomendasi perbaikan antara lain: (1) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk ditanami berbagai tanaman bahan pangan, (2) melakukan sosialisasi gerakan diverfisikasi pangan. Permasalahan dan rekomendasi solusi perbaikan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Akar Masalah dan Rekomendasi Solusi Untuk Meningkatkan Keberagaman Konsumsi Masyarakat

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	masih rendahnya daya beli masyarakat	mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk ditanami berbagai tanaman bahan pangan
2.	masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang	melakukan sosialisasi gerakan diverfisikasi pangan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2016

Sasaran Strategis 4 (SS 4)
MENINGKATNYA KONSUMSI PANGAN LOKAL

Indonesia merupakan salah satu negara konsumen beras terbesar di dunia. Populasi Indonesia yang terus meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi beras. Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal.

Hal inilah yang membuat Kementerian Pertanian memberikan perhatian yang besar pada ketersediaan beras, sekaligus juga berusaha untuk mengembalikan keberagamanan sumber pangan lokal untuk mengurangi konsumsi beras tersebut. Untuk itu, konsumsi pangan lokal oleh

masyarakat harus ditingkatkan. Selain menciptakan ketahanan pangan, pelestarian pangan lokal, upaya itu diyakini sejalan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang dimaksud pangan lokal non beras adalah kelompok umbi-umbian (singkong, ubi jalar, sagu, kentang, umbi lainnya) dan jagung.

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya konsumsi pangan lokal adalah meningkatnya konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras.

Sasaran strategis nomor empat ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras.

SS 4. IKU 1 **Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras**	Target **5,7%** Realisasi **6,3%**	% Capaian **110,5%** **Sangat Berhasil**

Capaian indikator rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras tahun 2016 adalah 6,3% atau 110,5% dari target 5,7%, sehingga masuk sangat berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat yang bersumber dari pangan lokal yaitu umbi-umbian dan jagung di tingkat masyarakat sudah baik.

Dibandingkan target Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras tahun 2019 sebesar 6,23, maka capaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras di tahun 2016 sudah mencapai 101,12% atau sudah melebihi target. Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2016 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Dalam upaya mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan konsumsi pangan lokal non beras, di tahun 2016 Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan seperti: kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan di 4824 desa yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pemantauan penganekaragaman pangan di 35 lokasi, serta Gerakan Diversifikasi Pangan di 35 lokasi.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras dapat terlihat pada tabel 25.

Tabel 25. Kegiatan Pendukung Pencapaian pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	4.894	Desa	4824	98,57	106.204.402.000	104.087.179.916	**98,01**
2	Pemantauan Penganekaragaman Pangan (Lokasi)	35	Lokasi	35	100	11.393.650.000	10.777.902.217	**94,60**
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	35	Unit	35	100	5.227.571.000	5.109.787.770	**97,75**
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	86	Lokasi	86	100	19.011.593.000	17.154.006.897	**90,23**
	Total					**141.837.216.000**	**137.128.876.800**	**96,68**

Sumber: BKP, 2016

Anggaran yang dialokasikan Kementerian Pertanian untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal adalah sebesar Rp 141.837.216.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 137.128.876.800 atau capaiannya sebesar 96,68%.

Sasaran Strategis 5 (SS 5)
STABILNYA PRODUKSI CABAI DAN BAWANG MERAH

Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulan baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor.

Komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) dan bawang merah merupakan komoditas hortikultura unggulan nasional yang kesehariannya tidak lepas dari kehidupan rumah tangga serta industri, baik dikonsumsi dalam keadaan segar maupun olahan. Dalam kurun beberapa waktu terakhir ini kedua komoditas tersebut juga memberikan andil dalam fluktuasi perekonomian nasional, terutama dalam hal inflasi. Dalam perkembangannya, diperlukan kolaborasi dan peran aktif dari seluruh pelaku, baik di pusat dan daerah dalam pengembangan dan penanganan komoditas cabai dan bawang merah.

Dilatarbelakangi dari permasalahan diatas, Kementerian Pertanian menjadikan stabilnya produksi bulanan cabai dan bawang merah menjadi salah satu sasaran strategis yang harus dicapai.

Sasaran strategis nomor lima ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) variasi produksi bulanan cabai besar, (2) variasi produksi bulanan cabai rawit, dan (3) variasi produksi bulanan bawang merah. Koefisien Variasi Produksi Cabai Besar adalah tingkat fluktuasi keragaman jumlah produksi bulanan dalam setahun. Semakin besar nilai koefisien variasi semakin tinggi fluktuasi jumlah produksi bulanan dalam setahun.

SS 5. IKU 1 **Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar**	Target **≤15** Realisasi **14,85**	% Capaian **101%** **Sangat Berhasil**

Realisasi Koefisien Variasi produksi cabai besar di tahun 2016 mencapai 14,85 atau 101% lebih rendah dari target 15, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Koefisien Variasi produksi cabai besar tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Produksi Bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Besar 2011-2016

Bulan	Produksi (Ton)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
1	75.602	68.655	75.843	86.225	78.383	76.130
2	67.589	99.766	97.581	98.411	106.339	95.070
3	72.512	96.451	92.023	98.775	118.024	113.856
4	81.976	91.393	98.576	95.696	102.029	104.744
5	84.444	84.175	98.848	96.988	96.264	84.850
6	75.878	79.702	89.640	99.707	96.969	85.880
7	78.997	84.460	90.200	98.693	85.560	91.602
8	74.918	74.682	82.356	90.894	82.791	78.369
9	83.400	76.398	83.763	89.843	73.517	87.592
10	72.509	71.223	71.386	76.879	68.210	97.658
11	62.179	64.615	65.782	69.478	67.141	112.790
12	58.848	62.791	66.883	73.017	69.957	118.691
Jumlah	**888.852**	**954.310**	**1.012.879**	**1.074.603**	**1.045.182**	**1.147.232**
Rata-rata	**74.071**	**79.526**	**84.407**	**89.550**	**87.098**	**95.603**
Standart Baku	**8.021**	**12.082**	**12.073**	**10.843**	**16.682**	**14.194**
Koefisien Variasi	**10,83**	**15,19**	**14,30**	**12,11**	**19,15**	**14,85**

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Tabel 26. memperlihatkan bahwa produksi cabai tahun 2016 mencapai 1.147.232 ton, meningkat 9,76% dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1.045.182 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar

bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi.

Dalam rangka menjaga stabilisasi produksi aneka cabai, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kebijakan berupa pengaturan pola tanam di 33 provinsi (Gambar 32), dimana dalam pengaturan pola tanam tersebut telah dilakukan pengaturan bulanan dalam satu tahun yang mengacu pada tingkat kebutuhan secara proporsional khususnya dalam rangka menghadapai Hari Besar Keagamaan Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan *supply demand.*

Gambar 32. Penanaman Cabai dalam Rangka Mendukung Pengaturan Pola Tanam Nasional

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 27, produksi cabai besar di bulan Juli dan Desember yang merupakan hari Raya Idul Fitri dan Natal mengalami peningkatan, sehingga kebijakan pola tanam yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian merupakan suatu keberhasilan dan langkah nyata, karena mampu menciptakan kondisi pasar dan pasokan yang cukup kondusif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Keseimbangan *supply demand* cabai besar tahun 2016 terlihat dalam tabel. 27.

Tabel 27. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2016

Bulan		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Produksi (Ton)		76.130	95.070	113.856	104.744	84.850	85.880	91.602	78.369	87.592	97.658	112.790	118.691	**1.147.232**
Kehilangan (Ton)		5.142	5.699	5.348	5.326	5.284	5.687	5.536	5.180	5.181	5.107	5.077	5.171	**63.738**
Kebutuhan (Ton)	Konsumsi langsung	35.885	35.529	35.529	35.529	35.529	38.016	37.306	35.529	35.885	35.529	35.529	36.240	**432.035**
	Horeka dan Warung	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	28.860	**346.320**
	Industri dan Benih	11.372	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.372	11.372	11.372	11.372	11.372	**136.470**
	Total	76.117	75.762	75.762	75.762	75.762	78.249	77.539	75.761	76.117	75.761	75.761	76.472	**914.825**
Neraca (Ton)		(5.129)	13.609	32.746	23.656	3.804	1.944	8.527	(2.572)	6.294	16.790	31.952	37.048	**168.669**

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2016

Terlihat pada tabel 27, bahwa meskipun produksi cabai besar bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai besar cukup merata tercukupi sepanjang tahun, sehingga tidak ada impor cabai segar di tahun 2016.

Selain pengaturan pola tanam, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPTP, BPSB maupun mantri tani serta penyuluh juga melakukan pembinaan dan pendampingan khusus guna menumbuhkan para *champion* (petani unggulan) komoditas aneka cabai di daerah-daerah sentra seperti Garut, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang, Magelang, Temanggung, Kebumen, Lombok Timur. Kementerian Pertanian telah melakukan MoU dengan *champion* tersebut untuk menjaga pasokan khusus dalam rangka stabilisasi harga melalui pasar murah di beberapa titik. Pasar murah yang telah dilakukan dimaksudkan untuk memutus rantai pasar dari petani produksi ke konsumen.

Masalah budidaya, serangan OPT, serta pemanfaatan benih bermutu merupakan isu-isu strategis di lapangan yang senantiasa segera dan langsung diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip budidaya ramah lingkungan dan GAP.

Dalam hal inovasi dan teknologi cabai besar, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan 1 VUB (varietas unggul baru) cabai merah besar yang adaptif terhadap musim hujan, teknologi pengendalian penyakit virus kuning pada cabai merah, dan perbanyakan benih sumber dari berbagai varietas.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi cabai besar dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Besar

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan aneka cabai (Ha)	13.093	Ha	12.626	96,43	362.437.122.000	342.002.491.927	94,3619
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan varietas unggul cabai adaptif musim hujan (varietas)	1	Varietas	1	100	379.002.000	378.601.000	99,8942
2	Perakitan teknologi dan inovasi peningkatan produksi cabai (teknologi)	1	Teknologi	1	100	379.003.000	379.249.000	100,065
3	Benih Sumber Tanaman Cabai (kg)	32	Kg	32	100	60.000.000	57.635.500	96,0592
	Total					363.255.127.000	342.817.977.427	94,3739

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

SS 5. IKU 2 **Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit**	Target **≤17** Realisasi **19,68**	% Capaian **84,23%** **Berhasil**

Capaian indikator variasi produksi bulanan cabai rawit tahun 2016 adalah 19,68 atau 84,23% lebih tinggi dari koefisien variasi yang ditargetkan yaitu 17, sehingga masuk kategori berhasil. Koefisien Variasi produksi cabai rawit tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Rawit 2011-2016

Bulan	Produksi (Ton)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
1	36.026	45.572	48.266	51.725	59.203	53.734
2	38.220	53.267	47.596	53.547	67.984	60.340
3	44.777	52.940	53.996	56.472	70.451	66.768
4	47.964	70.360	56.367	68.900	85.658	71.348
5	56.672	75.862	66.204	85.159	92.200	71.749
6	60.209	69.700	70.718	75.514	89.625	75.155
7	60.701	64.229	62.210	83.355	85.138	109.440
8	56.285	62.653	65.522	78.219	82.450	86.745
9	52.684	59.799	61.165	66.048	62.055	87.269
10	52.294	52.025	62.445	61.933	59.317	89.758
11	45.315	51.754	62.847	55.775	61.851	89.928
12	43.080	44.053	56.165	63.827	54.005	90.661
Jumlah	**594.227**	**702.214**	**713.502**	**800.473**	**869.938**	**952.894**
Rata-rata	**49.516**	**58.518**	**59.459**	**66.706**	**72.495**	**79.408**
Standart Baku	**8.240**	**10.184**	**7.111**	**11.623**	**13.661**	**15.627**
Koefisien Variasi	**16,64**	**17,40**	**11,96**	**17,42**	**18,84**	**19,68**

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Jika dilihat dari tabel 29, produksi cabai tahun 2016 mencapai 952.894 ton atau meningkat 9,53% dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 869.938 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Dibandingkan dengan cabai besar, produksi cabai rawit cenderung lebih tinggi koefisien variasinya dikarenakan lebih rentan terhadap cuaca dan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman).

Stabilnya produksi bulanan cabai rawit tidak lepas dari terobosan kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian melalui; 1) peningkatan produktivitas, produksi, kualitas dan daya saing, 2) manajemen pola tanam mendukung produksi merata sepanjang tahun, 3) peningkatan mutu melalui penanganan pascapanen, 4) peningkatan kapabilitas SDM, 5) Sinergisme penelitian dan pengembangan, 6) optimalisasi industri perbenihan, 7) perlindungan hortikultura, 8) dukungan kebijakan lintas sektoral dan akses permodalan. Berikut disajikan gambaran kebijakan dan strategi serta peta jalan (road map) pengembangan cabai tahun 2016 – 2045.

Gambar 33. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cabai Tahun 2016 – 2019

Kebijakan dan strategi ini mampu menciptakan kondisi pasar dan pasokan yang cukup kondusif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.

Keseimbangan *supply demand* cabai rawit tahun 2016 terlihat dalam tabel 30.

Tabel 30. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Rawit 2016

Bulan		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Produksi (Ton)		53.734	60.340	66.768	71.348	71.749	75.155	109.440	86.745	87.269	89.758	89.928	90.661	**952.895**
Kehilangan (Ton)		3.087	3.272	3.467	4.158	4.816	4.578	4.418	4.360	4.329	3.993	3.828	4.349	**48.655**
Kebutuhan (Ton)	Konsumsi langsung	27.075	26.807	26.807	26.807	26.807	28.683	28.147	26.807	27.075	26.807	26.807	27.343	**325.972**
	Horeka dan Warung	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162	**289.944**
	Industri dan Benih	2.841	2.841	2.841	2.841	2.842	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841	**34.093**
	Total	54.078	53.810	53.810	53.810	53.811	55.686	55.150	53.810	54.078	53.810	53.810	54.346	**650.009**
Neraca (Ton)		(3.431)	3.258	9.491	13.380	13.122	14.891	49.872	28.575	28.862	31.955	32.290	31.966	**254.231**
Bulan Tanam		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	
Luas Tanam (Ha)		11.715	12.416	13.156	15.780	18.277	17.376	16.767	16.545	16.427	15.153	14.529	16.503	**184.644**

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2016

Sebagaimana terlihat pada tabel 30 meskipun produksi cabai rawit bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai rawit merata tercukupi sepanjang tahun.

Inovasi dan perakitan teknologi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian juga telah mendorong peningkatan produksi cabai rawit, yaitu melalui Teknologi Pemanfaatan bahan organik dan mikoriza untuk memperbaiki kesuburan tanah dan produksi cabai rawit di lahan kering masam (PMK).

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi cabai rawit dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Rawit

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan aneka cabai (Ha)	13.093	Ha	12.626	96,43	362.437.122.000	342.002.491.927	94,3619
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan varietas unggul cabai adaptif musim hujan (varietas)	1	Varietas	1	100	379.002.000	378.601.000	99,8942
2	Perakitan teknologi dan inovasi peningkatan produksi cabai (teknologi)	1	Teknologi	1	100	379.003.000	379.249.000	100,065
3	Benih Sumber Tanaman Cabai (kg)	32	Kg	32	100	60.000.000	57.635.500	96,0592
	Total					363.255.127.000	342.817.977.427	94,3739

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Akar permasalahan belum tercapainya target koefisien variasi produksi bulanan cabai merah di tahun 2016 disebabkan antara lain: (1) masih

terbatasnya areal tanam cabai rawit, (2) masih terbatasnya pemanfaatan teknologi budidaya cabai rawit yang sesuai GAP (*good agricultural practices*), (3) terbatasnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya cabai rawit, (4) terbatasnya informasi pasar dan permodalan yang dimiliki petani.

Berdasarkan permasalahan, maka solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan antara lain: (1) perluasan areal tanam, terutama di luar Jawa, (2) bantuan sarana dan prasarana usaha bertanam cabai rawit, (3) sosialisasi penerapan GAP dalam budidaya cabai rawit, (4) dan peningkatan kapasitas petani dan pelaku usahatani cabai rawit.

SS 5. IKU 3 **Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah**	Target **≤20** Realisasi **19,79**	% Capaian **105%** **Sangat Berhasil**

Capaian koefisien variasi produksi bulanan bawang merah mencapai nilai 19,79 atau 105% lebih rendah dari target 20, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Koefisien variasi produksi bawang merah tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 32.

Tabel 32. Produksi Bulanan dan Koefisien Variasi Bawang Merah 2011-2016

Bulan	Produksi (Ton)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
1	59.295	107.946	115.486	149.013	124.667	132.609
2	35.430	73.350	68.136	66.234	107.208	129.842
3	40.920	46.254	59.307	58.506	56.474	82.217
4	65.102	57.994	77.632	83.949	99.635	91.995
5	60.073	80.953	70.657	98.307	91.369	133.211
6	68.579	92.116	89.464	140.637	130.209	119.886
7	118.906	104.974	88.991	122.245	129.755	114.675
8	118.736	114.083	109.625	114.597	122.545	132.009
9	76.797	81.906	100.684	100.475	126.940	102.453
10	80.303	100.921	87.930	102.696	87.944	92.475
11	79.744	47.862	55.836	104.847	90.648	82.472
12	89.238	55.837	87.025	92.480	61.790	81.610
Jumlah	**893.124**	**964.195**	**1.010.773**	**1.233.984**	**1.229.184**	**1.295.453**
Rata-rata	**74.427**	**80.350**	**84.231**	**102.832**	**102.432**	**107.954**
Standart Baku	**25.988**	**24.192**	**18.777**	**26.757**	**25.732**	**21.365**
Koefisien Variasi	**34,92**	**30,11**	**22,29**	**26,02**	**25,12**	**19,79**

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Jika dilihat dari tabel 32, pola tanam reguler yang umum dilakukan oleh petani bawang merah adalah pada Bulan April-September, dengan waktu panen raya pada bulan Juni dan Agustus. Bulan Oktober-Januari dikenal sebagai bulan *off season,* dimana petani tidak banyak melakukan

penanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan di bulan-bulan tersebut. Kondisi ini ikut berimbas kepada ketidakstabilan harga baik di tingkat petani maupun harga yang diterima oleh konsumen.

Pada tahun-tahun sebelumnya, langkah yang paling mudah ditempuh adalah dengan membuka keran impor sebagai upaya stabilisasi. Masuknya bawang merah impor memberikan pukulan yang cukup telak bagi petani bawang merah karena harga jual bawang merah petani jatuh ke level paling rendah seperti yang terjadi pada Tahun 2012 yaitu Rp. 4.000/Kg. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian besar serta efek traumatik yang mendalam bagi petani bawang merah. Petani enggan untuk kembali menanam bawang merah dan memilih untuk bertanam komoditas lainnya yang lebih "aman", produksi bawang merah menjadi berkurang dan harga menjadi naik. Meskipun produksi bawang merah diketahui surplus di tiap tahunnya, namun jumlah produksinya belum merata sepanjang waktu, sehingga solusi impor menjadi jalan pintas untuk meredam gejolak harga. Petani bawang merah menderita karena kebijakan ini.

Langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Pertanian berupa penerapan manajemen tanam bawang merah yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan sepanjang tahun, terutama saat *off season* dan menjelang hari-hari besar nasional. Sosialisasi dan edukasi baik ke petani, penyuluh, petugas dinas untuk melakukan pertanaman di luar musim terus dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga "baik" setiap saat namun tidak memberatkan konsumen. Target pemerintah yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga bawang merah sepanjang tahun tanpa Impor**.** Hasilnya cukup signifikan, mampu mendorong perubahan pola tanam dari yang berbasis musim menjadi berbasis kebutuhan. Periode *off season* sudah tidak ada lagi karena telah diantisipasi dengan penambahan luas tanam baik swadaya maupun dukungan dana APBN serta APBD, sehingga produksi meningkat dan memenuhi kebutuhan nasional bahkan ekspor. Tahun 2016 luas tanam bawang merah naik 14% dibandingkan Tahun 2015 dengan produksi mencapai 1,29 juta ton (Gambar 34), serta ditutup dengan tidak adanya impor bawang merah konsumsi masuk ke wilayah NKRI. Ini suatu prestasi yang tidak kecil ditengah beratnya tantangan akibat terjadinya fenomena alam *el nino* dan *la nina* sepanjang Tahun 2016.

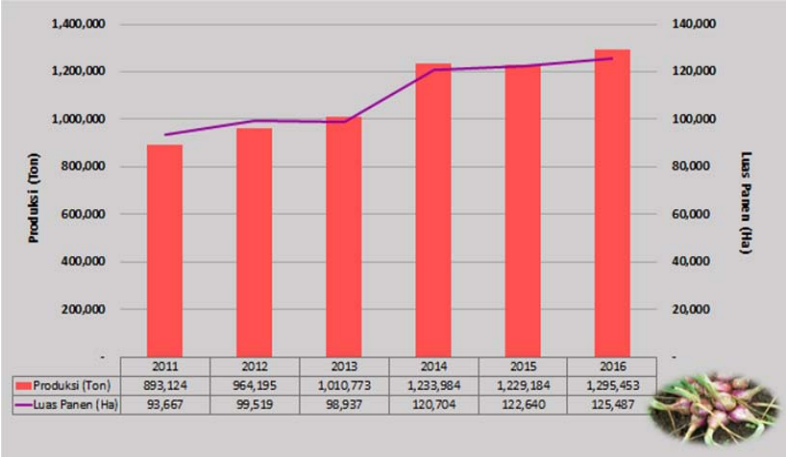

Gambar 34. Grafik Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2011-2016

Perkembangan bawang merah dipengaruhi pula oleh perubahan luas panen yang terjadi di provinsi sentra produksi. Berdasarkan Gambar 34 terlihat adanya korelasi positif antara luas panen bawang merah dengan produksi bawang merah, dimana luas panen menjadi faktor yang cukup dominan dalam peningkatan produksi bawang merah.

Panen Bawang Merah oleh Mentan dan Dirjen Hortikultura di Desa Purworejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang (Februari, 2016)

Mentan melepas bawang merah dari Kab. Nganjuk untuk didistribusikan kepada Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan bawang merah

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menghadiri panen raya bawang merah di Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bersama Bupati Kab. Brebes dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah (Agustus 2016)

Gambar 35. Menteri Pertanian Melakukan Panen Bawang Merah

Keberhasilan peningkatan produksi bawang merah ini disebabkan adanya upaya khusus yang telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan untuk memperluas pertanaman dan meningkatkan produksi bawang merah melalui; 1) Pengembangan dan penumbuhan kawasan pada sentra produksi dengan penekanan pada pengembangan berbasis kelompok tani di pulau Jawa dan Indonesia Timur, 2) Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, 3) Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, melalui produksi di luar musim (*off season)* di sentra utama yang didukung oleh teknologi pengairan dan budidaya *off season*, pengembangan sentra produksi di luar Pulau Jawa serta pengaturan pola produksi, 4) Penerapan sistem jaminan mutu pada proses produksi, 5) Peningkatan usaha penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk, melalui fasilitasi bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil (*bangsal pascapanen, cold storage*, alat pengolahan hasil skala *home industry*), fasilitasi kemiraan dan jaringan usaha, 6) Peningkatan kapabilitas SDM, melalui optimalisasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan dan kelembagaan tani (asosiasi/gapoktan/koperasi tani), 7) Sinergisme penelitian dan pengembangan, melalui dukungan penelitian *off season,* studi kelayakan usaha, dukungan kebijakan dan pengembangan di daerah, serta 8) Pembatasan impor bawang merah.

Dalam segi inovasi dan teknologi, untuk meningkatkan produksi bawang merah, telah dihasilkan 1 VUB bawang merah yang adaptif terhadap musim hujan. Selain itu juga dihasilkan Teknologi pemupukan dan amelioran pada budidaya bawang merah di lahan gambut serta Teknologi perbenihan inkonvensional bawang merah varietas Bima dan Sembrani. Telah dialokasikan pula 36.165 ton benih sumber bawang merah yang terdiri berbagai jenis varietas.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi bawang merah dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Bawang Merah

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp. 000)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan bawang merah (Ha)	4.889	Ha	4.807	98,32	190.186.444	180.720.697	95,02
2	Produksi benih bawang merah (kg)	1.965.401	Kg	1.031.020	52,46	19.064.431	13.368.610	70,12
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan varietas unggul bawang merah adaptif musim hujan	1	varietas	1	100	371.498.000	368.610.000	99,22
2	Perakitan teknologi dan inovasi peningkatan produksi bawang merah	1	teknolog	1	100	303.953.000	303.370.000	99,81
3	Benih Sumber Tanaman bawang merah (Ton)	32	Ton	32	100	1.079.819.000	1.078.002.199	99,83
	Total					1.964.520.875	1.944.071.506	98,96

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Total anggaran yang dialokasikan Kementerian Pertanian dalam pencapaian Sasaran Strategis Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah adalah sebesar Rp 365.219.647.875,- dengan realisasi sebesar Rp 344.762.048.933,- atau tercapai sebesar (94,40%).

Sasaran Strategis 6 (SS 6)
BERKEMBANGNYA KOMODITAS BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing, seperti: kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, nanas, manggis, salak, mangga, daging kambing dan domba. Target dari sasaran strategis ini adalah produksi dari beberapa komoditas pertanian tersebut.

Sasaran strategis nomor enam ini memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) produksi mangga, (2) produksi nanas, (3) produksi manggis, (4) produksi salak, (5) produksi kentang, (6) produksi karet, (7) produksi kopi, (8) produksi kakao, (9) produksi kelapa, (10) produksi teh, dan (11) produksi daging kambing dan domba.

SS 6. IKU 1 **Produksi Mangga**	Target **2.340 ribu ton** Realisasi **2.180 ribu ton**	% Capaian **93,16%** **Berhasil**

Mangga adalah komoditas buah yang cukup potensial dan mempunyai pangsa pasar ekspor yang cukup menjanjikan. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, produksi mangga mencapai 2.180 ribu ton, realisasi ini lebih rendah dibandingkan target kinerja tahun 2016 sebesar 2.340 ribu ton sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 93,16% atau dapat dikatakan berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, produksi mangga meningkat sebesar 0,07%.

Produksi mangga dalam 6 (enam) tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sempat mencapai produksi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 2.413 ribu ton, produksi mangga mengalami penurunan pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016. Secara rinci produksi dan luas panen mangga dapat dijabarkan pada Gambar 36.

Gambar 36. Produksi dan Luas Panen Mangga Tahun 2011-2016

Berdasarkan Gambar 36. terlihat bahwa fluktuasi produksi manga tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan luas panen. Pada saat luas panen

meningkat cukup signifikan di tahun 2011 hingga 2014, produksi mangga cenderung berfluktuasi. Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga 2016 pertumbuhan produksi dan luas panen cenderung linier.

Dibandingkan target produksi mangga tahun 2019 sebesar 2.040 ribu ton, maka realisasi produksi mangga pada tahun 2016 sebesar 2.180 ribu ton baru mencapai 87,90%. Tren pertumbuhan luas areal mangga yang cenderung stabil bahkan mengalami penurunan dikhawatirkan akan menjadi penghambat dalam mewujudkan target produksi mangga di Tahun 2019.

Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi mangga antara lain: fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Akar permasalahan tidak tercapainya rasio produksi mangga dikelompokkan kedalam 3 domain permasalahan, yaitu

1. Dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan proses pembungaan terhambat dan rontok sebelum menjadi buah,
2. Adanya serangan OPT yang menyerang pertanaman mangga.
3. Selain itu, pada pertanaman *existing* produktivitas pohon mangga yang berproduksi semakin menurun, hal ini disebabkan umur tanaman tersebut rata-rata sudah di atas 15-20 tahun, sehingga pengembangan kawasan baru sangat diperlukan.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi mangga, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kawasan-kawasan pengembangan mangga. Dengan terbangunnya kawasan budidaya mangga maka pendampingan dan pembinaan pengelolaan tanaman mangga dapat lebih mudah dilakukan. Di dalam kawasan mangga diberikan berbagai bantuan untuk merehabilitasi tanaman mangga yang sudah tua, menangani serangan hama dan penyakit tanaman, pemupukan, dan pelaksanaan *good agricultural practices* (GAP)

SS 6. IKU 2 **Produksi Nenas**	Target **1.926 ribu ton** Realisasi **1.795 ribu ton**	% Capaian **93,2%** **Berhasil**

Nenas adalah komoditas buah yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan industri olahan. Pangsa pasar nenas sebagian besar didominasi oleh produk olahan. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, produksi nenas mencapai 1.795 ribu ton lebih rendah dibandingkan target tahun 2016 sebesar 1.926 ribu ton (93,20%) atau belum mencapai target. Meskipun demikian produksi nenas dinyatakan berhasil karena jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan produksi sebesar 3,79%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 2.042 ribu ton, maka produksi nenas tahun 2016 baru mencapai 87,90 % atau masih cukup jauh untuk memenuhi target tersebut. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih besar dan nyata untuk dapat mendukung peningkatan produksi nenas sehingga mampu memenuhi pasar domestik dan international. Gambaran capaian produksi dan luas panen nenas tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 37.

Gambar 37. Produksi dan Luas Panen Nenas Tahun 2011-2016

Fluktuasi produksi nenas selama enam tahun terakhir ini dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada luas panen nenas seperti yang diilustrasikan pada Gambar 21. Trend produksi nenas dalam

periode 2011 - 2016 menunjukkan peningkatan di awal tiga tahun pertama dimana bahkan pada tahun 2013, produksi nenas mencapai produksi tertinggi sebesar 1.882 ribu ton, namun pada 2014 dan 2015, menurun secara signifikan secara berturut-turut sebesar 2,51% dan 5,77% menjadi 1.835 ribu ton dan 1.729 ribu ton kemudian meningkat menjadi 1.795 ribu ton pada tahun 2016.

Sedangkan, perkembangan luas panen menunjukkan peningkatan pada 2 tahun pertama, selanjutnya luas panen menurun sejak 2013 hingga tahun 2015 hingga akhirnya di tahun 2016 luas panen nenas mencapai 15.648 ha, meningkat 23,74% dari tahun 2015.

Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi nenas antara lain: fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi nanas dikelompokkan kedalam 3 domain permasalahan, yaitu

1. Berkurangnya fasilitasi bantuan pemerintah untuk pengembangan kawasan nenas di sentra produksi nenas. Pada tahun 2011 hingga 2015 terdapat bantuan pengembangan kawasan nenas seluas 71 ha, 123 ha, 25 ha, 60 ha dan 60 ha namun di tahun 2016 hanya seluas 23 ha (Kubu raya dan Kediri).
2. Selain itu, penyebab lain belum optimalnya produksi nenas adalah perawatan atau pemeliharaan pertanaman pada sentra-sentra produksi sudah mulai tidak intensif seperti di awal pengembangan, banyaknya tanaman yang sudah tidak produktif dan belum direvitalisasi, serta adanya alih komoditas.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi nenas, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kawasan-kawasan pengembangan nenas. Dengan terbangunnya kawasan budidaya nenas maka pendampingan dan pembinaan pengelolaan tanaman nenas dapat lebih mudah dilakukan. Di dalam kawasan nenas diberikan berbagai bantuan untuk merehabilitasi tanaman nenas yang sudah tua, menangani serangan hama dan penyakit tanaman, pemupukan, dan pelaksanaan *good agricultural practices* (GAP).

SS 6. IKU 3 **Produksi Manggis**	Target **147 ribu ton** Realisasi **226 ribu ton**	% Capaian **153,57%** **Sangat Berhasil**

Manggis adalah komoditas buah andalan ekspor Indonesia. Permintaan manggis ke beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, produksi manggis mencapai 225.746 ton lebih tinggi dibandingkan target tahun 2016 sebesar 147 ribu ton (153,57%) atau telah melampaui target, masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Selama periode 2011 hingga 2016, rata-rata produksi manggis mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 21,10 %. Hal ini dapat dilihat dari trend produksi manggis setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yang disebabkan dampak perubahan iklim pada kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, trend produksi manggis secara umum terus meningkat hingga tahun 2016.

Sementara itu, produksi tahun 2016 apabila dibandingkan terhadap target produksi jangka menengah tahun 2019 (akhir tahun RPJMN) sebesar 155 ribu ton, produksi manggis telah mencapai 145,64%. Capaian produksi manggis dibandingkan target disajikan pada Gambar 38.

Gambar 38. Produksi dan Luas Panen Manggis Tahun 2011-2016

Peningkatan produksi manggis di tahun 2016 disebabkan antara lain oleh penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai SOP dan GAP khususnya pada kelompok tani yang mendapat fasilitasi bantuan untuk pengembangan manggis sejak tahun 2010, peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat dari program bantuan benih buah, terkendalinya tanaman dari gangguan OPT dan dampak Iklim. Meskipun demikian peningkatan produksi belum sepenuhnya didukung oleh akses pasar yang lebih luas serta dukungan harga jual yang baik. Sehingga, kedepan diperlukan adanya dukungan penguatan jaringan pasar (domestik dan internasional), kelembagaan usaha dan perbaikan teknologi pascapanen dalam rangka peningkatan mutu produk dan daya saing.

Selain hal tersebut diatas, peningkatan produksi manggis juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada luas panen manggis. Terlihat bahwa luas panen manggis cenderung meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, kemudian menurun di tahun 2014 dan meningkat kembali di tahun 2016 menjadi seluas 225.746 ha.

SS 6. IKU 4 **Produksi Salak**	Target **1.080 ribu ton** Realisasi **986 ribu ton**	% Capaian **91,34%** **Berhasil**

Produksi salak tahun 2016 ditargetkan sebesar 1.080 ribu ton, sementara realisasi produksi salak sebesar 986.5 ribu ton (91,34%) atau masuk kategori **Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 sebesar 965.198 ton, maka produksi tahun 2016 meningkat 2,21%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 1.146 ribu ton, phroduksi tahun 2016 baru mencapai 86,08%. Gambaran produksi dan luas panen salak tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 39. berikut.

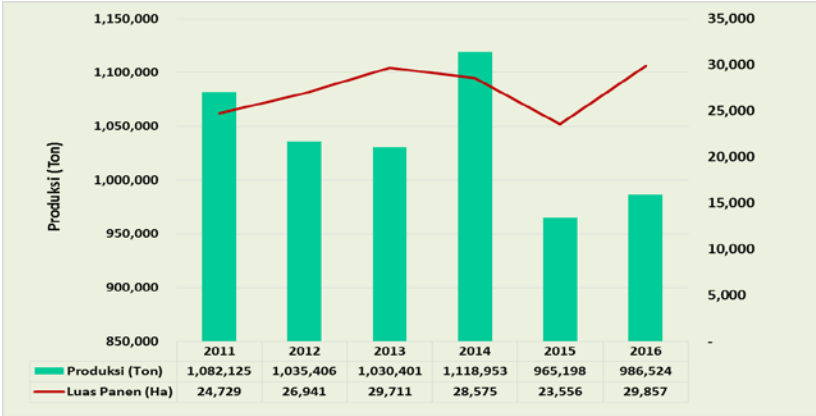

Gambar 39. Produksi dan Luas Panen Salak Tahun 2011-2016

Meskipun produksi salak di tahun 2016 belum mampu mencapai target seperti yang diharapkan, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan produksi. Peningkatan produksi salak tahun 2016 didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi salak tahun 2016 disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di sentra produksi salak, yaitu Kabupaten Sleman dan Magelang sehingga banyak tanaman salak terkena puso.

Berdasarkan permasalahan tidak tercapainya produksi salak ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan adalah peningkatan penerapan budidaya yang baik dan benar (sesuai SOP dan GAP) khususnya pada kelompok tani yang mendapat fasilitasi bantuan untuk rehabilitasi pohon salak yang terkena dampak bencana alam.

SS 6. IKU 5 **Produksi Kentang**	Target **1.348 ribu ton** Realisasi **1.289 ribu ton**	% Capaian **95,62%** **Berhasil**

Produksi kentang tahun 2016 belum berhasil mencapai target yang direncanakan, dimana target produksi kentang sebesar 1.348 ribu ton dan dapat terealisasi sebesar 1.289 ribu ton atau mencapai 95,62% (**Berhasil**). Produksi tahun 2016 tersebut meningkat 5,77% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 1.219 ribu ton. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2019 sebesar 1.431 ribu ton, maka capaian produksi kentang tahun 2016 baru mencapai 90,08% atau masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target. Ilustrasi capaian produksi dan luas panen kentang tahun 2016 disajikan pada Gambar 40.

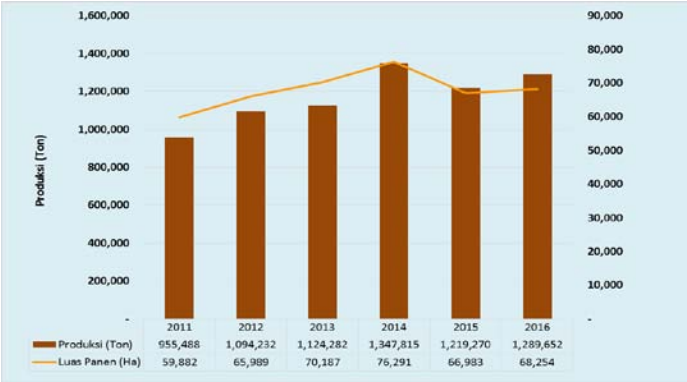

Gambar 40. Produksi dan Luas Panen Kentang Tahun 2011-2016

Produksi kentang dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend peningkatan, walaupun di tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Namun, produksi kentang kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Adapun, rata-rata pertumbuhan produksi kentang adalah sebesar 6,68%. Peningkatan dan penurunan produksi kentang sangat dimungkin mendapat pengaruh dari perubahan luas panen kentang selama enam tahun kebelakang.

Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi kentang antara lain: fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kentang sesuai target dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu Cuaca ekstrem La Nina menyebabkan penundaan jadwal tanam dan menimbulkan serangan OPT, ketersediaan benih yang belum mencukupi, beberapa lahan daerah sentra mengalami pencemaran, serta adanya bencana alam tanah longsor ataupun erosi pada beberapa lokasi dengan lahan lereng. Akar permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Perbaikan Pencapaian Produksi Kentang

No.	Akar Masalah	Rekomendasi solusi perbaikan kinerja
1	Cuaca ekstrem La Nina untuk tahun 2016, berdampak kepada penundaan jadwal tanam kentang, atau penggantian dengan tanaman lain seperti ubi jalar atau diberakan karena petani takut mengalami kerugian.	Dilakukan penanaman dalam screen house, hanya saja memerlukan biaya yang tinggi, atau memindahkan lahan pertanian kentang dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah diiringi penciptaan varietas kentang dataran rendah, hanya kelemahannya akan bersaing dengan komoditi dataran rendah yang lain.
2	Pada sentra-sentra produksi kentang seperti Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan Batang, lahannya tercemar NSK sehingga tidak cocok untuk perbenihan.	Rotasi tanaman dengan tanaman lain selama beberapa tahun untuk memutuskan siklus NSK.
3	Produksi benih belum mencukupi baik granola maupun atlantik	Percepatan pelepasan varietas lokal. Untuk varietas MZ sedang dilakukan percepatan varietasnya. Untuk kebutuhan industri akan kentang atlantik, perusahaan bermitra dengan petani untuk pemenuhan kebutuhannya.
4	Cuaca hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya serangan hama dan umbi kentang membusuk sebelum waktu panen	Gerakan Pengendalian OPT
5	Adanya bencana alam yang terjadi di beberapa sentra produksi seperti di Kabupaten Karo (Brastagi) terkena erupsi Gunung Sinabung	Fasilitasi Bantuan terhadap daerah terkena bencana

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kentang ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan antara lain: melakukan penanaman dalam screen house atau memindahkan lahan pertanian kentang dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, penciptaan varietas kentang dataran rendah, rotasi tanaman untuk memutuskan siklus NSK, percepatan pelepasan varietas lokal, gerakan pengendalian OPT, dan fasilitasi bantuan terhadap daerah terkena bencana.

SS 6. IKU 6 **Produksi Karet**	Target **3.438 ribu ton karet kering** Realisasi **3.158 ribu ton karet kering**	% Capaian **91,85%** **Berhasil**

Karet merupakan komoditas perkebunan andalan ekspor Indonesia. Permintaan karet ke beberapa negara di Amerika dan Eropa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, produksi karet mencapai 3.158 ribu ton, lebih kecil dibandingkan target tahun 2016 sebesar 3.438 ribu ton (91,86%) atau masuk dalam kategori Berhasil. Selama periode 2011 hingga 2016, produksi karet mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari *trend* produksi karet setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, namun *trend* produksi karet secara umum terus meningkat hingga tahun 2016 meningkat 0,39% dibanding produksi tahun 2015.

Sementara itu, produksi tahun 2016 apabila dibandingkan terhadap target produksi jangka menengah tahun 2019 (akhir tahun RPJMN) sebesar 3.810 ribu ton, produksi karet baru mencapai 82,89% atau masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target. Ilustrasi capaian produksi dan luas areal karet tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 41.

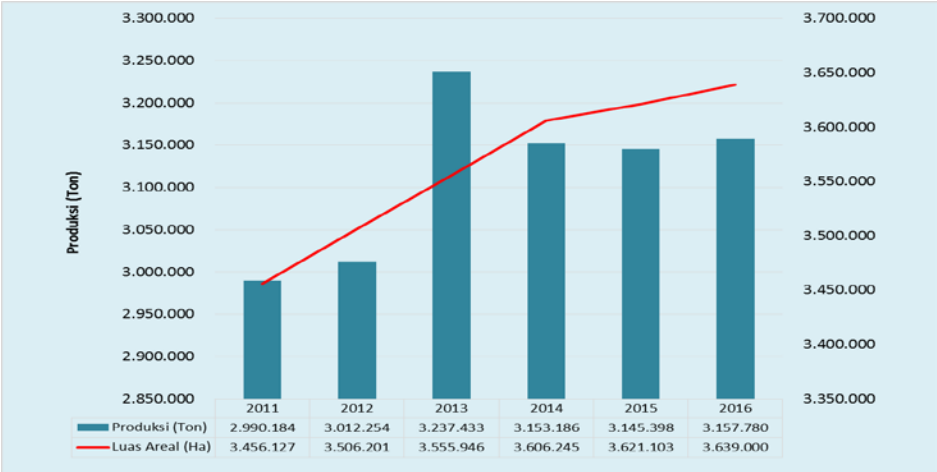

Gambar 41. Produksi dan Luas Areal Karet Tahun 2011-2016

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi karet tahun 2016 antara lain:

1. **Peremajaan Tanaman Karet**

   Peremajaan tanaman karet dilakukan di kebun-kebun karet yang pohonnya sudah tidak berproduksi dengan baik. Karet yang sudah tua ditebang dan akarnya dibongkar sedang kayunya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Perlakukan peremajaan dilakukan seperti pada saat penanaman baru. Hanya saja pada penanaman bibit perlu dilakukan pemupukan karena tanah bekas kebun karet sangat kurang unsur haranya. Kegiatan peremajaan tanaman karet di tahun 2016 dilakukan di 18 Kabupaten di 10 Provinsi di Indonesia dengan total lahan seluas 3469 Ha.

2. **Perluasan Tanaman Karet**

   Perluasan karet dilaksanakan pada daerah yang secara agroklimat sesuai untuk pengembangan tanaman karet yaitu diutamakan pada wilayah perbatasan. Fasilitasi yang diberikan adalah benih karet unggul bermutu serta pengawalan dan pendampingan. Kegiatan perluasan tanaman karet di tahun 2016 dilaksanakan di 3 Kabupaten yang ada di 3 Provinsi dengan total lahan seluas 450 Ha.

3. Pembangunan Sumber Benih Karet

Dalam pengembangan komoditi karet, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih karet keberadaan sumber benih karet memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih karet di 18 Kabupaten yang ada di 10 Provinsi seluas 21 Ha.

4. Kegiatan Pendukung Lainnya

Dalam peningkatan produksi karet nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 657 orang petani karet, serta pengembangan kelembagaan dan usahatani karet.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi karet dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Karet Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Peremajaan Tanaman Karet	3,469	Ha	3,469	100	25,939,090,000	25,286,409,000	97.48
2	Perluasan Tanaman Karet	450	Ha	450	100	5,822,000,000	5,793,862,000	100
3	Pembangunan Sumber Benih Karet	24	Ha	21	87.50	3,598,187,000	3,008,056,000	83.60
4	Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)					3,864,734,000	3,402,393,000	
	Pengawalan peremajaan karet	28	Keg	28	100	2,234,644,000	1,859,196,000	83.20
	Pengawalan perluasan karet	5	Keg	5	100	393,600,000	356,718,000	90.63
	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet	657	Org	657	100	818,700,000	792,021,000	97
	Pengembangan kelembagaan dan usahatani karet	30	Org	30	100	233,000,000	233,000,000	100
	Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan kelembagaan petani	6	Keg	6	100	184,790,000	161,458,000	87.37
5	Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan (Karet, Kelapa dll) di Pusat	3	Keg	3	100	799,716,000	776,655,000	97.12
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1	Teknologi Budidaya tanaman karet (	1	Teknolog	1	100	240,000,000	230,269,750	95.95
2	Benih sumber karet (Entress)	50,000	Entress	50,000	100	69,000,000	41,153,950	59.64
	TOTAL					**40,332,727,000**	**38,538,798,700**	**95.55**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi karet dikelompokkan kedalam 4 domain permasalahan, yaitu

1. Anomali iklim menyebabkan produktifitas karet berkurang, hal ini harus dibarengi dengan pengelolaan tanaman dan pemanenan yang baik.

2. Distabilitas harga karet, menyebabkan petani enggan menyadap tanaman karetnya dikarenakan harganya sangat rendah. Tidak stabilnya harga karet disebabkan pasar dunia dimana stok produksi getah karet sangat melimpah.
3. Kondisi karet Indonesia sudah tua sehingga produktivitasnya semakin menurun.
4. Kualitas karet Indonesia kurang bersaing dipasar.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi karet ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Rekomendasi akar permasalahan karet Tahun 2016

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Menurunnya produktivitas karet	1. Penerapan teknologi budidaya (Intensifikasi, budidaya dan penyadapan) 2. Perbaikan penyadapan sesuai anjuran 3. Perbaikan pasca panen
2	Harga karet yang tidak stabil	1. Menciptakan kepastian pasar 2. Perbaikan sistem pemasaran 3. Menciptakan peluang dengan menfasilitasi industri pengolahan karet di Indonesia 4. Membatasi impor produk turunan karet
3	Kondisi tanaman sudah berumur tua	1. Rehabilitasi tanaman melalui peremajaan karet
4	Kualitas karet rendah	1. Gerakan Bokar (bahan Olah Karet) 2. Memperbaiki sistem penyadapan dan pasca panen

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

SS 6. IKU 7 **Produksi Kopi**	Target **738 ribu ton kopi berasan** Realisasi **639,3 ribu ton kopi berasan**	% Capaian **86,58%** **Berhasil**

Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi (seperti Indonesia). Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi.

Produksi kopi tahun 2016 ditargetkan sebesar 738 ribu ton kopi berasan, sementara realisasi produksi kopi sebesar 639,3 ribu ton (86,58%) atau masuk kategori **Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 sebesar 639,4 ribu ton, maka produksi tahun 2016 turun 0,12%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 778 ribu ton, produksi tahun 2016 baru mencapai 82,17%. Gambaran produksi dan luas areal kopi tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 42.

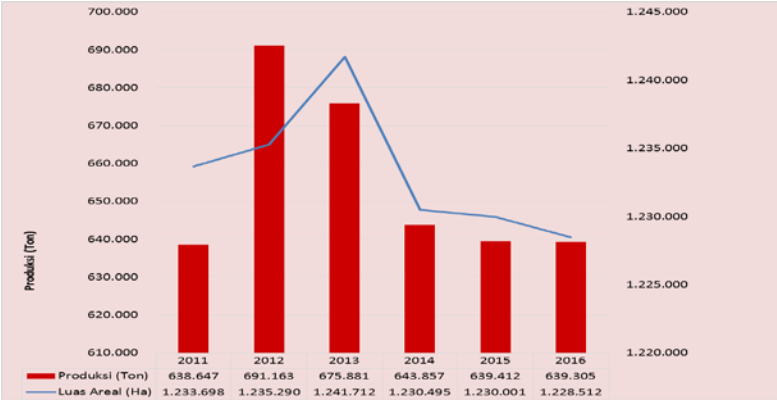

Gambar 42. Produksi dan Luas Areal Kopi Tahun 2011-2016

Produksi kopi dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan, sempat mencapai produksi tertinggi tahun 2012 sebanyak 691

ribu ton, produksi kopi terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 639 ribu ton di tahun 2016. Penurunan produksi kopi sangat dimungkin mendapat pengaruh dari luas areal kopi yang terus berkurang selama enam tahun kebelakang. Pengembangan kawasan kopi seluas 6 ribu Ha yang dilakukan di di tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan produksi kopi di tahun-tahun mendatang.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi kopi tahun 2016 antara lain:

1. **Intensifikasi Tanaman Kopi**
   Intensifikasi Tanaman Kopi Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas budidaya usaha tanaman kopi dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman kopi yang lebih baik. Dalam kegiatan intensifikasi, tanaman kopi mendapatkan perlakuan khusus meliputi pemupukan memakai pupuk yang seimbang serta pemberantasan hama dan penyakit dengan efektif. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melaksanakan intensifikasi tanaman kopi arabika seluas 4.650 Ha dan kopi robusta seluas 2300 Ha.

2. **Perluasan Tanaman Kopi**
   Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi, pada tahun 2016 perluasan kopi seluas 100 Ha.

3. **Pembangunan Kebun Induk Kopi**
   Dalam pengembangan kopi, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih kopi, keberadaan sumber benih kopi memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih kopi di 18 Kabupaten yang ada di 10 Provinsi seluas 21 Ha yang tersebar di 11 Kabupaten sentra produksi.

4. **Kegiatan Pendukung Lainnya**
   Dalam peningkatan produksi kopi nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 3155 orang petani kopi, serta pelatihan penguatan kelembagaan terhadap 360 petani kopi.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kopi dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kopi Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika (Ha)	4.650	Ha	4.650	100	9.323.424.000	9.290.374.000	99,65
2	Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta (Ha)	2.300	Ha	2.300	100	10.868.119.000	10.837.231.000	99,72
3	Perluasan Tanaman Kopi (Ha)	100	Ha	100	100	820.000.000	615.623.000	75,08
4	Pembangunan Kebun Induk Kopi	21	Ha	21	100,00	542.605.000	502.897.000	92,68
5	Kegiatan Pendukung lainnya							
	Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kopi	36	paket	36	100	3.113.106.000	2.642.615.000	84,89
	Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Kopi	504	OB	504	100	181.800.000	173.100.000	95,21
	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi	3.155	Org	3.155	100	3.677.050.000	2.533.480.000	68,90
	pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kopi	360	Org	360	100	1.853.500.000	1.403.050.000	75,70
	IG Tanaman Kopi	5	Org	5	100	271.422.000	206.356.000	76,03
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan Varietas unggul kopi robusta (varietas)	1		1	100	234.000.000	230.129.003	98,35
2	Penelitian teknologi budidaya kopi (teknologi)	1		1	100	305.000.000	289.104.500	94,79
3	Benih sumber tanaman kopi (entress)	50.000		50.000	100	69.000.000	41.153.950	59,64
	Total					**31.259.026.000**	**28.765.113.453**	**92,02**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kopi dikelompokkan kedalam 4 domain permasalahan, yaitu

1. Anomali Iklim, iklim yang tidak bersahabat menyebabkan tanaman kopi terlambat berbuah bahkan terjadi guguran bunga-bunga kopi.
2. Inovasi teknologi belum optimal, menyebabkan Luas areal kopi yang terus berkurang karena kurang menarik (produktivitas rendah, sulitnya benih unggul dan minimnya pengolahan dan kemasan pdoduk kopi), terbatasnya penguasaan teknologi proses)
3. Minimnya industri Hilir produk kopi menyebabkan terbatasnya fasilitas produksi biji kopi (mesin pengering, pengupas, dan sortasi di tingkat usaha kecil dan menengah),
4. Harga kopi yang kurang menarik, menyebabkan petani Indonesia kurang bergairah meningkatkan produksinya. Rendahnya harga produk kopi disebabkan oleh impor produk kopi dengan harga rendah dan kualitas rendah, dan ekspor kopi mengalami kesulitan dengan besarnya bea masuk ekspor produk kopi dan standar mutu ekspor kopi yang dikuasai oleh lembaga internasional.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kopi ini, maka rekomendasi solusi

perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Rekomendasi akar permasalahan Kopi Tahun 2016

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Rendahnya produktivitas kopi karena anomali iklim	1. Penyediaan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim
2	Luas tanaman kopi terus berkurang	2. Perluasan dan peremajaan tanaman 3. Pengembangan kopi oleh investor atau pengembangan kopi dengan skala besar
3	Lemahnya industri hilir kopi	4. Fasilitasi dan bantuan pasca panen 5. Pelatihan dan pembinaan kelembagaan petani 6. Penyediaan industri hilir kopi
4	Harga kopi tidah stabil	7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengturan sistem pemasaran kopi 8. Menumbuhkan lembaga sertifikasi produk kopi untuk mengimbangi lembaga asing

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

SS 6. IKU 8 **Produksi Kakao**	Target **831 ribu ton biji kering** Realisasi **657 ribu ton biji kering**	% Capaian **78,33%** **Kurang Berhasil**

Hingga saat ini produksi kakao mencapai 657 ribu ton yang menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketiga dunia setelah Pantai gading dan Ghana. Produksi kakao di tahun 2016 ini meningkat 63 ribu ton (10,70%) dibanding produksi tahun 2015. Suatu peningkatan yang signifikan jika dilihat dari luas areal yang turun 8 ribu Ha di tahun 2016. Meskipun demikian, produksi kakao di tahun 2016 ini belum dapat mencapai target yaitu sebesar 831 ribu ton biji kering (78,33%) atau dalam kategori berhasil. Gambaran produksi dan luas areal kakao tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 43.

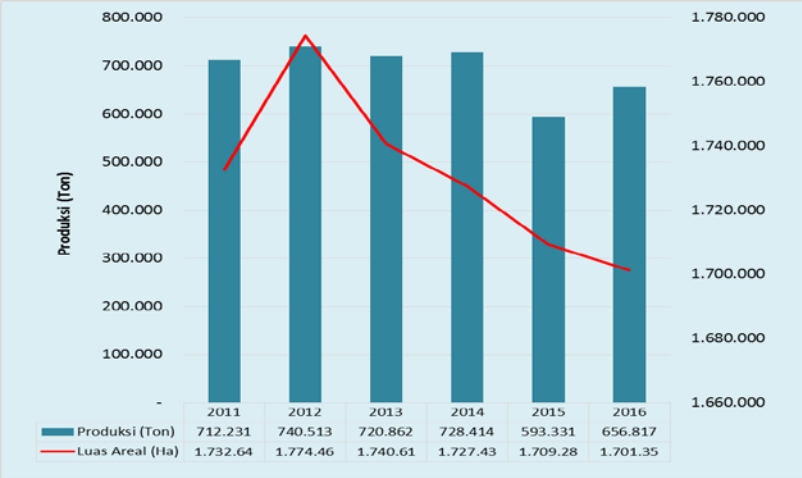

Gambar 43 Produksi dan Luas Areal Kakao Tahun 2011-2016

Produksi kakao dalam enam tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2015, namun, produksi kakao kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Luas areal kakao yang semakin menurun menjadi faktor utama produksi kakao sukar untuk meningkat. Meskipun dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan kakao seluas 203 ribu Ha dan teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (teknologi fermentasi biji kakao kering, teknologi pengendalian terpadu hama PBK dan penyakit busuk buah kakao), produksi dan produktivitas kakao di tahun 2016 dapat meningkat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 961 ribu ton, produksi tahun 2016 baru mencapai 68,37% sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kakao tahun 2016 antara lain:

1. **Intensifikasi Tanaman Kakao**

   Pengembangan tanaman kakao dapat dilakukan melalui intensifikasi. Intensifikasi ini dilakukan pada kebun-kebun kakao eks lokasi peremajaan dan rehabilitasi Gernas Kakao yang masih eksis. Pada tahun 2016 ini dilaksanakan intensifikasi tanaman kakao seluas 62.495 Ha di 66 Kabupaten yang terdapai di 17 Provinsi.

2. **Peremajaan Tanaman Kakao**

   Peremajaan kakao dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang tidak produktif di sentra pengmbangan kakao. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melakukan peremajaan tanaman kakao seluas 7350 Ha di 24 Kabupaten yang terdapat di 8 Provinsi.

3. **Perluasan Tanaman Kakao**

   Salah satu upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kakao berkelanjutan adalah melalui kegiatan perluasan tanaman kakao. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi syarat dan SDM yang memadai. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan perluasan tanaman kakao seluas 1420 Ha di 7 Provinsi.

4. **Pembangunan Kebun Induk Dan Entres**

   Dalam pengembangan kakao, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih kakao, keberadaan kebun induk dan entres benih kakao memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih kakao seluas 43 Ha yang tersebar di 11 Kabupaten.

5. **Kegiatan Pendukung Lainnya**

   Dalam peningkatan produksi kakao nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pengembangan desa kakao di 2 Kabupaten, intregasi tanaman kakao dan ternak di 8 kelompok tani, pelatihan penumbuhan kebersamaan 90 orang petani kakao, serta pelatihan penguatan kelembagaan terhadap 1.410 petani kakao.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kakao dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kakao Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Intensifikasi Tanaman Kakao	62.945	Ha	62.945	100	236.260.806.000	233.331.061.000	98,76
2	Peremajaan Tanaman Kakao	7.350	Ha	7.350	100	62.079.171.000	61.107.925.000	98,44
3	Perluasan Tanaman Kakao	1.520	Ha	1.420	93,42	16.578.247.000	11.731.389.000	70,76
4	Pembanguan Kebun Induk dan Entres	43	Ha	43	100	1.359.267.000	1.299.828.000	95,63
5	Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)					41.441.608.000	40.328.942.000	
	Pengawalan dan pendampingan tananan kako	101	Paket	101	100	13.421.920.000	12.955.727.000	96,53
	TKP dan PL-TKP	500	Org	500	100	10.084.490.000	9.936.390.000	98,53
	Penaggungjawab pelaksanaan kegiatan kakao	1.557		1.507	96,79	584.840.000	565.937.000	96,77
	Pengembangan desa kakao	1	Keg	1	100	787.514.000	785.174.000	99,70
	Integrasi tanaman kakao-ternak	8	KT	8	100	3.992.470.000	3.987.572.000	99,88
	Pengawalan dan pendampingan integrasi tanaman kakao-	4	Keg	4	100	307.910.000	276.921.000	89,94
	Operasional Substantion	4	Keg	4	100	1.283.032.000	1.178.374.000	91,84
	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kakao	1.464	Org	1.464	100	1.332.304.000	1.287.785.000	96,66
	Pelatihan penguatan kelembagaan petani kakao	90	Org	90	100	399.555.000	388.447.000	97,22
	Pelatihan penguatan kelembagaan lanjutan petani kakao	1.410	Org	1.410	100	9.044.273.000	8.763.342.000	96,89
	Pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani	1	Keg	1	100	44.200.000	44.173.000	99,94
	Peningkatan mutu kakao	1	Keg	1	100	159.100.000	159.100.000	100,00
6	Pengendalian OPT Kakao	2.610	Ha	2.610	100	5.784.455.000	5.685.749.000	98,29
7	SL-PHT Tan. Perkebunan (Kakao)	87	KT	87	100	4.819.078.000	4.309.329.000	89,42
8	Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan Kopi, Teh,	55	Keg	55	100	387.760.691.000	375.197.624.000	96,76
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian							0	
1.	Perakitan Varietas Unggul kakao produksi tinggi (Varietas)	1	varietas	1	100	180.000.000	140.031.300	77,80
2	Produk olahan komoditas strategis perkebunan (baseline) (formula)	1	formula	1	100	325.000.000	319.960.310	98,45
3	Benih sumber kakao (baseline) (batang)	250.000	batang	250.000	100	162.211.000	82.439.800	50,82
	Total					**756.750.534.000**	**733.534.278.410**	**96,93**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kakao dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu

1. Anomali iklim menyebabkan serangan hama dan penyakit tinggi, gugurnya bunga karena hujan dan angin. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kakao
2. Distabilitas harga menyebabkan petani kirang tertarik memelihara tanaman kakaonya secara intensif, rendahnya harga disebabkan antara lain kandungan lemak kakao Indonesia tinggi karena tidak difermentasikan atau difermentasi tetapi tidak sesuai standar dan harganya berbasis satuan berat serta lemahnya sistem pemasaran.
3. Inovasi teknologi belum optimal menyebabkan petani produktivitas rendah. Lemahnya penguasaan teknologi antara lain sistem budidaya belum optimal, kurang tersedianya benih unggul, lemahnya penguasaan pasca panen
4. Minimnya Industri pengolahan menyebabkan ketergantungan pasar internasional sebagai produsen produk kakao

5. Akses modal petani sangat lemah menyebabkan petani sering perangkap dengan ijon. Hal ini disebabkan juga oleh dukungan perbankan sangat lemah.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kakao ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 40.

Tabel 40. Rekomendasi akar permasalahan Kakao Tahun 2016

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Rendahnya produktivitas karena anomali iklim	1. Penanganan OPT secara intensif 2. Menanam benih unggul yang adaftif terhadap perubahan iklim
2	Harga yang tidak stabil dan cederung rendah	3. Memperbaiki sistem pemasaran dengan penguatan kelembagaan petani 4. Melakukan pasca panen antara lain fermentasi sesuai anjuran 5. Memanfaatkan peluang ekspor dengan penguatan kelembagaan petani
3	Lemahnya inovasi teknologi	6. Pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga teknis dilapangan dan petani untuk memperbaiki pola budidaya, pasca panen dan pemasaran 7. Penyediaan benih unggul yang adaptif
4	Minimnya industri pengolahan produk kakao	1. Pembinaan, pelatihan, Studi banding kepada kelompok tani 2. Mengundang investor untuk pengolahan produk kakao di Indonesia
5	Lemahnya Modal Petanai	1. Pembinaan, pengawalan suvervisi dan sosialisasi pemanfaatan bantuan pemerintah 2. Memanfaakan fasiliyas kredit yang di sediakan oleh perbankan dan lembaga lain 3. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan fasilias kredit kepada petani

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

SS 6. IKU 9 **Produksi Kelapa**	Target **3.355 ribu ton** Realisasi **2.890 ribu ton**	% Capaian **86,27%** **Berhasil**

Sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia adalah surga bagi pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari pulau Sumatera hingga Papua.

Luas perkebunan kelapa di Indonesia saat ini mencapai 3,53 juta hektar (Ha) yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 3,5 juta Ha; perkebunan milik pemerintah seluas 3 ribu Ha; serta milik swasta seluas 29 ribu Ha.

Dari segi produksi, capaian tahun 2016 ini sebesar 2.890 ribu ton atau 86,27% dari target yang ditetapkan (3.355 ribu ton), dalam kategori berhasil. Gambaran produksi dan luas areal kelapa tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 44.

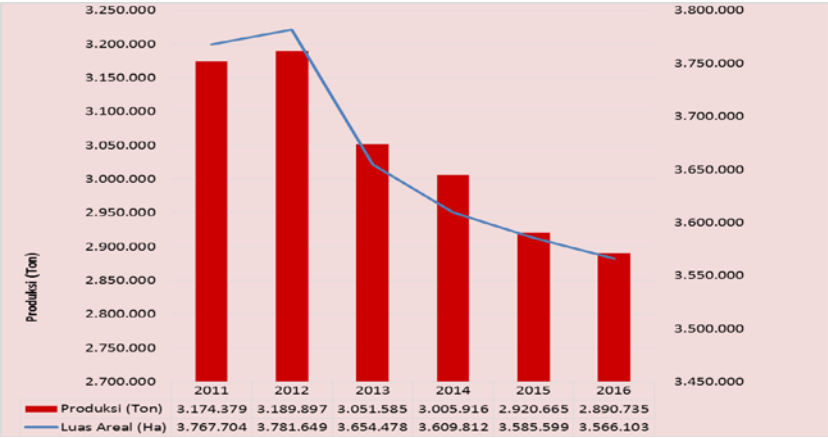

Gambar 44. Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2011-2016

Produksi kelapa dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan, sempat mencapai produksi tertinggi tahun 2012 sebanyak 3.189 ribu ton, produksi kelapa terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 2.890 ribu ton di tahun 2016. Penurunan produksi kelapa

sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kelapa yang terus berkurang selama lima tahun kebelakang. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan di di tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 3.491 ribu ton, produksi tahun 2016 baru mencapai 82,78% sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa tahun 2016 antara lain:

1. **Peremajaan Tanaman Kelapa**
   Peremajaan tanaman kelapa dilakukan jika tanaman kelapa telah berumur tua (> 60 tahun) dan dapat juga dilakukan pada pohon kelapa yang berumur < 60 tahun jika tanaman tidak produktif atau produksi < 30 butir/pohon/tahun. Pada tahun 2016 telah dilakukan peremajaan tanaman kelapa seluas 9630 Ha di 39 Kabupaten pada 12 Provinsi.

2. **Perluasan Tanaman Kelapa**
   Salah satu upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kelapa adalah melalui kegiatan perluasan tanaman. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi syarat dan SDM yang memadai. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan perluasan tanaman kelapa seluas 3.750 Ha di 19 Kabupaten pada 7 Provinsi.

3. **Pembangunan Kebun Sumber Benih**
   Dalam pengembangan kelapa, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih kelapa, keberadaan kebun sumber benih kelapa memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih kelapa seluas 232 Ha di 19 Kabupaten pada 7 Provinsi.

4. **Kegiatan Pendukung Lainnya**
   Dalam peningkatan produksi kelapa nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan,

pelatihan penumbuhan kebersamaan 626 orang petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan terhadap 1.410 petani kakao di 4 Kabupaten terpilih.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kelapa dapat dilihat pada table 41.

Tabel 41. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Tahun 2016

Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
	Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
ram Ditjen Perkebunan							
Peremajaan Tanaman Kelapa	9.630	Ha	9.630	100	34.468.876.000	32.259.864.000	93,59
Perluasan Tanaman Kelapa	3.750	Ha	3.750	100	13.321.302.000	12.759.484.000	95,78
Pembangunan Kebun Sumber Benih Kelapa	232	Ha	232	100	3.028.246.000	2.514.574.000	83,04
Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)				100	7.931.502.000	7.265.107.000	91,60
Pengawalan peremajaan tanaman karet	61	Keg	61	100	3.426.225.000	2.902.245.000	84,71
Pelatihan penumbuhan keberhasilan kebersamaan petani kelapa	626	Org	626	100	581.090.000	562.042.000	96,72
Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan kelembagaan petani kelapa	4	Keg	4	100	188.500.000	152.813.000	81,07
Pengawalan perluasan kelapa	24	Keg	24	100	3.735.687.000	3.648.007.000	97,65
Total					**58.749.926.000**	**54.799.029.000**	**93,28**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kelapa dikelompokkan kedalam 3 domain permasalahan, yaitu areal pertanaman, harga produk, dan perbenihan.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kelapa ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 42.

Tabel 42. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Kelapa

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	Luas areal dan tanaman menghasilkan yang semakin berkurang	Percepatan dan peningkatan peremajaan
2.	Harga jual kelapa butir masih dibawah unit cost petani sehingga petani enggan untuk memanen produknya	Koordinasi dengan stake holder terkait untuk mengoptimalkan peran industri pengolahan
3.	Ketersediaan benih perlu dilakukan evaluasi ulang	Percepatan penilaian ulang terhadap Kebun Sumber Benih (Induk/Blok)

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

SS 6. IKU 10 **Produksi Teh**	Target **160 ribu ton** Realisasi **144 ribu ton**	% Capaian **90%** **Berhasil**

Produksi teh saat ini mencapai 144 ribu ton yang menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketujuh dunia. Produksi teh di tahun 2016 ini meningkat 11 ribu ton (2,07%) dibanding produksi tahun 2015. Meskipun demikian, produksi teh di tahun 2016 ini belum dapat mencapai target yaitu sebesar 160 ribu ton biji kering (90%) atau dalam kategori berhasil. Gambaran produksi dan luas areal teh tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 45 .

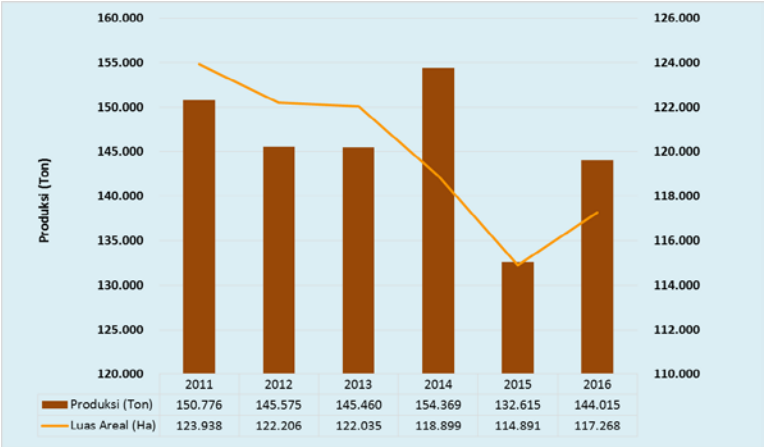

Gambar 45. Produksi dan Luas Areal Teh Tahun 2011-2016

Produksi teh dalam enam tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan di tahun 2012-2013 dan meningkat di tahun 2014, pada tahun 2015 produksi teh menurun, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Luas areal teh yang semakin menurun karena alih fungsi lahan, menjadi faktor utama produksi teh sukar untuk meningkat. Meskipun dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan teh seluas 2 ribu Ha produksi dan produktivitas kakao di tahun 2016 dapat meningkat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 163 ribu ton, produksi tahun 2016 baru mencapai 88,34% sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi teh tahun 2016 antara lain:

1. Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Teh

Intensifikasi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk meningkatkan keragaam pertanaman dan pengutuhan kawasan teh. Selain itu kegiatan ini juga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu teh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan intensifikasi seluas 2.245 Ha dan rehabilitasi tanaman teh seluas 650 Ha di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi.

2. Kegiatan pendukung lainnya

Dalam peningkatan produksi teh nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kelapa dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Teh Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Intensifikasi Tanaman Teh	2.245	Ha	2.245	100	3.792.800.000	3.231.737.000	85,21
2	Rehabilitasi Tanaman Teh	650	Ha	650	100	10.227.761.000	10.127.750.000	99,02
3	Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)					1.908.632.000	1.541.751.000	80,78
	Pengawalan dan pendampingan tanaman teh	15	Paket	15	100	1.482.632.000	1.184.540.000	79,89
	Operasional Pendamping Teh	2	OB	2	100	426.000.000	357.211.000	83,85
	Total					**17.837.825.000**	**16.442.989.000**	**92,18**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi teh dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu

1. Inovasi teknologi belum optimal menyebabkan produktivitas tidak meningkat

2. Harga kurang menarik menyebabkan petani kurang antusias dalam pengembangan teh. Hal ini disebabkan rantai pemasaran yang belum mendukung produsen.
3. Industri hilir belum maksimal, menyebabkan ketergant7ngan petani pada pedagang pengepul atau perusahaan pengolahan teh.
4. Lemahnya Akses modal, menyebabkan petani mengikuti sistem ijon
5. SDM masih belum Optimal, mengakibatkan lemahnya penguasaan teknologi terbarukan

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi teh ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 44.

Tabel 44. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Teh

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Produktivitas tidak meningkat	1. Perbaikan sistem budidaya (Rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi) 2. Perbaikan pasca panen
2	Harga cenderung turun	3. Memperbaiki sistem pemasaran 4. Memperkuat kelmbagaan petani untuk pemasaran
3	Industri pengolahan masih kurang	5. Melatih petani untuk meningkatkan nilai tambah melalui pasca panen dan pengolahan produk teh
4	Lemahnya dukungan permodalan petani	6. Fasitasi anggaran untuk perbaikin mutu tanaman 7. Dukungan perbankan dan lembaga permodalan lainnya
5	SDM masih lemah	8. Pembinaan dan Pelatihan petugas lapangan 9. Pembinaan dan Pelatihan petani 10. Koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan teh dengan perusahaan

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

SS 6. IKU 11 **Produksi Daging Kambing dan Domba**	Target **117 ribu ton** Realisasi **114,9 ribu ton**	% Capaian **98,2%** **Berhasil**

Ternak kambing dan domba merupakan ternak ruminansia kecil yang porsinya paling besar dipelihara di Indonesia dan umumnya dipelihara oleh peternak kecil. Keunggulan ternak tersebut antara lain: (1) membutuhkan modal yang relatif kecil; (2) mudah pemeliharaannya; (3) banyak digunakan untuk berbagai acara baik acara kekeluargaan seperti syukuran maupun acara yang berhubungan dengan ritual keagamaan dan budaya seperti hewan kurban pada hari raya kurban, khitanan, dan aqeqah; dan (4) mudah dijual ketika membutuhkan uang kontan secara cepat.

Daging kambing dan domba merupakan pangan hewani alternatif selain daging sapi. Dengan tingginya harga daging sapi di pasar, maka mengkonsumsi daging kambing dan domba dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan. Produksi daging kambing dan domba tahun 2016 belum memenuhi target tahunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Dari target 117 ribu ton karkas 114,9 ribu ton (98,20%) atau dapat dikatakan berhasil.

Dibandingkan target produksi daging kambing dan domba di tahun 2019 sebesar 125 ribu ton, capaian produksi di tahun 2016 baru mencapai 92,92%. Untuk itu, kinerja pada tahun 2016 harus ditingkatkan agar target tersebut dapat terlampaui .

Pencapaian kinerja produksi daging kambing dan kerbau juga dipengaruhi oleh populasi kambing dan domba yang dapat dijabarkan pada Gambar 46.

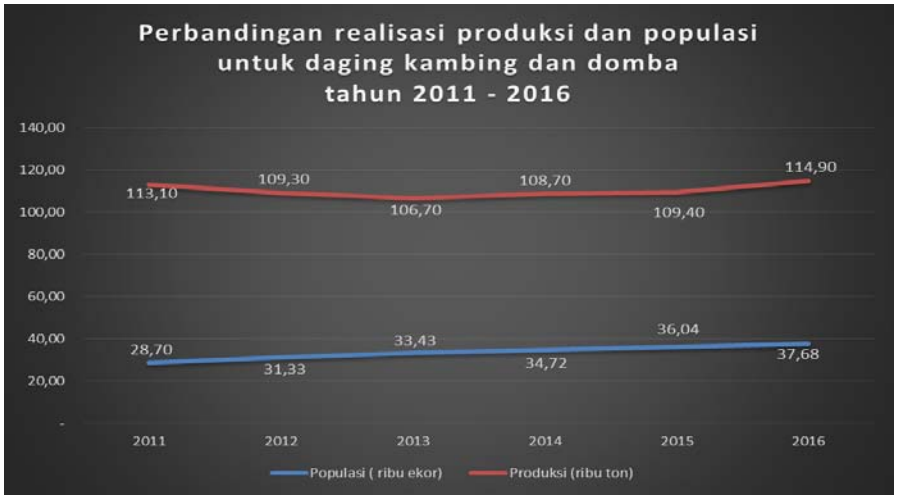

Gambar 46. Produksi dan Populasi Daging Kambing dan Domba Tahun 2011-2016

Perkembangan populasi kambing dan domba meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2011 populasi kambing dan domba 28,7 ribu ekor mengalami peningkatan secara konsisten hingga menjadi 37,68 ribu ekor pada tahun 2016.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi daging kambing dan domba di tahun 2016 antara lain: peningkatan kualitas bibit unggul kambing sebanyak 1229 ekor, penguatan pembibitan kambing dan domba di kabupaten/kota terpilih, serta pengembangan budidaya kambing dan domba di 65 kelompok.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi daging kambing dan domba yaitu pemotongan kambing muda (umur dibawah 5 bulan) yang cukup tinggi untuk konsumsi, dan tingginya pemotongan kambing betina produktif.

Berdasarkan akar permasalahan tidak tercapainya produksi daging kambing dan domba ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 45.

Tabel 45. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Daging Kambing dan Domba

No.	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	Ada kecenderungan meningkatnya permintaan pada daging kambing muda untuk konsumsi sehingga banyak kambing muda umur dibawah 5 bulan dipotong	Pengembangan sentra-sentra ternak kambing dan domba
2.	Tinggi pemotongan betina produktif	Penanganan pemotongan betina produktif

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing pada Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp. 991.771.948.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp.941.930.598.563,- atau capaiannya sebesar 94,97%.

Sasaran Strategis 7 (SS 7)
TERSEDIANYA BAHAN BAKU BIO INDUSTRI DAN BIO ENERGI

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BioFuel) sebagai bahan bakar lain, Presiden menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati diantaranya mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya.

Hal itulah yang melatarbelakangi pemilihan sasaran strategis Kementerian Pertanian yang ketujuh yaitu Tersedianya Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi. Sebagai indikator bagi pencapaian sasaran strategis ini adalah produksi kelapa sawit. Saat ini kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang potensial sebagai penghasil bioenergi. Indonesia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit sebagai Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi.

Sasaran strategis nomor tujuh memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu produksi kelapa sawit.

SS 7. IKU 1 **Produksi Kelapa Sawit**	Target **30.845 ribu ton CPO** Realisasi **32.524 ribu ton CPO**	% Capaian **105,44%** **Sangat Berhasil**

Pada tahun 2016, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 32.524 ribu ton CPO atau 105,44% dari target 30.845 ribu ton CPO, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Capaian produksi kelapa sawit tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja produksi tahun 2015, yaitu sebesar 1.454 ribu ton CPO atau 4,68% dan merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 6 tahun terakhir. Capaian produksi dan luas areal kelapa sawit 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 47.

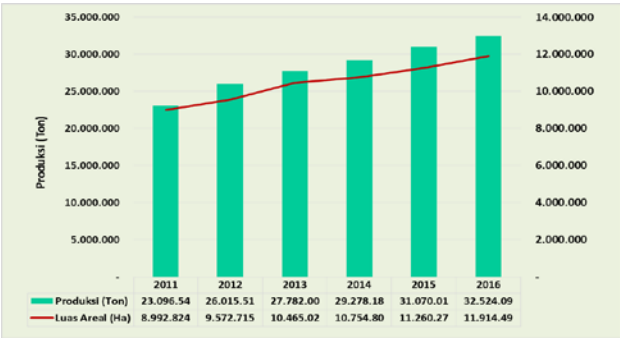

Gambar 47. Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2011-2016.

Gambar 45 memperlihatkan bahwa produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan peningkatan luas areal kelapa sawit. Sempat terkena dampak fenomena El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu, produksi komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan karena ditopang oleh produksi sekitar 1 juta hektar tanaman sawit muda yang tahun ini mulai menghasilkan.

Dibandingkan target produksi kelapa sawit di akhir periode pembangunan jangka menengah tahun 2019 sebesar 36.420 ribu ton CPO, capaian

produksi kelapa sawit di tahun 2016 sudah mencapai 89,30%. Dengan capaian produksi kelapa sawit tahun 2016 yang melebihi dari target tahun 2016, bisa dikatakan bahwa target produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2016 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target indikator Produksi kelapa sawit antara lain perluasan areal seluas 820 Ha, pendampingan dan pengawalan, serta pengembangan kelembagaan usaha tani sawit. Kegiatan pendukung pencapaian produksi sawit dapat dilihat di tabel 46.

Tabel 46. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Sawit Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Perluasan Tanaman Kelapa Sawit	820	Ha	820	100	11.912.956.000	11.707.751.000	98,28
2	Kegiatan Pendukung Lainnya (Satuan)					11.252.352.000	9.492.834.000	84,36
	Operasinal TKP dan PL-TKP untuk K. sawit, Kakao dan Karet	343	Ha	343	100	7.631.560.000	6.675.255.000	87,47
	Pembinaan dan Pengawalan program revitalisasi perkebunan (K. sawit, Kakao dan Karet)	75	Keg	75	100	1.407.660.000	1.146.818.000	81,47
	Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan	13	Keg	10	77	955.727.000	538.837.000	56,38
	Pengawalan Perluasan Kelapa Sawit	7	Keg	7	100	526.305.000	412.247.000	78,33
	Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Petani Kelapa Sawit	175	Org	175	100	208.000.000	207.000.000	99,52
	Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS	14	Keg	14	100	523.100.000	512.677.000	98,01
3	Fasilitasi, pembinaan dan pengawalan kegiatan di Pusat	5	Keg	5	100	925.965.000	925.965.000	100,00
	Total					**24.091.273.000**	**22.126.550.000**	**91,84**

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Bahan Baku Bio Industri Dan Bio Energi pada Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp 24.091.273.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 22.126.550.000,- atau capaiannya sebesar 91,84%.

Sasaran Strategis 8 (SS 8)
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA INSANI PETANI

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang nomor delapan adalah Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola fikir petani agar mau meningkatkan usahataninya sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Capaian Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya diukur melalui jumlah kelompok tani pada kelas lanjut, madya, dan utama, dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani.

Sasaran strategis nomor delapan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

SS 8. IKU 1 **Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya**	Target **22%** Realisasi **25,60%**	% Capaian **116,36%** **Sangat Berhasil**

Capaian Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya tahun 2016 adalah 25,60% atau 116,36% dari target 22%, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Capaian tahun 2016 ini lebih tinggi dari capaian tahun 2015 sebesar 16,86% dan tahun 2014 sebesar 24,97%. Dengan capaian tahun 2016 tersebut, maka target periode akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 25% telah tercapai Tabel 47.

Tabel 47. Perkembangan Kelas Kemampuan Kelompok Kelompoktani Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Kelas Kemampuan Kelompoktani					Jumlah Poktan	Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya (%)
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Diketahui		
2014	224.816	50.594	14.959	14.959	26.552	322.390	24,97
2015	119.081	64.784	12.596	1.269	268.696	466.426	16,86
2016	230.231	113.723	20.490	2.094	165.945	532.483	25,60

Sumber: BPPSDMP, 2016

Upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui:

1. **Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)**

   Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah: meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/ gapoktan); meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah; dan meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

   Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian mengalokasikan kegiatan Penumbuhan KEP dengan target 940 kelompok tani dan tercapai 764 kelompok tani. Sedangkan kegiatan Pengembangan KEP tercapai 214 kelompok tani dari target 280 kelompok tani.

2. **Pengawalan dan Pendampingan di Lokasi Sentra**

   Pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi komoditas strategis pertanian merupakan kegiatan untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi dilaksanakan di WKPP. Pola pembelajaran dalam meningkatkan keberdayaan petani dilakukan melalui kursus tani, fasilitasi bahan pembelajaran, serta rembug tani (Gambar 48).

Gambar 48. Suasana Rembug Tani di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Kegiatan pendukung pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan tani dapat dilihat di tabel 48.

Tabel 48. Kegiatan Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program BPPSDMP								
1.	**Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (UNIT) :**	**21.220**				**82.982.150.000**	**77.305.241.800**	**93,16**
a	Penumbuh Kelembagaan Ekonomi Petani (Kelompok)	940	Kelompok	764	81,28			
b	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (Kelompok)	280	Kelompok	214	76,43			
c	Pengawalan dan Pendampingan Lokasi Sentra (Kursus Tani, Desa, Rembug Tani, Kunjungan Penyuluh) (WKPP)	20.000	WKPP	20.000	100			
	TOTAL					**82.982.150.000**	**77.305.241.800**	**93,16**

Sumber: BPPSDMP, 2016

Total anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani adalah sebesar Rp 82.982.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 77.305.241.800,- (93,16%).

Sasaran Strategis 9 (SS 9)
MENINGKATNYA PENDAPATAN KELUARGA PETANI

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan per kapita petani. Pendapatan petani diukur melalui perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian.

Sasaran Strategis nomor sembilan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu perbandingan antara PDB Pertanian dalam arti sempit dengan jumlah tenaga kerja pertanian.

SS 9. IKU 1 **Perbandingan PDB Pertanian Sempit dengan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian**	Target **Rp 26 Juta/Orang** Realisasi **Rp 26,6 Juta/Orang**	% Capaian **102,54%** **Sangat Berhasil**

Capaian indikator perbandingan PDB Pertanian dengan jumlah tenaga kerja pertanian adalah Rp 26,6 juta/orang atau 102,54% dari target Rp 26 juta/orang, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Perkembangan pendapatan keluarga petani selama periode 2011-2016 ditunjukkan oleh Gambar 49.

Gambar 49. Perkembangan Pendapatan petani Tahun 2011-2016.

Gambar 49 memperlihatkan bahwa pendapatan petani selama jangka waktu 2011 hingga 2016 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, PDB pertanian sempit dibanding total tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp 21.361.220,- per orang per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp 26.659.629,-. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Peningkatan pendapatan petani dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditas pertanian dan kestabilan harga dari komoditas pertanian tersebut. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan dan didukung dengan harga tinggi yang diterima petani, maka pendapatan petani akan semakin tinggi pula. Hampir seluruh komoditas pertanian meningkat produksinya pada tahun 2016 ini. Kementerian Pertanian juga turut menjaga kestabilan

harga pangan melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, serah gabah petani, dan pembatasan impor sehingga petani mendapatkan harga jual yang layak.

Secara lebih jelas perbandingan antara PDB sektor pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dapat dilihat pada Gambar 50.

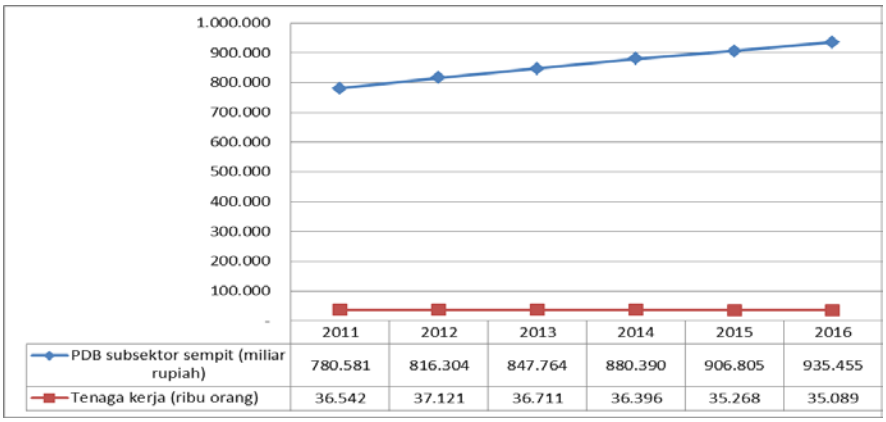

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDB subsektor sempit (miliar rupiah)	780.581	816.304	847.764	880.390	906.805	935.455
Tenaga kerja (ribu orang)	36.542	37.121	36.711	36.396	35.268	35.089

Gambar 50. Perkembangan PDB Sektor Pertanian Sempit dan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2011-2016

PDB sektor pertanian sempit mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp 780.581 Miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 935.455 Miliar pada tahun 2016, sedangkan jumlah penduduk sektor pertanian mengalami tren penurunan dari 36,54 juta orang pada tahun 2011 menjadi 35,09 juta orang pada tahun 2016. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir pendapatan petani mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya PDB sektor pertanian sempit. Namun di lain sisi, jumlah tenaga kerja sektor pertanian justru mengalami penurunan, dimana jika hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat berdampak terhadap PDB sektor pertanian sempit di masa yang akan datang.

Di samping sebagai hasil atau dampak dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target sukses lainnya (peningkatan produksi pangan utama, terjaminnya diversifikasi pangan, meningkatnya akses pemanfaatan pangan dan gizi, konsumsi pangan lokal, kestabilan produksi cabai dan bawang merah, berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, tersedianya bahan baku bioindustri, dan

meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani), ada beberapa kegiatan Kementerian Pertanian yang secara langsung ditujukan dalam rangka pemberdayaan petani melalui:

1. **Kawasan Mandiri Pangan**

   Pada tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan pada 192 kawasan di 145 Kabupaten/Kota pada 31 Provinsi yang terdiri dari 107 Kawasan Kepulauan Perbatasan Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua-Papua Barat; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; dan (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan.

2. **Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara.**

   Kegiatan tersebut antara lain Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender, serta kegiatan rumah tangga yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran. Program SOLID dilaksanakan di 224 desa dan dirasakan manfaatnya oleh 217 desa atau 92.72 %. yang terdiri dari 33.600 KK (100 % dari target sasaran 33.600 KK) dan tergabung kedalam 26.363 Kelompok Mandiri (KM) (98 % dari target sasaran 26.880 KM). Berdasarkan hasil survey tahun 2016. peningkatan hasil produksi pertanian dialami oleh hampir semua responden SOLID. Peningkatan produksi pertanian responden tersebut terjadi pada hampir semua komoditi/produk yang diusahakan, kecuali produk olahan pala (Gambar 51).

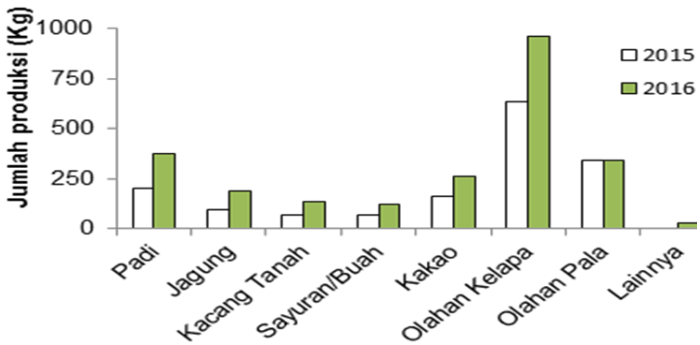

Gambar 51. Produksi rata-rata per responden pada tahun 2015 dan 2016

Selain terjadi peningkatan produksinya, 59% responden menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani dapat dilihat pada gambar 49

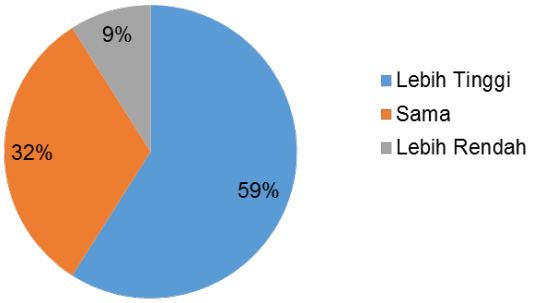

Gambar 52. Dampak Peningkatan Pendapatan Kelompok SOLID dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (UPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI) di 493 Gapoktan.

Toko Tani Indonesia (TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015. berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu: (1) menyerap produk pertanian. (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran. dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat.

4. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian. Tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan. Sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok. Pada tahun 2016 untuk tahap penumbuhan tidak dilaksanakan karena alokasi DAK bidang Pertanian diperuntukkan untuk pembangunan gudang cadangan pemerintah. dan pembelian RMU serta pembangunan lantai jemur untuk lumbung yang belum mempunyai lantai jemur. Tahap pengembangan sebanyak 54 kelompok yang tersebar di 4 provinsi.

5. Asuransi Usahata Tani Pertanian.

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahataninya.

6. Asuransi Ternak Sapi

Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali petani/peternak untuk melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi.

Kegiatan pendukung pencapaian pendapatan keluarga petani dapat dilihat di tabel 49.

Tabel 49. Kegiatan Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Target	Satuan	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program BKP								
1	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (kawasan)	190	Kawasan	181	95,26	26.357.672.000	24.632.104.533	93,45
2	Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran (KK) di Maluku dan Maluku Utara	26.880	KK	26363	98,08	127.753.050.000	121.034.192.549	94,74
3	Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender (KK) di Maluku dan Maluku Utara	33.600	KK	33600	100	19.588.600.000	18.681.073.000	95,37
4	Pengembangan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan (Desa) di Maluku dan Maluku Utara	224	Desa	217	96,88	4.953.150.000	4.712.413.000	95,14
5	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) (Gapoktan)	500/1000	Gap/Toko	493/1320	98,6/132	144.860.639.000	138.077.008.024	95,32
6	Lumbung Pangan Masyarakat/LPM Unit Lumbung)	54	Unit	51	94,44	1.463.175.000	1.420.100.300	97,06
Program PSP								
1	Asuransi Usaha Tani	400.000	Ha	400.000	100	57.600.000.000	57.599.989.830	100
2	Asuransi Ternak	20.000	ekor	20.000	100	3.200.000.000	3.200.000.000	100
	Total					382.576.286.000	366.156.881.236	95,71

Sumber: BKP, Ditjen PSP, 2016

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran startegis peningkatan pendapatan petani, pada Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp 382.576.286.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 366.156.881.236,- atau capaiannya sebesar 95,71%.

Sasaran Strategis 10 (SS 10)
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan, Kementerian Pertanian melakukan survei masyarakat untuk melihat penilian masyarakat terhadap layanan publik yang diterima (*perceived benefit*) dari Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali.

Sasaran Strategis nomor sepuluh ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kementerian Pertanian.

SS 10. IKU 1	Target	% Capaian
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kementerian Pertanian	**81** Realisasi **82,72**	**102,12%** **Sangat Berhasil**

Target indikator kinerja IKM tahun 2016 adalah sebesar 81 dengan realisasi sebesar 82,72. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 102.12% atau melebihi IKM yang ditargetkan pada tahun 2016, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Tercapainya target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan

beberapa program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian telah berjalan secara efektif dan efisien.

Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2015 konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80. Pada tahun 2016 target ditingkatkan menjadi 81 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut.

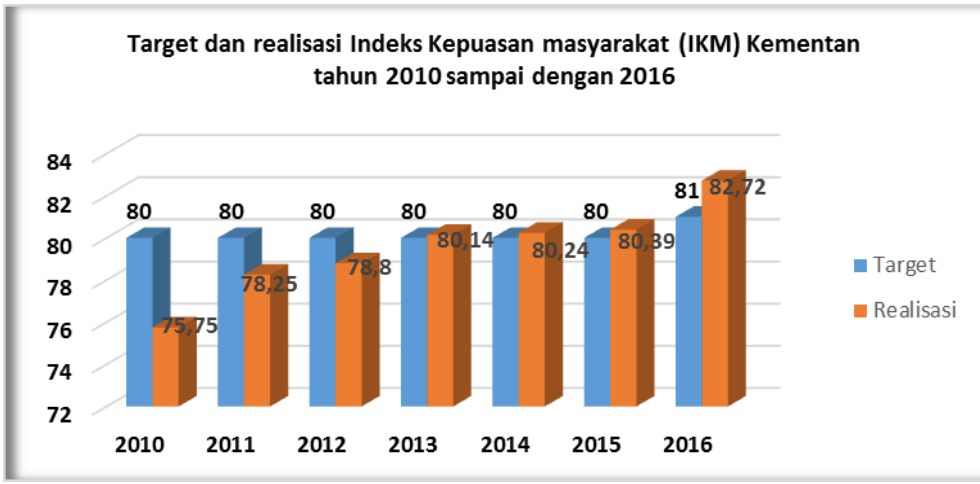

Gambar 53.Target dan Realisasi IKM Kementerian Pertanian
Tahun 2010-2016

Pada gambar 53. diatas terlihat bahwa realisasi nilai IKM yang melebihi target dapat tercapai mulai tahun 2013. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.

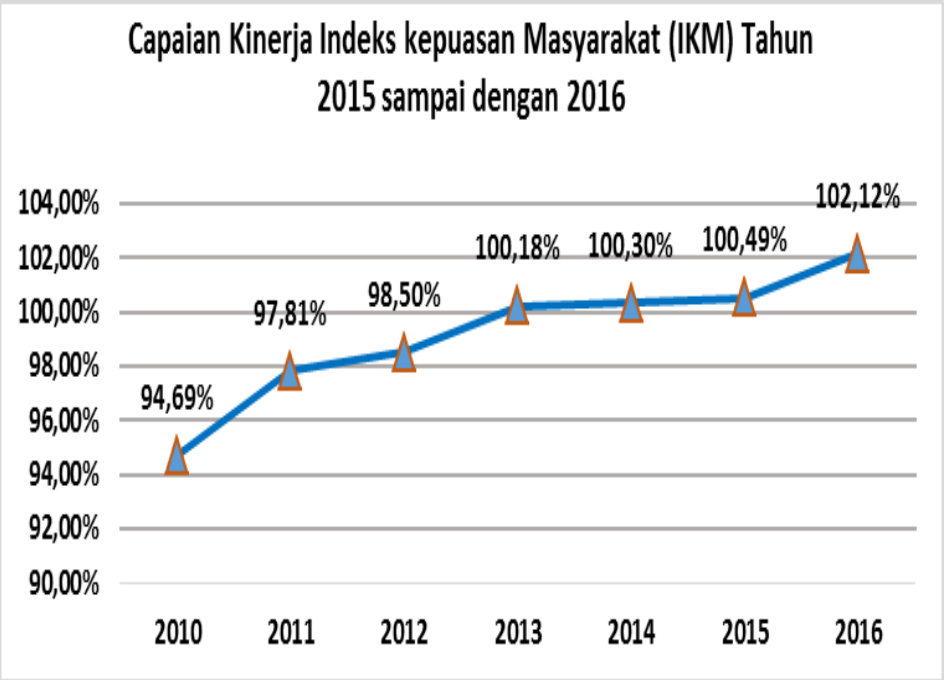

Gambar 54. Tren Capaian Kinerja Nilai IKM Kementerian Pertanian 7 (tujuh) Tahun Terakhir

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan tren perkembangan positif selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Capaian indikator IKM pada tahun 2010 sebesar 94,69% meningkat hingga 102.12% pada tahun 2016.Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2016 ini telah mencapai 98.48%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan.

Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kementerian Pertanian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013. Unsur – unsur pengukuran IKM tersebut dapat dilihat pada tabel 49.

Tabel 49. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 dan Tahun 2015

No.	UNSUR PELAYANAN	2016								2015	% Kenaikan (Penurunan)
		NILAI IKM SETJEN	NILAI IKM DITJEN TP	NILAI IKM DITJEN BUN	NILAI IKM DITJEN PKH	NILAI IKM BADAN LITBANG	NILAI IKM BPSDMP	NILAI IKM BARANTAN	NILAI IKM KEMENTAN	NILAI IKM KEMENTAN	
1	Prosedur pelayanan (U1)	3,14	3,47	3,37	3,27	3,28	3,23	3,33	3,30	3,03	8,96%
2	Persyaratan Pelayanan (U2)	3,15	3,44	3,30	3,28	3,26	3,12	3,34	3,27	3,20	2,06%
3	Kejelasan pelaksana pelayanan (U3)	2,90	3,50	3,32	3,27	3,03	3,26	3,36	3,23	3,21	0,72%
4	Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4)	2,95	3,49	3,29	3,27	3,12	3,28	3,34	3,25	3,19	2,03%
5	Tanggung jawab pelaksana pelayanan (U5)	3,28	3,49	3,36	3,29	3,40	3,30	3,38	3,36	3,21	4,54%
6	Kemampuan pelaksana pelayanan (U6)	3,12	3,60	3,39	3,33	3,23	3,21	3,37	3,32	3,27	1,50%
7	Kecepatan pelayanan (U7)	3,43	3,25	3,32	3,19	3,66	3,27	3,28	3,34	3,08	8,47%
8	Keadilan mendapatkan pelayanan (U8)	3,16	3,53	3,76	3,45	3,30	3,44	3,48	3,45	3,38	2,22%
9	Kesopanan dan keramahan pelaksana (U9)	3,11	3,69	3,40	3,43	3,23	3,35	3,41	3,37	3,33	1,13%
10	Kewajaran biaya pelayanan (U10)	2,95	3,46	3,32	3,32	3,02	3,27	3,37	3,25	3,25	0,00%
11	Kepastian biaya pelayanan (U11)	3,40	3,74	3,31	3,33	3,45	3,26	3,44	3,42	3,30	3,57%
12	Kepastian jadwal pelayanan (U12)	3,21	3,57	3,35	3,26	3,47	3,28	3,39	3,36	3,15	6,79%
13	Kenyamanan lingkungan (U13)	3,03	3,60	3,38	3,35	3,07	3,34	3,37	3,31	3,27	1,24%
14	Keamanan Pelayanan (U14)	3,27	3,53	3,42	3,38	3,30	3,36	3,40	3,38	3,32	1,83%
15	**NILAI IKM**	3,13	3,35	3,36	3,29	3,25	3,26	3,35	3,31	3,22	2,94%
16	**NILAI KONVERSI IKM**	78,29	83,75	83,92	82,33	81,32	81,53	83,88	**82,72**	**80,39**	**2,90%**
17	**MUTU PELAYANAN**	B Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik	A Sangat Baik	**A Sangat Baik**	**B Baik**	
18	Jumlah UKPP/UPT yang melakukan pengukuran IKM	2 UKPP	3 UPT	4 UPT	1 UKPP dan 23 UPT	6 UKPP dan 59 UPT	19 UPT	52 UPT	9 UKPP dan 160 UPT	9 UKPP dan 160 UPT	

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2016

Pengukuran IKM dilakukan terhadap **9 Unit Kerja Pelayanan Publik dan 160 Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian** dengan jenis layanan sebagai berikut:

(1) Sekretariat Jenderal, meliputi 2 unit kerja yang melakukan pelayanan publik yaitu:

a. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PPVTP) dengan jenis pelayanan: Pemberian Hak PVT, Pendaftaran Varietas Tanaman, Pendaftaran Varietas Hortikultura, Pendaftaran Pupuk, Pendaftaran Pestisida, Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, Pemasukan/ Pengeluaran Benih Hortikultura, Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman, Pendaftaran Pakan Ternak, Izin Usaha Obat Hewan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya,

Pemasukan/Pengeluaran Benih/Bibit Ternak, Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, dan Pemasukan/Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (Gambar 55).

Gambar 55. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP

b. Biro Humas dan Informasi Publik dengan jenis pelayanan penyebarluasan informasi mengenai pembangunan pertanian kepada masyarakat/publik. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pemberitaan di media cetak, online, dan televisi serta partisipasi dalam pameran.

(2) Ditjen Tanaman Pangan, meliputi 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pelayanan publik yaitu:

a. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), dengan tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
b. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH), dengan tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknispengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangandan hortikultura.
c. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), dengan tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

(3) Ditjen Perkebunan, meliputi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pelayanan publik yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kalimantan Barat.

Keempat UPT tersebut melakukan pelayanan utama kepada petani, mahasiswa, produsen benih, dan instansi terkait berupa: Sertifikasi kebun induk, Seleksi pohon induk, Sertifikasi kebun entres, Sertifikasi kebun penangkaran, Sertifikasi bibit, Pengujian mutu benih, Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati, dan Pemesanan APH

(4) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), meliputi 1 UKPP dan 23 UPT, yaitu:

a. Subbag Layanan Rekomendasi, Ditjen PKH yang memberikan 15 layanan rekomendasi berupa benih dan/atau bibit ternak, pemasukan benih/bibit HPT, pendaftaran pakan, bahan pakan asal tumbuhan, bahan pakan asal hewan, obat hewan, izin usaha obat hewan, hewan kesayangan, sapi bakalan, sapi indukan, sapi potong, karkas, daging, jerohan, dan/atau olahannya, susu, kulit dan bulu, telur dan madu, produk hewan non pangan, dan pakan hewan kesayangan
b. 1 Pusat Veteriner Masyarakat di Surabaya, 3 Balai Besar Veteriner di Wates, Maros, dan Denpasar, serta 4 Balai Veteriner di Medan, Bukittinggi, Lampung, dan Banjarbaru. Kedelapan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) tersebut melaksanakan tugas melakukan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.
c. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan BIB Lembang, dengan tugas memproduksi semen beku dari sembilan bangsa sapi (Limousine, Simental, Aberdeen Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Bali dan Friesien Holstein) dan dua bangsa kambing (Peranakan Ettawa dan Boer).
d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Baturaden, Indrapuri, Siborongborong, Padang Mangatas, Sembawa, Pelaihari, dan Denpasar. Ketujuh UKPP tersebut melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan,

pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/ bibit hijauan pakan ternak.

e. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur melaksanakan tugas pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat

f. Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dengan tugas memproduksi, mengembangkan, dan mendistribusikan embrio ternak, dalam rangka penyediaanbenih dan bibit ternak unggul.

g. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan, dan mutu produk hewan.

h. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan.

(5) Badan Litbang Pertanian, meliputi 6 UKPP dan 59 UPT yang melakukan pelayanan publik, antara lain:

1	Balai Pengelola Alih Teknologi, Bogor
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
3	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi
4	Balai Penelitian Kacang-Kangan dan Umbi Umbian, Malang
5	Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros
6	Loka Penelitian Penyakit Tungro, Lanrang
7	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
8	Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang
9	Balai Penelitian Buah Tropika, Solok
10	Balai Penelitian Tanaman Hias, Segunung
11	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang
12	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
13	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor
14	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Malang
15	Balai Penelitian Tanaman Palma, Manado
16	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
17	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
18	Balai Besar Litbang Veteriner Bogor
19	Balai Penelitian Ternak, Ciawi
20	Loka Penelitian Sapi Potong, Grati
21	Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih
22	Pusat Anailis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
23	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
24	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
25	Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
26	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru
27	Balai Penelitian Tanah, Bogor
28	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor
29	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jakenan
30	Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
31	Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian

32	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
33	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh
34	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
35	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
36	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
37	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi
38	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung
39	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
40	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
41	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
42	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
43	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta
44	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
45	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
46	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DI Yogyakarta
47	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
48	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
49	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
50	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur
51	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
52	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah
53	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan
54	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur
55	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara
56	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo
57	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
58	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
59	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
60	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
61	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
62	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
63	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
64	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
65	Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau

Keenam puluh lima UKPP dan UPT tersebut melaksanakan tugas antara lain : melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian serta penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

(6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), meliputi 19 UKPP yaitu:

1. STPP Medan	11. BBPP Batu
2. STPP Bogor	12. BBPP Binuang
3. STPP Magelang	13. BBPP Batangkaluku
4. STPP Malang	14. BBPP Kupang
5. STPP Gowa	15. BPP Jambi
6. STPP Manokwari	16. BPP Lampung
7. PPMKP Ciawi	17. SMK-PP Negeri Sembawa
8. BBPP Lembang	18. SMK-PP Negeri Banjarbaru
9. BBPKH Cinagara	19. SMK-PP Negeri Kupang
10. BBPP Ketindan	

19 UPT tersebut melakukan layanan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian mahasiswa, pengabdian masyarakat dan penggunaan sarana dan prasarana pertanian kepada penyuluh pertanian, petani/kelompok tani, siswa SMK-PP/STPP, serta alumni.

(7) Badan Karantina Pertanian, meliputi 52 UPT, yaitu

1	BBKP SOEKARNO HATTA	27	BKP KLS II PANGKAL PINANG
2	BBKP TANJUNG PRIOK	28	BKP KLS II TARAKAN
3	BBKP SURABAYA	29	BKP KLS CILEGON
4	BBUSKP	30	BKP KLS II YOGYAKARTA
5	BBUTTMKP	31	BKP KLS II PALANGKARAYA
6	BBKP BELAWAN	32	BKP KLS II PALU
7	BBKP MAKASSAR	33	BKP KLS II GORONTALO
8	BKP KLS I DENPASAR	34	SKP KLS I BIAK
9	BKP KLS I SEMARANG	35	SKP KLS I ENTIKONG
10	BKP KLS BALIKPAPAN	36	SKP KLS I TG.BALAI ASAHAN
11	BKP KLS I BD. LAMPUNG	37	SKP KLS I CILACAP
12	BKP KLS I PEKANBARU	38	SKP KLS I SUMBAWA BESAR
13	BKP KLS I PONTIANAK	39	SKP KLS I BANDA ACEH
14	BKP KLS I KUPANG	40	SKP KLS I SORONG
15	BKP KLS I BANJARMASIN	41	SKP KLS I SAMARINDA
16	BKP KLS I MATARAM	42	SKP KLS I AMBON
17	BKP KLS I MANADO	43	SKP KLS BENGKULU
18	BKP KLS I PADANG	44	SKP KLS I TIMIKA
19	BKP KLS I JAYAPURA	45	SKP KLS I MERAUKE
20	BKP KLS I PALEMBANG	46	SKP KLS I BANDUNG
21	BKP KLS I JAMBI	47	SKP KLS PAREPARE
22	BKP KLS I BATAM	48	SKP KLS II TG. BALAI KARIMUN
23	BKP KLS II MEDAN	49	SKP KLS II ENDE
24	BKP KLS IITANJUNG PINANG	50	SKP KLS II MAMUJU
25	BKP KLS II TERNATE	51	SKP KLS II MANOKWARI
26	BKP KLS II KENDARI	52	SKP KLS II BANGKALAN

52 UPT tersebut melaksanakan tugas antara lain:

- melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- melakukan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- memberikan pelayanan operasional Karantina Hewan dan tumbuhan;
- memberikan pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- mengelola sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik Karantina Hewan dan tumbuhan;

- melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang karantina hewan, Karantina Tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati (Gambar 56).

Gambar 56. Pemusnahan Bibit Jamur asal Malaysia yang Tidak Memenuhi Syarat Karantina

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementan, antara lain: (1) Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik); (2) *Training Coaching & Mentoring; (3)* Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik; (4) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) Pembahasan Permentan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) Pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016; dan (7) Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian pada Tahun 2016, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 184.286.860.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 159.551.109.863,- atau capaiannya sebesar 86,58%.

Sasaran Strategis 11 (SS 11)
MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013, tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014 serta tahun 2016 untuk pelaksanaan RB tahun 2015. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut.

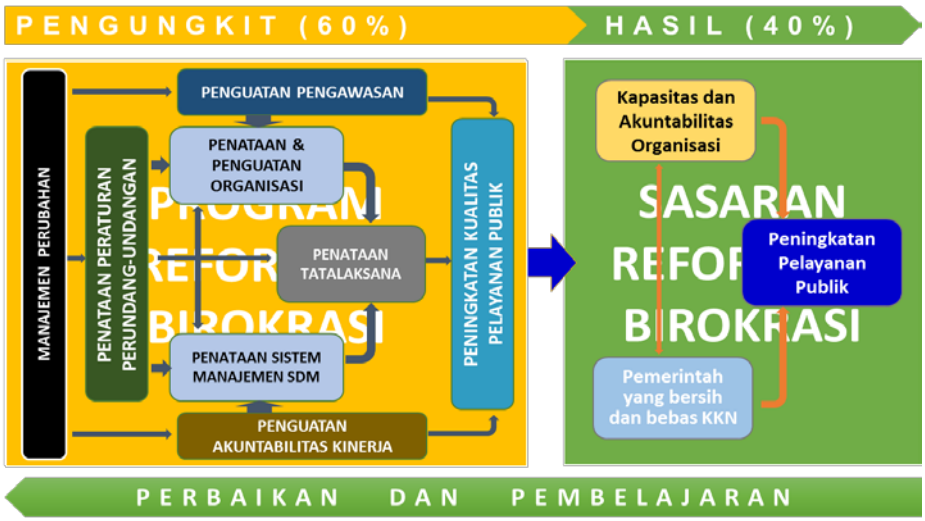

Gambar 57. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria pengungkit memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor sebelas ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

SS 11. IKU 1 **Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**	Target **73** Realisasi ***)**	% Capaian ***)**

Keterangan: *) nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2016 masih menunggu konfirmasi dari Kementerian PAN&RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2016 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu konfirmasi nilai dari Kementerian PAN&RB. Untuk keperluan evaluasi yang akan disampaikan pada Laporan Kinerja ini, digunakan hasil penilaian yang dilakukan sendiri oleh Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tahun 2016, yang disebut dengan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).

Perkembangan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sejak tahun 2014 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 58.

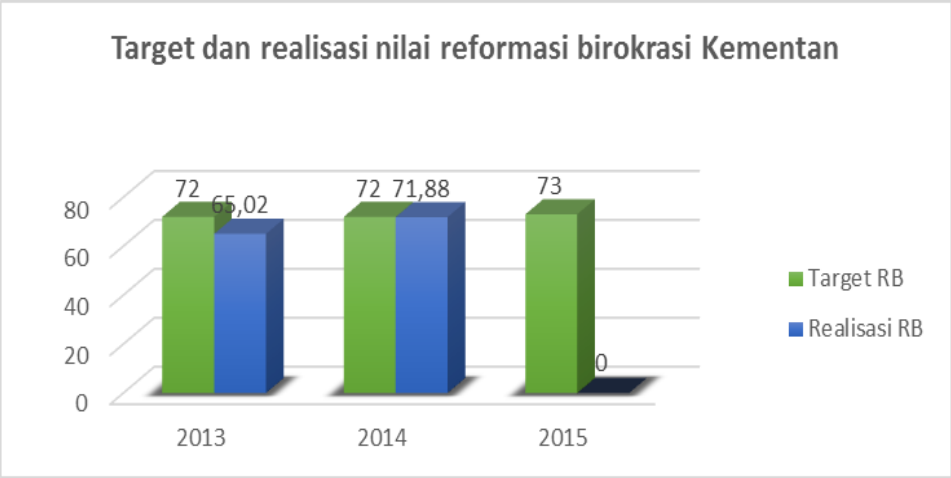

Gambar 58. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai RB Kementan tahun 2013- 2015

Gambar 58. menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementan. Hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65.02 dengan kategori "B" (Baik). Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 71.88 dengan kategori "BB" (Sangat Baik). Sedangkan nilai RB Tahun 2016, hingga akhir Januari 2017, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mengumumkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015.

Dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, Kementerian Pertanian telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan. Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3126/OT.240/A/08/2016. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 50.

Tabel 50. Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian berdasarkan Hasil Evaluasi PMPRB tahun 2015

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2015	
			Nilai Capaian	% Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	*PENGUNGKIT*			
1	Manajemen Perubahan	5	4,26	85,20%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	3,75	75,00%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,83	80,50%
4	Penataan Tata Laksana	5	4,46	89,20%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	14,32	95,47%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,07	67,83%
7	Pegnuatan Pengawasan	12	10,39	86,58%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5,63	93,83%
	Sub Total Komponen Pengungkit	***60***	***51,71***	***86,18%***
B	*HASIL*			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja	20	15,2	76,00%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	7,25	72,50%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,05	80,50%
	Sub Total Komponen Hasil	***40***	***30,5***	***76,25%***
	Indeks Reformasi Birokrasi	-	**82,21**	

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar **82.21**. Jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2014 sebesar **71,86**, terdapat **kenaikan sebesar 14,40%**. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait.

Peningkatan Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian yang mendukung pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Perubahan.
   a) Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
   b) Telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 397 Tahun 2015 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125 Tahun 2016.
   c) Telah ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1594 Tahun 2016.
   d) Telah dilakukan sosialisasi road map tingkat eselon I dan upt teknis. Tahun 2016.
   e) Telah dilakukan pelatihan *coaching and mentoring* bagi sebagian PNS Kementerian Pertanian sebagai pelaksanaan revolusi mental ASN.
   f) Pengisian LHKPN secara bersama-sama bagi seluruh pejabat yang memiliki kewajiban mengisi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016.
   g) Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi program revolusi mental, pemasangan baliho, program penyusunan kurikulum revolusi mental pelatihan pertanian Tahun 2016.
   h) Telah dilakukan sosialisasi rencana strategis program dan kegiatan revolusi mental di unit eselon I Kementerian Pertanian.
   i) Telah dilaksanakan evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016.

2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
   1) Pertemuan pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka pernyataan komitmen integritas.
   2) Pertemuan sebagian pejabat Eselon III, IV, dan PNS lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka pernyataan komitmen penerapan nilai budaya kerja.
   3) Pembentukan Satuan Pelaksana Pemantauan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
   4) Penanganan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terintegrasi.
   5) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Maturitas Pengendalian Internal di Semarang.

6) Pembentukan Satuan Pelaksana SPI di setiap unit kerja eselon I dan sub satlak SPI di setiap unit kerja eselon II.

1. Audit Kinerja

- Audit Kinerja terhadap 476 satker (44,44%) dari total 1.071 satker lingkup Kementerian Pertanian TA 2016
- Besar anggaran yang diaudit Rp10.481.723.554.605,00 (33,27%) dari total anggaran TA 2016 Rp31.507.186.127.000,00
- Nilai temuan hasil Audit Kinerja (hingga 31 Desember 2016) sebesar Rp19.141.242.072,58, dan telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp12.925.567.381,14 (67,53%).

2. Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu

- Jenis audit investigasi dan tujuan tertentu TA 2016 : (a) pengadaan barang/jasa; (b) kode etik pegawai; (c) penyaluran dana bantuan sosial (bansos) ke kelompok tani penerima; (d) kinerja pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan (e) pengelolaan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan
- Jumlah kerugian negara hasil audit investigatif dengan tujuan tertentu TA 2016 senilai Rp4.182.721.129,88 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp2.105.583.644,88 (50,34%). Saldo akhir kerugian negara per 31 Desember 2016 senilai Rp2.077.137.485,00 (49,66%)

3. Unit Pengelola Gratifikasi

- Telah dikeluarkan Permentan No. 97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian
- Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap bulan dan triwulan
- Laporan UPG Tahun 2016 adalah sebanyak 162 laporan

4. Pengawalan SPI

- Kegiatan pengawalan yang dilakukan pada TA 2016 : pengawalan SPIP pengadaan barang dan jasa, Program Swasembada Pangan/Kegiatan Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai, Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao, Kegiatan Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia, Kegiatan Taman Teknologi Pertanian/Taman Sains Pertanian, dan Pengadaan Indukan Sapi Brahman Cross untuk mendukung swasembada daging

5. Evaluasi Reformasi Birokrasi

- Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2016 dengan hasil nilai indeks RB sebesar 82,22 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 51,72 atau 86,21% dari bobot 60, dan komponen hasil sebesar 30,50 atau 76,24% dari bobot 40

Gambar 59. Kinerja Penguatan Sistem Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
   1) Kementerian Pertanian telah melaksanakan pemantauan Perjanjian Kinerja (PK) secara berkala (triwulan).
   2) Seluruh dokumen SAKIP telah diunggah kedalam Website SAKIP Kementan yang dapat diakses oleh *stakeholder* (terbuka).

4. Program Penguatan Kelembagaan.
   1) Pengintegrasian fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kedalam unit kerja Eselon I komoditas (peleburan Ditjen PPHP).
   2) Penetapan Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Kementerian Pertanian pada setiap unit kerja Eselon I.
   3) Penataan urusan pertanian konkuren di provinsi dan kabupaten/kota.

5. Program Penguatan Tata Laksana.
   1) Penyusunan peta proses bisnis berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019.
   2) Penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2016.
   3) Pengintegrasian SIM ASN dengan e-personal dalam rangka pengisian kinerja harian pegawai.
   4) Penerapan arsip elektronik di lingkungan Kementerian Pertanian.

6. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
   1) Pengumuman pelaksanaan seleksi kompetisi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian dapat diakses secara mudah melalui media TI pada setiap tahapan.
   2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dan menjadikannya dasar untuk pemberian tunjangan kinerja melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2016.
   3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala.
   4) Melakukan pemutakhiran data secara berkala pada SIM ASN Kementerian Pertanian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
   5) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial.
   6) Penyusunan pengembangan karir melalui penilaian *soft competency* bagi pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
   1) Evaluasi secara berkala peraturan perundang-undangan.
   2) Evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program legislasi pertanian (prolegtan).

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   1) Melaksanakan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
   2) Menyusun SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif untuk perbaikan kualitas pelayanan.
   3) Setiap unit kerja pelayanan publik lingkup Kementerian Pertanian telah menggunakan Teknologi informasi (TI) dalam memberikan pelayanan.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, pada Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp 100.144.554.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp 93.360.300.629,- atau capaiannya sebesar 93,20%.

Kegiatan Dukungan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Selain kegiatan-kegiatan spesifik teknis sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kementerian Pertanian juga melaksanakan program dan kegiatan dukungan kepada pencapaian sasaran strategis, yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan diperlukan upaya mencegah masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya untuk mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK yang memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2011-2016, sebagaimana tergambarkan dalam penerbitan sertifikasi, seperti terlihat pada Tabel 51.

Tabel 51. Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2010-2016

Sertifikasi	Frekuensi Penerbitan (kali)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Karantina Hewan	417.975	443.401	413.280	471.868	599.700	700.731
Karantina Tumbuhan	341.961	468.492	452.994	556.331	575.830	688.372
TOTAL	**759.936**	**911.893**	**866.274**	**1.028.199**	**1.175.530**	**1.389.103**

Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2016

Badan Karantina Pertanian tahun 2016 telah menerbitkan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) impor: 91.337 kali; (2) ekspor: 135.483 kali, (3) domestik masuk: 144.176

kali, dan (4) domestik keluar 317.376 kali, dengan total sertifikat sebanyak 688.372 kali. Sedangkan frekuensi penerbitan sertifikasi untuk komoditas hewan dan produknya adalah: (1) impor: 50.801 kali, (2) 20.017 kali, (3) domestik masuk: 224.743 kali, dan (4) domestik keluar: 389.145 kali, dengan total sertifikat sebanyak 700.731 kali. Total penerbitan sertifikasi untuk komoditas tumbuhan dan hewan beserta produksinya sebanyak 1.389.103 kali.

Pada tahun 2016, Badan Karantina Pertanian telah melakukan tindakan penahanan sebanyak 1.550 kali, tindakan penolakan sebanyak 1.399 kali dan tindakan pemusnahan sebanyak 1.253 kali, sehingga total tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan sebanyak 4.202 kali.

Selain itu, telah juga dilakukan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan kegiatan impor komoditas hewan. Total tindakan penahanan sebesar : 107.114 kg, 47.158 lembar, 22.678 ekor, antara lain yaitu: daging sapi 44.464 kg, daging unggas 24.306 kg, unggas 22.626 ekor, kulit sapi 47.158 lembar dan 1.246 kg, daging babi 1.654 kg, dan telur unggas 1.505 kg. Untuk total tindakan penolakan sebesar 21.129 kg antara lain: daging sapi 8.281 kg, daging babi 1063 kg, daging kerbau 140 kg, unggas 234 ekor, dan telur unggas 1.456 kg. Total tindakan pemusnahan sebesar 29.807 kg antara lain: daging sapi 50.407 kg, daging kerbau 960 kg, daging babi 153 kg, unggas 735 ekor, kulit sapi 447 kg, dan telur unggas 47 kg.

Adapun untuk komoditas tumbuhan, total tindakan penahanan komoditas tumbuhan impor sebesar 68.452.367.386 kg, total tindakan penolakan 6.754.757 kg, dan total tindakan pemusnahan 61.958.896 kg. Untuk tindakan penahanan meliputi antara lain: gandum biji 31.501.575.000 kg, kedele 3.130.110.000 kg, dan buah segar 7.814.738.340 kg.

2. Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Dalam rangka pemberdayaan petani guna mendukung pencapaian produksi komoditas strategis nasional selama tahun 2016 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1). Pengawalan Penyuluh di Sentra Produksi

Pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi komoditas strategis pertanian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Pola pembelajaran dalam meningkatkan kapasitas petani dilakukan melalui kursus tani, fasilitasi bahan pembelajaran, serta rembug tani. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai dan komoditas strategis lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 25.734 penyuluh PNS dan 19.156 penyuluh THL-TB PP pada 5.232 BP3K di 24.000 WKPP dan sentra produksi yang diilustrasikan pada Tabel 52.

Tabel 52. Pengawalan dan Pendampingan di Sentra Produksi

No	Sentra	Jumlah WKPP	Penyuluh (org)	THL-TB PP (org)	BP3K (unit)
1	Padi	14.640	15.823	11.185	3.192
2	Jagung	2.640	2.795	2.248	576
3	Kedelai	1.920	2.033	1.635	419
4	Tebu	1.680	1.779	1.431	366
5	Sapi/kerbau	960	1.017	817	208
6	Bawang merah dan aneka cabai	2.160	2.287	1.840	471
	Total	24.000	25.734	19.156	5.232

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2016

2) Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BP3K sebagai simpul koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di kecamatan. Dengan fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di BP3K dalam rangka mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat perdesaan pada umumnya. Kegiatan peningkatan kapasitas BP3K memiliki tahapan kegiatan, yaitu: (1) Temu teknis penyuluhan di kecamatan, (2) Rembug tani, (3) Kursus tani, (4) *Farmer's Field Day*

(FFD. Sasaran BP3K yang difasilitasi pada tahun 2016 sebanyak 5.232 unit.

3). Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya

Penumbuhkembangan penyuluh swadaya memegang peran penting dalam pendampingan bagi petani di sentra produksi. Pada tahun 2016 telah dilakukan pemberdayaan bagi 8.000 orang penyuluh swadaya. Kegiatan penumbuhkembangan penyuluh swadaya meliputi demplot, kursus tani, dan bantuan transport bagi penyuluh swadaya.

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2016 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1) Berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI) Tahun 2016, peringkat ketahanan pangan Indonesia naik dari 74 di tahun 2015 menjadi 71 di tahun 2016, dari total 133 negara yang dilakukan penilaian. Indonesia berada pada peringkat ke 66 dari 133 negara dalam hal ketersediaan pangan Indonesia, di mana nilainya dari 51,2 di tahun 2015 menjadi 54,1 di tahun 2016. Indeks peningkatan nilai ketahanan pangan Indonesia merupakan terbesar dibandingkan negara lain yang dinilai, yaitu sebesar 2,7 (Gambar 60).

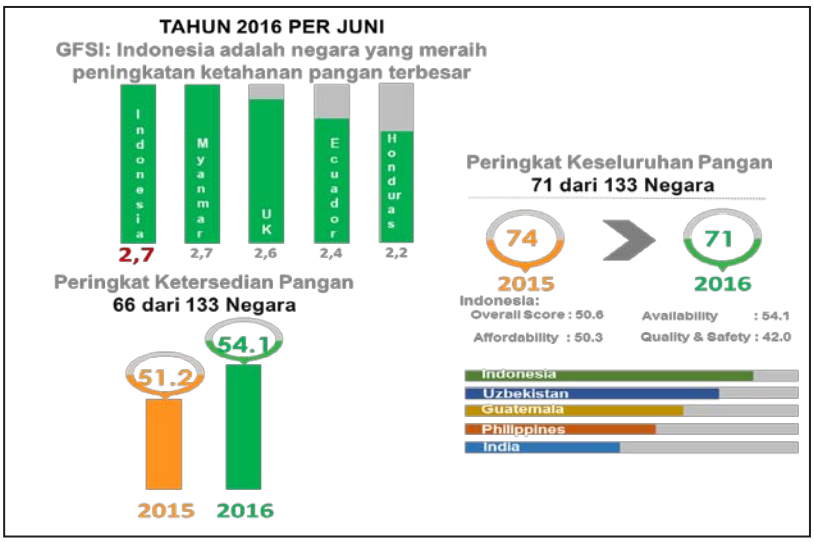

Gambar 60. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia

2). Mayoritas petani menyatakan puas atas kinerja Kementerian Pertanian. Survei yang dilakukan oleh INDEF melaporkan 76.8% petani menyatakan puas; dan oleh CSIS melaporkan 72.9% petani menyatakan puas.

3). Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam hal penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4) Pada Tahun 2016 Ombudsman RI telah melakukan penilaian terhadap 56 Unit Layanan lingkup Kementerian Pertanian. Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat 48 unit layanan Kementerian Pertanian mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) (Gambar 61).

Gambar 61. Penyerahan Penghargaan Ombudsman oleh Ketua Ombudsman RI kepada Kepala Badan Karantina Pertanian

5) Anugerah Parahita Ekapraya Award kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan kategori Mentor ini merupakan kategori tertinggi.

6) Kementerian Pertanian meraih peringkat ketujuh dalam Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016

7) Kementerian Pertanian merupakan Salah satu Kementerian Negara /Lembaga dengan nilai indicator Kinerja dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2016, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp 27.726.630.187.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 11 program Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian mendapatkan *self blocking* sebesar Rp. 5.938.645.459.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp 21.100.680.272.646,-, ditambah dengan *self blocking*, realisasi menjadi Rp. 27.039.325.731.646,- atau 97,52%. Persentase realisasi anggaran tahun 2016 ini lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 87,63%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 6 tahun (2011-2016) disajikan pada Tabel 53.

Tabel 53. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2011-2016

NO	TAHUN	PAGU (Rp000)	REALISASI (Rp000)	%
1	2011	17.627.605.330,00	15.984.931.702,09	90,68
2	2012	19.667.874.192,00	17.719.613.508,00	90,09
3	2013	17.928.730.779,00	15.857.112.302,97	88,45
4	2014	14.238.721.451,00	13.251.063.953,00	93,06
5	2015	32.725.568.426,00	28.675.810.207.755	87,63
6	2016	27.726.630.187.000	27.039.325.731.646	97,52

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2016

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada rapat-rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2016 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan ditanggung oleh 11 program Kementerian Pertanian.

Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 2016 disajikan pada **Lampiran 3.**

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 11 (empat) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 11 indikator dan berhasil 13 indikator). Dari hasil evaluasi hanya 2 indikator yang cukup berhasil, 1 indikator kurang berhasil, dan 1 indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu: (1) Produksi padi mencapai 79,14 juta ton dari target 76,22 juta ton; (2) Produksi jagung mencapai 23,16 juta ton dari target 21,35 juta ton; (3) Harga GKP di tingkat Produsen lebih besar dari HPP; (4) Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras mencapai 6,2% dari target 5,7%; (5) Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar mecapai 14,85 dari target ≤ 15; (6) Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah mencapai 19,79 dari target ≤ 20, (7) Produksi manggis mencapai 225,7 ribu ton dari target 147 ribu ton; (8) Produksi Kelapa Sawit mencapai 32.524 Ribu Ton CPO dari target 30.845 Ribu Ton CPO; (9) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya mencapai 25,6% dari target 22%; (10) PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian mencapai

Rp 26,5 juta dari target Rp 26 juta; (11) Nilai IKM Kementerian Pertanian mencapai 82,72 dari target 81;

Indikator kinerja yang **berhasil** yaitu: (1) Produksi daging sapi dan kerbau mencapai 0,561 juta ton dari target 0,589 juta ton; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 86 dari target 86,2; (3) Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa mencapai 347 dari target 364; (4) Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit mencapai 19,68 dari target ≤ 17; (5) Produksi mangga mencapai 2.180 ribu ton dari target 2.340 ribu ton; (6) Produksi nanas mencapai 1.795 ribu ton dari target 1.926 ribu ton; (7) Produksi salak mencapai 986,5 ribu ton dari target 1.080; (8) Produksi kentang mencapai 1.289 ribu ton dari target 1.348 ribu ton; (9) Produksi karet mencapai 3.158 ribu ton karet kering dari target 3.438 ribu ton; (10) Produksi kopi mencapai 639,3 ribu ton dari target 738 ribu ton; (11) Produksi kelapa mencapai 2.890 ribu ton dari target 3.355 ribu ton; (12) Produksi teh mencapai 144 ribu ton dari target 160 ribu ton; dan (13) Produksi daging kambing dan domba mencapai 114,9 ribu ton dari target 117 ribu ton.

Indikator kinerja yang **cukup berhasil** adalah: (1) Produksi tebu mencapai 2,22 juta ton dari target 2,80 juta ton; (2) Produksi kakao mencapai 657 ribu ton biji kering dari target 831 ribu ton.

Indikator kinerja yang **kurang berhasil** pencapaiannya di tahun 2016 ini yaitu Produksi kedelai mencapai 0,885 juta ton dari target 1,50 juta ton.

Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai RB Kementerian Pertanian karena sampai dengan akhir Januari 2017 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2016 khususnya perkembangan capaian 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 28 indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dukungan pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula tebu, daging sapi dan kerbau, cabai rawit, mangga, nanas, salak, kentang, karet, kopi, kakao, kelapa, teh, daging sapi /kerbau, kelapa sawit. Permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4) gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak sapi/kerbau, (6) serangan hama dan penyakit, (7) terbatasnya pemanfaatan teknologi, (8) penanganan pasca panen yang belum optimal, (9) keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani, (10) terbatasnya pendampingan dan bimbingan penyuluh di lapangan, (11) meningkatnya impor produk pertanian, dan (12) panjangnya rantai tata niaga.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2017 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pemanfaatan dan perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/ subsektor lain); integrasi tanaman pangan dengan perkebunan; meningkatkan kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; mendorong peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait HPP dan pembatasan importasi pangan, serta dengan pabrik gula untuk transparansi taksasi dan rendemen tebu petani. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2017 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

Tahun 2016 Kementerian Pertanian mengelola APBN senilai Rp 27.726.630.000,- yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.103 DIPA Satker. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian mendapatkan *self blocking* sebesar Rp 5.938.645.459.000,- Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2016, mencapai Rp 27.039.325.731.646,- atau 97,52%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2016 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

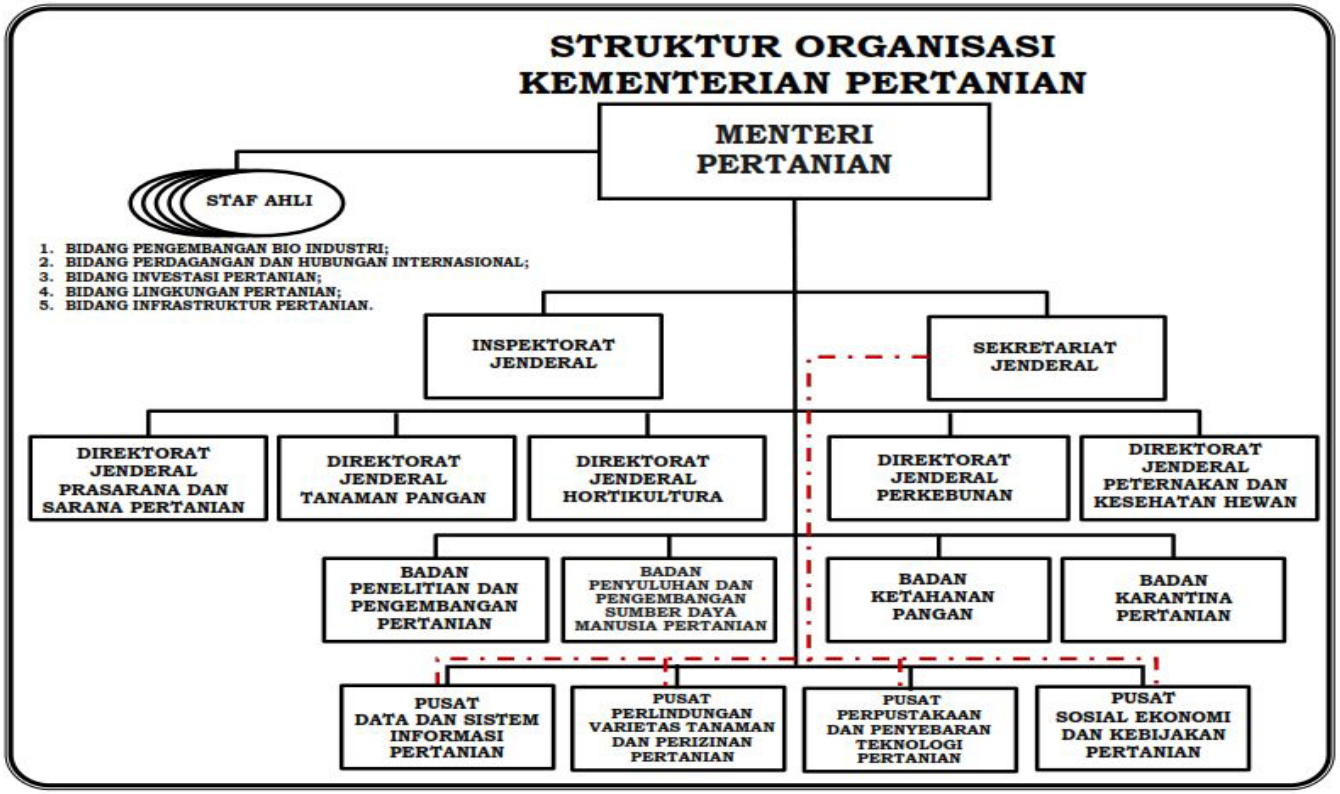

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

LAMPIRAN 2 DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/ RUANG, JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN BERDASARKAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

NO.	UNIT KERJA	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV						Jenis Kelamin		Pendidikan											JUMLAH
		A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	E	Jml	L	P	S3	S2	S1	D4	S Muda	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	2	3	**5**	7	22	55	56	**140**	151	423	155	140	**869**	71	47	5	8	4	**135**	699	450	12	205	481	0	6	58	0	1	365	13	8	**1149**
2	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN	0	0	0	2	**2**	4	7	12	4	**27**	41	61	27	42	**171**	25	21	28	21	2	**97**	188	109	2	136	108	0	0	2	0	0	40	5	4	**297**
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	0	2	2	2	**6**	40	42	75	51	**208**	90	227	83	88	**488**	29	31	7	3	2	**72**	439	335	8	112	317	1	2	49	0	0	254	15	16	**774**
4	DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	**0**	1	7	14	18	**40**	33	113	48	58	**252**	35	15	0	6	1	**57**	202	147	5	81	179	0	2	12	0	0	67	2	1	**349**
5	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN & KESEHATAN	6	3	24	18	**51**	156	143	181	128	**608**	266	480	315	335	**1396**	130	59	16	6	0	**211**	1449	817	20	475	473	22	10	232	2	0	845	74	113	**2266**
6	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	0	2	4	**7**	24	22	125	121	**292**	123	335	182	111	**751**	57	23	7	4	1	**92**	690	452	4	149	474	19	13	50	0	76	326	14	17	**1142**
7	BADAN LITBANG PERTANIAN	47	35	193	113	**388**	405	391	786	291	**1873**	793	1712	713	961	**4179**	429	256	162	80	148	**1075**	4948	2567	510	1150	1945	83	60	317	53	11	2649	324	413	**7515**
8	BADAN PPSDM PERTANIAN	0	22	42	39	**103**	104	183	170	128	**585**	281	487	241	266	**1275**	146	104	57	28	4	**339**	1542	760	56	495	658	161	7	102	3	0	607	88	125	**2302**
9	BADAN KETAHANAN PANGAN	0	0	1	0	**1**	5	5	9	7	**26**	25	119	57	35	**236**	23	11	1	3	1	**39**	160	142	7	71	118	0	2	8	0	0	91	2	3	**302**
10	DITJEN PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL PERTANIAN	0	0	0	0	**0**	2	7	15	17	**41**	38	102	41	69	**250**	48	22	4	1	1	**76**	198	169	3	120	167	0	0	14	0	0	61	1	1	**367**
11	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	0	0	0	5	**5**	10	15	19	21	**65**	34	115	53	53	**255**	26	21	3	2	0	**52**	203	174	5	86	163	0	2	8	0	0	94	10	9	**377**
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	5	0	7	4	**16**	219	351	395	472	**1437**	432	624	545	451	**2052**	200	74	13	2	1	**290**	2300	1495	10	739	1124	2	5	498	26	4	1351	16	20	**3795**
JUMLAH		**59**	**62**	**273**	**190**	**584**	**977**	**1195**	**1856**	**1314**	**5342**	**2307**	**4798**	**2460**	**2609**	**12174**	**1219**	**684**	**303**	**164**	**165**	**2535**	**13018**	**7617**	**642**	**3819**	**6207**	**288**	**109**	**1350**	**84**	**92**	**6750**	**564**	**730**	**20635**

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2016

LAMPIRAN 3. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2016

NO	ESELON-I	PAGU AWAL	SELF BLOCKING	PAGU AKHIR	REALISASI	2016%*)	2015%
1	Barantan	894.424.353.000	35.000.000.000	859.424.353.000	847.959.848.021	98,72	94,74
2	Badan PPSDMP	1.423.601.567.000	45.000.000.000	1.378.601.567.000	1.336.760.765.405	97,06	94,83
3	Badan Litbang	1.924.740.791.000	72.700.000.000	1.852.040.791.000	1.783.435.898.173	96,44	96,28
4	Ditjen Horti	1.050.297.366.000	43.256.486.000	1.007.040.880.000	953.086.240.272	94,86	86,26
5	BKP	705.856.464.000	34.000.000.000	671.856.464.000	636.679.529.289	95,02	88,74
6	Ditjen BUN	1.192.418.283.000	106.300.000.000	1.086.118.283.000	1.041.748.899.303	96,28	79,20
7	Setjen	1.563.096.836.000	157.040.000.000	1.406.056.836.000	1.364.639.301.286	97,35	96,26
8	Itjen	93.655.909.000	11.923.500.000	81.732.409.000	77.315.933.748	95,28	92,64
9	Ditjen PSP	9.109.711.454.000	2.099.031.361.000	7.010.680.093.000	6.867.822.632.258	98,43	90,11
10	Ditjen PKH	2.161.641.308.000	570.248.065.000	1.591.393.243.000	1.462.721.096.319	94,05	71,45
11	Ditjen TP	7.607.185.856.000	2.764.146.047.000	4.843.039.809.000	4.728.510.128.572	98,49	91,45
TOTAL		27.726.630.187.000	5.938.645.459.000	21.787.984.728.000	21.100.680.272.646	97,52	87,64

Sumber: SPAN Kemenkeu dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan

Keterangan: *) % Realisasi Tahun 2016 merupakan hasil perhitungan dari Realisasi ditambah *Self Blocking* dibagi Pagu Awal ((Realisasi+*Self Blocking*)/Pagu Awal)

LAMPIRAN 4. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Ànggaran yang dibutuhkan (Rp)
I. Peningkatan produksi kedelai				
1.	Peningkatan produksi melalui PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) kedelai(200 hektar)	Pebruari – Oktober 2017	Direktur Aneka Kacang dan Umbi	310.000.000.000
2.	Peningkatan produksi melalui BJA kedelai (10 hektar)	Maret – April 2017	Direktur Aneka Kacang dan Umbi	42.700.000.000
3	Ppht Kedelai 27 unit (270 Ha)	Maret – Oktober 2017	Direktur Perlindungan	559.575.000
4	Gerdal Kedelai 60 unit	Maret – Oktober 2017	Direktur Perlindungan	750.000.000
5	Penguatan Agroekosistem Kedelai 11 unit (110 hektar)	Maret – Oktober 2017	Direktur Perlindungan	93.500.000
II. Peningkatan produksi gula tebu				
6.	Melakukan penataan Pola Tanam Tebu	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	176.702.837.500
7.	Mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul sesuai rekomendasi	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	53.634.030.000
8.	Membangun inovasi varietas unggul tebu	12 Bulan	Badan Litbang Pertanian	1.115.400.000
9.	Mengoptimalkan dukungan dalam pengembangan tebu di lahan kering	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	93.903.837.500
10.	Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait HPP	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	548.000.000
11.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam membatasi peredaran gula rafinasi impor untuk konsumsi rumah tangga	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	274.300.000
12.	Mengeluarkan kebijakan terkait mekanisme pengendalian harga jual gula tebu	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	104.250.000
13	Meningkatkan skala usaha petani tebu melalui kewirausahaan tani serta melalui kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk tebu	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim dan BPPSDMP	532.000.000
14..	Meningkatkan penyuluhan berbasis workshop melalui diklat teknis dan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok tani	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim dan BPPSDMP	4.508.000.000
15..	Mekanisasi/otomasi	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	21.955.000.000
16.	Transparansi taksasi dan rendemen di tingkat petani dan pabrik gula (PG)	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	2.321.377.000
17.	Dukungan SDM/penyuluh di daerah pengembangan tebu	12 bulan	Direktorat Tanaman Semusim	18.416.692.000

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Ànggaran yang dibutuhkan
III. Peningkatan produksi daging sapi				
12.	Penanggulangan Reproduksi dan perbaikan pakan utamanya pada indukan sapi	2017	Direktorat Keswan	100.500.000.000
13.	Penanganan Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif	2017	Direktoat Kesmavet	36.380.569.000
14.	Perbaikan Pakan Ternak Sapi	2017	Direktorat Pakan	175.205.000.000
15.	Penguatan Kelembagaan Peternak	2017	Direktorat PPHNak	
16.	Optimalisasi Reproduksi	2017	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	762.561.834.000
17.	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	2017	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	30.000.000.000
IV. Peningkatan Skor PPH				
18.	KRPL	2017	BKP	42.209.500.000
19.	Gerakan Diversifikasi Pangan	2017	BKP	7.425.000.000
V. Variasi Produksi Cabai Rawit				
20.	Pengembangan Kawasan Cabai	Januari – Desember 2017	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	450.000.000.000
21.	Gerakan Pengendalian OPT	Januari – Desember 2017	Direktorat Perlindungan Hortikultura	11.662.000.000
22.	Pengaturan Pola Tanam Cabai	Januari – Desember 2017	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	563.346.000
23.	Pengembangan Varietas Cabai yang tahan terhadap serangan OPT	Januari-Desember 2017	Badan Litbang Pertanian	200.000.000
VI. Produksi Mangga				
24.	Pengembangan Kawasan Mangga	Januari – Desember 2017	Direktorat Buah dan Florikultura	375.000.000
VII. Produksi Nanas				
25.	Pengembangan Kawasan Nanas	Januari – Desember 2017	Direktorat Buah dan Florikultura	19.000.000
VIII. Produksi Salak				
26.	Pengembangan Kawasan Salak	Januari – Desember 2017	Direktorat Buah dan Florikultura	105.000.000

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Ànggaran yang dibutuhkan
IX. Produksi Kentang				
27.	Dukungan Pengembangan Kawasan Kentang	Januari – Desember 2017	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Rp. 1.800.000.000
X. Produksi Karet				
28.	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Karet	2017	Direktorat Tanaman Tahunan	165.550.000
29.	Penguatan Kelembagaan Petani Karet	2017	Direktorat Tanaman Tahunan	229.150.000
30.	Peremajaan Tanaman Karet	2017	Direktorat Tanaman Tahunan	36.318.250.000
31.	Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet	2017	Direktorat Perbenihan	1.089.389.000
32.	Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet Tahun 1	2017	Direktorat Perbenihan	312.280.000
33.	Dem-Farm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Karet	2017	Direktorat Perlindungan	627.213.000
34.	Pascapanen tanaman karet	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	2.782.310.000
35.	Fasilitasi pengolahan karet	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	1.270.000.000
XI. Produksi Kopi				
36.	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kopi	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	365.550.000
37.	Penguatan kelembagaan petani kopi	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	299.150.000
38.	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	320.800.000
39.	Intensifikasi Tanaman Kopi	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	32.010.074.000
40.	Perluasan Tanman Kopi	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	2.515.000.000
41.	Dem-Farm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi	2017	Direktorat Perlindungan	738.000.000
42.	SL-PHT Tanaman Kopi	2017	Direktorat Perlindungan	230.060.000
43.	Fasilitasi Pengolahan Kopi	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	2.441.100.000
44.	Pembangunan dan pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kopi	2017	Direktorat Perbenihan	1.995.444.100

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Ànggaran yang dibutuhkan
XII. Produksi Kakao				
45.	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	200.000.000
46.	Pengembangan Desa Kakao	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	50.000.000
47.	SL-PHT Tanaman Kakao	2017	Direktorat Perlindungan	218.060.000
48.	Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Kakao	2017	Direktorat Perbenihan	961.967.850
49.	Pascapanen tanaman kakao	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	937.600.000
50.	Fasilitasi pengolahan kakao	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	340.900.000
XIII. Produksi Kelapa				
51.	Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	365.550.000
52.	Penguatan kelembagaan petani kelapa	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	299.150.000
53.	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani kelapa	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	320.800.000
54.	Peremajaan Tanaman Kelapa	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	27.125.750.000
55.	Dem-Farm Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kelapa	2017	Direktorat Perlindungan	529.400.000
56.	SL-PHT Tanaman Kelapa	2017	Direktorat Perlindungan	204.020.000
57.	Fasilitasi Pengolahan Kelapa	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	1.969.700.000
58.	Pascapanen tanaman kelapa	2017	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran	381.835.000
59.	Pembangunan dan pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kopi	2017	Direktorat Perbenihan	2.658.533.650

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Ànggaran yang dibutuhkan
XIV. Produksi Teh				
45.	**Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan**	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	100.000.000
46.	Intensifikasi dan rehabilitasi Tanaman Teh	2017	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.252.460.000
XV. Produksi Daging Kambing dan Domba				
47.	Pengembangan sentra-sentra ternak kambing dan domba	2017	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	1.000.000.000

LAMPIRAN 5. PERJANJIAN KINERJA (PK) MENTERI PERTANIAN TAHUN 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2016
Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi 2. Produksi Jagung 3. Produksi Kedelai 4. Produksi Tebu 5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	76,22 Juta Ton 21,35 Juta Ton 1,50 Juta Ton 2,80 Juta Ton GKP 589 Ribu Ton Karkas
2.	Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa 2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	364 Kg/Tahun ≥ HPP
3.	Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,2
4.	Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5,70%
5.	Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar 2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit 3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 15 cv% ≤ 17 cv% ≤ 20 cv%
6.	Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga 2. Produksi Nanas 3. Produksi Manggis 4. Produksi Salak 5. Produksi Kentang 6. Produksi Karet 7. Produksi Kopi 8. Produksi Kakao 9. Produksi Kelapa 10. Produksi Teh 11. Produksi Daging Kambing dan Domba	2.340 Ribu Ton 1.926 Ribu Ton 147 Ribu Ton 1.080 Ribu Ton 1.348 Ribu Ton 3.438 Ribu Ton Karet Kering 738 Ribu Ton Kopi Berasan 831 Ribu Ton Biji Kering 3.355 Ribu Ton 160 Ribu Ton 117 Ribu Ton
7.	Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	1. Produksi Kelapa Sawit	30,845 Ribu Ton CPO
8.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	1. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya	22
9.	Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	1. PDB Pertanian Sempit/Jumlah Tenaga Kerja Pertanian	Rp. 26,0 Juta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Layanan Kelembagaan Pertanian	1. Nilai IKM Kementerian Pertanian	81
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	1. Nilai Reformasi Birokrasi	73

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Rp	1.563.096.836.000,-
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Rp	93.655.909.000,-
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp	7.607.185.856.000,-
4.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp	1.050.297.366.000,-
5.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Rp	1.192.418.283.000,-
6.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Rp	2.161.641.308.000,-
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp	9.109.711.454.000,-
8.	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	Rp	1.924.118.391.000,-
9.	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	Rp	1.369.751.708.000,-
10.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	705.856.464.000,-
11.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Rp	894.424.353.000,-

12.	Program Pendidikan Menengah Pertanian	Rp	53.849.859.000,-

Jakarta, Desember 2016
Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman